



RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2025 – 2029

**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur senantiasa kita haturkan ke hadirat Allah SWT karena berkah dan hidayahNya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sulawesi Tengah telah menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025 – 2029.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah merupakan Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah. 2025 – 2029 yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, menitikberatkan dalam pengembangan, pembinaan dan pendayagunaan perpustakaan serta peningkatan budaya baca masyarakat dan peningkatan pengelolaan arsip sesuai dengan kaidah-kaidah sistem kearsipan di Propinsi Sulawesi Tengah

Kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan pemikiran serta data dalam penyempurnaan Renstra ini dan kami mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak untuk penyempurnaan yang akan datang.

Harapan kami semoga Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025 – 2029 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah dapat bermanfaat dan berdampak positif bagi kemajuan dan keberhasilan Provinsi Sulawesi Tengah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan sumber daya manusia.

Palu, 01 September 2025

Plt. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi Sulawesi Tengah



Muh. Idham Khalid, S.Sos, M.A.P

Pembina Utama Muda

NIP. 19731231 199403 1 010003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
DAFTAR TABEL	IV
DAFTAR GAMBAR	VI
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan.....	8
1.4. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	
2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah	16
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah	39
BAB III. TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah.....	49
3.2. Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah	53
3.3. Metadata Indikator tujuan dan sasaran Renstra perangkat daerah	56
3.4. Penahapan Prioritas Pembangunan Tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah.....	61
3.5. Locus Perangkat Daerah Provinsi berdasarkan wilayah pengembangan kabupaten/Kota sesuai kebutuhan pengembangan daerah.....	63

3.6. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah.....	64
---	----

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	66
4.2. Uraian Sub Kegiatan, Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif	104
4.3. Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung Program	105
4.4. Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	105

BAB V. PENUTUP 107

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Jenis Kelamin	22
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Golongan Ruang dan Jenis Kelamin	22
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin	22
Tabel 2.4	Jumlah Pejabat Struktural Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah	23
Tabel 2.5	Jumlah Pejabat Struktural Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Jenis Kelamin	23
Tabel 2.6	Jumlah Pejabat Struktural Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Pendidikan	23
Tabel 2.7	Jumlah Jenis Jabatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin	24
Tabel 2.8	Jumlah Pejabat Fungsional Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Jenjang Jabatan dan Jenis Kelamin ...	24
Tabel 2.9	Data Pengunjung Berdasarkan Segmen Masyarakat Pengguna Periode Tahun 2021 s/d 2025.....	32
Tabel 2.10	Data Arsip Hasil Akuisisi.....	35
Tabel 2.11	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	46
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perpustakaan Provinsi Sulawesi Tengah.....	52
Tabel 3.2	Penahapan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah.....	61
Tabel 3.3	Arah kebijakan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah	65
Tabel 4.2	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rancangan Akhir Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Propinsi Sulawesi Tengah	68
Tabel 4.3	Rencana Program/ Kegiatan/ SubKegiatan dan Pendanaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah	74

Tabel 4.4	Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Rancangan Akhir Renstra	104
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Utama rancangan Akhir Renstra	105
Tabel 4.6	Indikator Kinerja Kunci Rancangan Akhir Resntra Pemerintah Daerah	106

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Dinas perpustakaan dan kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah	28
Gambar 3.1	Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah	53
Gambar 3.2	Konsep Renstra Perangkat Daerah	54
Gambar 3.3	Cascading Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2025 – 2029	56
Gambar 4.1	Kerangka Perumusan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah.....	67

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perpustakaan adalah institusi penyelenggara kepastakaan, koleksi karya tulis, karya cetak, dan karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian informasi dan rekreasi para pemustaka. Tujuan pembangunan nasional yang harus dicapai oleh bangsa indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Oleh karena itu dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan ditegaskan bahwa eksistensi perpustakaan pada hakekatnya bertujuan untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional tersebut yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

Arsip adalah naskah atau catatan yang tanggung jawab pengelolaannya ada pada pemerintah. Arsip adalah merupakan dokumen negara yang otentik dan kredibel sebagai bukti utama bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pemerintah daerah wajib menyusun beberapa dokumen perencanaan antara lain:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun;

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
3. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu satu tahun.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pasal 272 telah mengamanatkan pada setiap perangkat daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Penyusunan Renstra-PD tahun 2025–2029 ini dilaksanakan berdasarkan amanat **Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025** tentang *Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029*.

Penyusunan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025–2029 dilandasi oleh berbagai perubahan lingkungan strategis serta tantangan yang dihadapi dalam upaya mewujudkan tata kelola perpustakaan dan kearsipan yang profesional, modern, dan inklusif. Periode perencanaan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kontribusi sektor perpustakaan dan kearsipan dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia, literasi masyarakat dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan.

Kondisi tersebut menunjukkan perlunya perencanaan strategis jangka menengah yang terstruktur, terukur, dan responsif terhadap dinamika perubahan. Oleh karena itu, penyusunan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025–2029 menjadi instrumen penting dalam merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan yang mampu menjawab tantangan masa depan serta mewujudkan pelayanan perpustakaan dan kearsipan yang bermutu, inklusif, dan berkelanjutan.

Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai dokumen perencanaan pembangunan merupakan dokumen perencanaan yang berlaku 5 (lima) tahun dan disusun sesuai dengan tugas dan fungsi serta berpedoman kepada RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2025 – 2029 dan bersifat indikatif. Perumusan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah 2025 – 2029, merupakan proses yang tidak terpisahkan dan dilakukan bersamaan dengan tahap perumusan rancangan akhir RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah. Oleh karena itu, penyelarasan dan konsolidasi data dan informasi strategis yang dimuat di dalam rencana strategis ini sejalan dengan dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2025 – 2029.

Sebagai rencana pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tengah, pembangunan bidang perpustakaan dan kearsipan memberikan arah penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang merupakan bagian terpenting dalam rangka mewujudkan Visi Gubernur Sulawesi Tengah Yaitu : ***“Berani mewujudkan Sulawesi Tengah sebagai Wilayah Pertanian dan Industri yang Maju dan Berkelanjutan 2025-2029”***.

Penyusunan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah merupakan perencanaan strategis yang memuat program-program pembangunan bidang perpustakaan dan kearsipan yang bersifat mendasar dan mendesak untuk memecahkan permasalahan sosial yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah yang memerlukan suatu strategis bersama dan langkah-langkah menyeluruh disegala bidang pembangunan perpustakaan dan kearsipan harus mengaktualisasikan pemberdayaan masyarakat melalui peran serta masyarakat sebagai penggagas, perencana, pelaksanaan sekaligus penikmat hasil-hasil pembangunan.

Adapun Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 diharapkan dapat berfungsi sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) atau Rencana Pembangunan Tahunan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah, serta menjadi pedoman dalam pengendalian dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan, serta acuan dalam penyusunan Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah UU Nomor 47 Provinsi Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
8. Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan;
9. Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam;
11. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Perpustakaan;

19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 01 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tatacara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Kementerian Dalam Negeri tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
28. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
29. Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2024 tentang Layanan Satu Metadata Koleksi Perpustakaan Nasional;
30. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional;
31. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;
32. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
33. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah ;

34. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 09 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 Nomor 175, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 Nomor 161;
35. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 15 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
36. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 Nomor 182, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 168;
37. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
38. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai pedoman dalam merencanakan dan merumuskan program dan kegiatan pembangunan urusan wajib perpustakaan dan kearsipan yang akan

dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah,

- b. Sebagai kerangka acuan bagi seluruh pejabat baik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrasi maupun Pejabat Fungsional Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah,
- c. Untuk menentukan sasaran, arah kebijakan dan program serta kegiatan prioritas di bidang perpustakaan dan kearsipan,
- d. Sebagai landasan operasional dalam penyusunan berbagai program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah dalam kurun waktu 2025 – 2029,
- e. Sebagai bahan acuan dalam mengukur capaian target kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah pada akhir periode masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tengah,
- f. Untuk mewujudkan kinerja organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah yang profesional, akuntabel dan bertanggung jawab dalam penyusunan tahapan perencanaan di bidang perpustakaan dan kearsipan di Provinsi Sulawesi Tengah.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dalam penyusunan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 - 2029 adalah :

- a. Sebagai dokumen perencanaan yang merupakan komitmen dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah untuk mencapai

- sasaran pembangunan di bidang perpustakaan dan kearsipan yang ditetapkan dalam kurun waktu 5 tahun ke depan yaitu periode 2025 – 2029,
- b. Untuk memudahkan dalam pencapaian tujuan melalui penyusunan program dan kegiatan bagi seluruh aparatur yang ada pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah yang sejalan dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2025 – 2029,
 - c. Menjamin adanya konsistensi perencanaan antara program dan kegiatan yang bersifat prioritas sesuai dengan kebutuhan pembangunan di bidang perpustakaan dan kearsipan,
 - d. Untuk mempermudah bagi seluruh pejabat struktural, fungsional maupun pelaksana pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah dalam memahami untuk menentukan program dan kegiatan prioritas bidang perpustakaan dan kearsipan berdasarkan strategi dan arah kebijakan,
 - e. Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) pada setiap tahunnya sehingga dapat lebih terarah, terukur dan dapat dicapai.

1.4 Sistematika Penulisan

Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika penyusunan Renstra sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menguraikan hal-hal yang mendasari penyusunan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 dan nilai strategis perangkat daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan dalam penyusunan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 dari tingkat undang-undang hingga peraturan kepala daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Menguraikan tentang hal-hal yang hendak dicapai dalam penyusunan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029.

1.4 Sistematika Penulisan

Menginformasikan isi yang dimuat pada Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Menggambarkan susunan organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah yang diikuti dengan

penguraian tugas dan fungsi serta tata kerja dari setiap unit kerja dan dilengkapi dengan struktur organisasi

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Menjelaskan komponen pendukung kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah yaitu komposisi sumber daya manusia yang direpresentasikan dari berbagai jenisnya serta aset dan unit usaha yang operasional.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Menjelaskan kinerja pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah pada bidang perpustakaan dan kearsipan melalui peningkatan akses informasi, digitalisasi layanan, dan pembinaan kearsipan yang lebih sistematis.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Menerangkan pihak-pihak yang dituju untuk menerima pelayanan dari menerangkan pihak-pihak yang dituju untuk menerima pelayanan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah.

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Layanan

Memuat tentang perangkat Daerah yang menjadi mitra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi dalam melakukan layanan.

2.17 Kerjasama daerah yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah

Menjelaskan tentang tanggung jawab Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam menjalin kerjasama terhadap daerah/lembaga pendidikan dan perguruan tinggi dalam peningkatan literasi masyarakat dan pengelolaan arsip daerah

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah,

Memuat tentang penggalan masalah-masalah dalam pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi yang selanjutnya dianalisa untuk menentukan prioritas dan sasaran perangkat daerah. Dan menjabarkan permasalahan strategis dari berbagai faktor yang perlu ditangani oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah.

2.2.2 Isu Strategis

Memuat tentang isu strategis yang harus dihadapi agar pelayanan perpustakaan dan kearsipan menjadi lebih efektif, merata, dan mampu mendukung pembangunan sumber daya manusia serta akuntabilitas daerah

BAB III. TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah

Memuat tujuan jangka menengah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tahun 2025-2029.

3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Memuat sasaran jangka menengah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tahun 2025-2029.

3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Memuat rangkaian konsep dalam mencapai tujuan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tahun 2025-2029.

3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Memuat tentang arah kebijakan Dinas perpustakaan dan kearsipan dalam perancangan strategis sebagai pedoman yang mengarahkan penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang **perpustakaan** dan **kearsipan** agar sejalan dengan visi dan misi pemerintah daerah serta kebijakan nasional.

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menguraikan program, kegiatan, sub kegiatan yang nomenklaturnya mengacu pada keputusan Menteri Dalam Negeri yang mengatur terkait dengan nomenklatur program/ kegiatan/ subkegiatan dan pemutakhirannya beserta kinerja, indikator, target, dan pagunya yang direncanakan untuk 5 (lima) tahun mendatang. Dan memuat target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tahun 2025-2029. melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah.

BAB V. PENUTUP

Memuat kesimpulan mengenai penyusunan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tahun 2025-2029.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI TENGAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Gambaran pelayanan dijelaskan melalui analisis indikator capaian kinerja pelayanan berdasarkan tugas dan fungsi, sumber daya yang dimiliki, capaian-capaian penting yang telah dihasilkan periode sebelumnya dan capaian program prioritas RPJMD periode sebelumnya, serta hambatan-hambatan yang dihadapi dan dinilai perlu di atasi di masa mendatang.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah merupakan perangkat daerah yang memberikan pelayanan di bidang perpustakaan dan kearsipan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan dukungan susunan organisasi terdiri atas Kepala Dinas, Sekretariat dan 5 (lima) Bidang yaitu: Bidang Layanan, Alih Media, Otomasi dan Kerjasama Perpustakaan; Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca; Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan; Bidang Pengelolaan dan Pemanfaatan Arsip.

2.1.1 Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Propinsi Sukawesi Tengah

a. Susunan Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah serta Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2023 atas perubahan Peraturan Gubernur nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

serta Tata Kerja Perangkat Daerah tersebut diatas, maka Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
 2. Sekretaris membawahi:
 - a) Sub Bagian Program;
 - b) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
 - c) Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 3. Bidang Deposit, Pengembangan Koleksi, Pengolahan dan Konservasi Bahan Perpustakaan;
 4. Bidang Layanan, Alih Media, Otomasi dan Kerjasama Perpustakaan;
 5. Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca;
 6. Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan;
 7. Bidang Pengelolaan dan Pemanfaatan Arsip;
 8. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- b. Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah*

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah adalah merupakan salah satu organisasi perangkat daerah yang dibentuk karena adanya konsekuensi dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah adalah merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah. Adapun tugas

pokok Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah sesuai Susunan Organisasi Perangkat Daerah sebagai Berikut :

Kepala Dinas

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Perpustakaan dan Kearsipan yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi yang mempunyai fungsi meliputi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang deposit, pengembangan koleksi, pengolahan dan konservasi bahan perpustakaan, layanan, alih media, otomasi dan kerjasama perpustakaan, pengembangan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca, pembinaan dan pengawasan kearsipan dan pengelolaan dan pemanfaatan arsip;
- b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang deposit, pengembangan koleksi, pengolahan dan konservasi bahan perpustakaan, layanan, alih media, otomasi dan kerjasama perpustakaan, pengembangan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca, pembinaan dan pengawasan kearsipan dan pengelolaan dan pemanfaatan arsip;
- c. pelaksanaan administrasi dinas di Bidang deposit, pengembangan koleksi, pengolahan dan konservasi bahan perpustakaan, layanan, alih media, otomasi dan kerjasama perpustakaan, pengembangan

- perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca, pembinaan dan pengawasan kearsipan dan pengelolaan dan pemanfaatan arsip;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan administrasi, program, keuangan, aset, kepegawaian, umum dan Korpri di lingkungan Dinas yang mempunyai fungsi meliputi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja, pengelolaan administrasi keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
- b. penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan rencana kerja, pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
- c. penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pelayanan administrasi keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- d. pelaksanaan urusan penyusunan rencana pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- e. pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas; dan
- g. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan.

Sub Bagian Program

Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis, pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi dalam rangka penyiapan bahan penyusunan program, dan

melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan. Uraian tugas Sub Bagian Program meliputi:

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Sub Bagian Program;
- b. melaksanakan penghimpunan peraturan perundang undangan, pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- c. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan penyusunan program dengan pihak dan unit kerja terkait;
- d. melaksanakan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana kerja meliputi pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi;
- e. melaksanakan penyiapan tugas teknis pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi; f. memfasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- f. melaksanakan penyiapan laporan seluruh proses perencanaan program;
- g. melaksanakan penyusunan Rencana Kerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Strategi di lingkungan Dinas;
- h. melaksanakan pengoordinasian penyusunan peta proses bisnis di lingkungan Dinas;
- i. melaksanakan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana kerja di lingkungan Sub Bagian Program;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan

- k. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Program dan Dinas.

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga dan surat menyurat. Uraian tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum meliputi:

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun rencana kerja Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
- b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga, umum, dan Korpri;
- c. melakukan koordinasi dan pembinaan urusan Korpri di lingkungan Dinas;
- d. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian dan umum;
- e. melaksanakan/menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, penetapan status kepegawaian, pembuatan Kartu Pegawai, Kartu BPJS, TASPEN, Kartu Suami/Isteri, dan SKP;
- f. melaksanakan pengelolaan persuratan, kehumasan, dokumentasi, arsip, perpustakaan, dan hukum;
- g. melaksanakan pengoordinasian penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Peta Jabatan, dan Standar Kompetensi Jabatan;

- h. melaksanakan pengoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimum;
- i. melaksanakan/mengelola Angka Fungsional; Kredit Jabatan;
- j. melaksanakan penyusunan Nominatif dan Daftar Urut Kepangkatan serta mengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian;
- k. melaksanakan urusan rumah tangga, penyiapan pelaksanaan upacara, rapat, penerimaan tamu kebersihan dan keamanan di lingkungan kantor;
- l. melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil penyelenggaraan kegiatan Sub Bidang Kepegawaian dan Umum;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan;
- n. melaksanakan penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum serta Dinas.

Sub Bagian Keuangan dan Aset

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis administrasi, pengelolaan keuangan dan aset. Uraian tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset meliputi:

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset;
- c. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan keuangan dan aset dengan pihak lain dan unit kerja terkait;

- d. melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
- e. melakukan urusan perbendaharaan, verifikasi dan administrasi pengelolaan keuangan dan aset;
- f. melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan, aset dan penyiapan pembayaran gaji pegawai;
- g. melaksanakan administrasi dan penyetoran penerimaan bukan pajak daerah;
- h. melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah;
- i. melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- k. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset serta Dinas.

Bidang Deposit, Pengembangan Koleksi, Pengolahan Dan Konservasi Bahan Perpustakaan

Bidang Deposit, Pengembangan Koleksi, Pengolahan dan Konservasi Bahan Perpustakaan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan Bidang Deposit, Pengembangan Koleksi, Pengolahan Bahan Perpustakaan, dan Konservasi Bahan Perpustakaan yang mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis Bidang Deposit, Pengembangan Koleksi, Pengolahan Bahan Perpustakaan, dan Konservasi Bahan Perpustakaan;
- b. pelaksanaan kebijakan di Bidang Deposit, Pengembangan Koleksi, Pengolahan Bahan Perpustakaan, dan Konservasi Bahan Perpustakaan;

- c. pelaksanaan pembinaan/bimbingan teknis di Bidang Deposit, Pengembangan Koleksi, Pengolahan Bahan Perpustakaan, dan Konservasi Bahan Perpustakaan;
- d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tugas di Bidang Deposit, Pengembangan Koleksi, Pengolahan Bahan Perpustakaan, dan Konservasi Bahan Perpustakaan;
- e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan; dan
- f. penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Deposit, Pengembangan Koleksi, Pengolahan Bahan Perpustakaan, Perpustakaan.

Bidang Layanan Ali Media, Otomasi dan Kerjasama Perpustakaan

Bidang Layanan, Alih Media, Otomasi dan Kerjasama Perpustakaan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan Bidang Layanan, Kerjasama Perpustakaan, Alih Media, dan Otomasi Perpustakaan yang mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis Bidang Layanan, Kerjasama Perpustakaan, Alih Media, dan Otomasi Perpustakaan;
- b. pelaksanaan kebijakan di Bidang Layanan, Kerjasama Perpustakaan, Alih Media, dan Otomasi Perpustakaan;
- c. pelaksanaan pembinaan/bimbingan teknis di Bidang Layanan, Kerjasama Perpustakaan, Alih Media, dan Otomasi Perpustakaan;
- d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tugas di Bidang Layanan, Kerjasama Perpustakaan, Alih Media, dan Otomasi

Perpustakaan; e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan

- e. penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Layanan, Alih Media, Otomasi dan Kerjasama Perpustakaan.

Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca

Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan, Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Perpustakaan Pengembangan Pembudayaan Kegemaran Membaca yang mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan, Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Perpustakaan dan Pengembangan Pembudayaan Kegemaran Membaca;
- b. pelaksanaan kebijakan di Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan, Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Perpustakaan dan Pengembangan Pembudayaan Kegemaran Membaca;
- c. pelaksanaan pembinaan/bimbingan teknis di Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan, Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Perpustakaan dan Pengembangan Pembudayaan Kegemaran Membaca;
- d. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tugas di Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan, Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Perpustakaan dan Pengembangan Pembudayaan Kegemaran Membaca;

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
- f. penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan, Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Perpustakaan dan Pengembangan Pembudayaan Kegemaran Membaca.

Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan

Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan Bidang Pembinaan Kearsipan Perangkat Daerah, Pembinaan Kearsipan Perusahaan, Ormas/Orpol dan Masyarakat dan Pengawasan Kearsipan yang mempunyai mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis Bidang Pembinaan Kearsipan Perangkat Daerah, Pembinaan Kearsipan Perusahaan, Ormas/Orpol dan Masyarakat dan Pengawasan Kearsipan;
- b. pelaksanaan kebijakan di Bidang Pembinaan Kearsipan Perangkat Daerah, Pembinaan Kearsipan Perusahaan, Ormas/Orpol dan Masyarakat dan Pengawasan Kearsipan;
- c. pelaksanaan pembinaan/bimbingan teknis di Bidang Pembinaan Kearsipan Perangkat Daerah, Pembinaan Kearsipan Perusahaan, Ormas/Orpol dan Masyarakat dan Pengawasan Kearsipan;
- d. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tugas di Bidang Pembinaan Kearsipan Perangkat Daerah, Pembinaan Kearsipan Perusahaan, Ormas/Orpol dan Masyarakat dan Pengawasan Kearsipan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan

- f. penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas Bidang Pembinaan Kearsipan Perangkat Daerah, Pembinaan Kearsipan Perusahaan, Ormas/Orpol dan Masyarakat dan Pengawasan Kearsipan.

Bidang Pengelolaan dan Pemanfaatan Arsip

Bidang Pengelolaan dan Pemanfaatan Arsip mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan Bidang Pengelolaan Arsip Dinamis, Akuisisi, Pengolahan dan Preservasi Arsip, Pemanfaatan Arsip Statis dan Sistem Informasi Kearsipan yang mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis Bidang Pengelolaan Arsip Dinamis, Akuisisi, Pengolahan dan Preservasi Arsip dan Pemanfaatan Arsip Statis dan Sistem Informasi Kearsipan;
- b. pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengelolaan Arsip Dinamis, Akuisisi, Pengolahan dan Preservasi Arsip dan Pemanfaatan Arsip Statis dan Sistem Informasi Kearsipan;
- c. pelaksanaan pembinaan/bimbingan teknis di Bidang Pengelolaan Arsip Dinamis, Akuisisi, Pengolahan dan Preservasi Arsip dan Pemanfaatan Arsip Statis dan Sistem Informasi Kearsipan;
- d. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tugas di Bidang Pengelolaan Arsip Dinamis, Akuisisi, Pengolahan dan Preservasi Arsip dan Pemanfaatan Arsip Statis dan Sistem Informasi Kearsipan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan

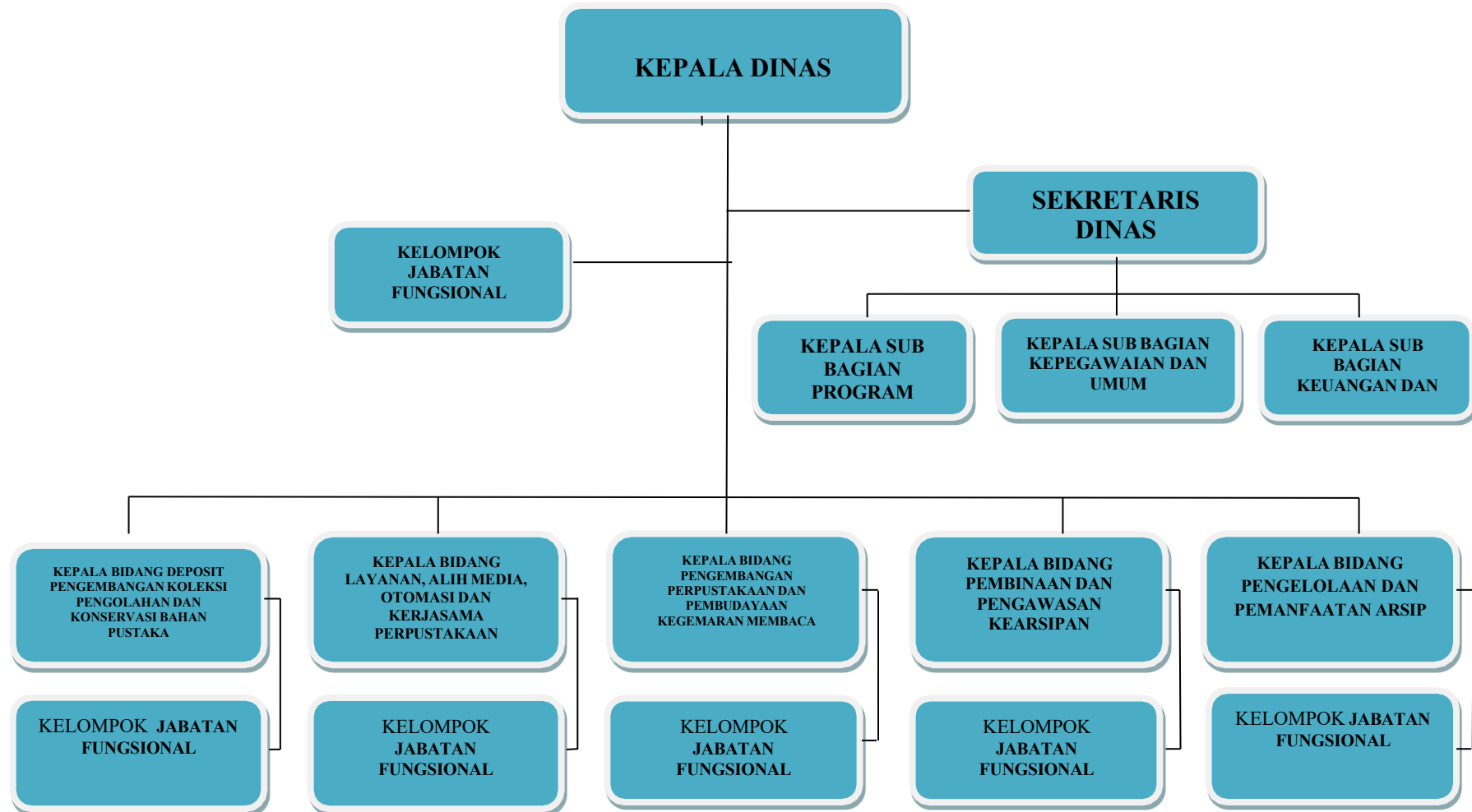
- f. penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pengelolaan dan Pemanfaatan Arsip.

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah provinsi sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan beban kerja. Rincian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembinaan administratif Kelompok Jabatan Fungsional, diselenggarakan oleh Sekretaris Dinas meliputi penilaian dan penetapan angka kredit, usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, serta pendidikan dan pelatihan. Hasil pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional disampaikan kepada Kepala Dinas, Kepala Bidang terkait, Sekretaris Dinas dan Kepala Sub Bagian terkait.

Susunan/struktur organisasi Dinas perpustakaan dan kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah pada Gambar di Bawah Ini :

Gambar 2.1 Struktur Dinas perpustakaan dan kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah



2.1.2 Sumber Daya Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah

a. Sumber Daya Manusia

Perubahan Nomenklatur dan Susunan Organisasi memberikan dampak Perubahan Komposisi dan jumlah pegawai di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah didukung oleh tenaga teknis perpustakaan dan pustakawan serta arsiparis dan tenaga pengelola kearsipan. Adapun jumlah pegawai yang bekerja pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebanyak 132 orang yang terdiri dari laki-laki 47 orang dan perempuan 85 orang, yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Jenis Kelamin

No	Uraian	Jenis Kelamin				Jumlah
		Laki - laki	%	Perempuan	%	
1	PNS	34	38 %	55	62 %	89
2	PPPK	13	30 %	30	70 %	43
Total		47	36 %	85	64 %	132

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Golongan Ruang dan Jenis Kelamin

No	Gol/RU	Jenis Kelamin				Jumlah
		Laki -laki	%	Perempuan	%	
1	I/a	0	0	0	0	0
2	I/b	0	0	0	0	0
3	I/c	0	0	0	0	0
4	I/d	0	0	0	0	0
5	II/a	2	100%		0%	2
6	II/b	2	67%	1	33%	3
7	II/c	6	86%	1	14%	7
8	II/d	1	100%	0	0%	1
9	III/a	5	83%	1	17%	6
10	III/b	2	20%	8	80%	10
11	III/c	6	30%	14	70%	20
12	III/d	4	21%	15	79%	19
13	IV/a	3	27%	8	73%	11
14	IV/b	3	43%	4	57%	7
15	IV/c	0	0%	3	100%	3
16	IV/d	0	0	0	0	0
17	IV/e	0	0	0	0	0
18	I	0	0	0	0	0

19	III	0	0	0	0	0
20	V	1	17%	5	83%	6
21	VII	2	50%	2	50%	4
22	IX	10	30%	23	70%	33
23	X					
TOTAL	47	36%	85	64%	132	

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin

No	Pendidikan	Laki-laki			Perempuan			Jumlah
		PNS	P3K	%	PNS	P3K	%	
1	SD	0	0	0	0	0	0	0
2	SMP	0	0	0	0	0	0	0
3	SMA / SMK	14	1	58%	6	5	42%	26
4	D1	0	0	0	0	0	0	0
5	D2	0	0	0	0	0	0	0
6	D3	2	2	50%	2	2	50%	8
7	S1 / D4	11	10	26%	37	23	74%	81
8	S2	7		41%	10		59%	17
9	S3	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		34	13	36%	55	30	64%	132

Tabel 2.4 Jumlah Pejabat Struktural Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah

No	Eselon	Formasi	Terisi	Lowong
1	I.b			
2	II.a	1	0	1
3	II.b	0	0	0
4	III.a	6	6	0
5	III.b	0	0	0
6	IV.a	3	3	0
7	IV.b	0	0	0
TOTAL		10	9	1

Tabel 2.5 Jumlah Pejabat Struktural Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Jenis Kelamin

No	Eselon	Formasi	Terisi	Lowong
1	I.b	0	0	0
2	II.a	0	0	0
3	II.b	0	0	0
4	III.a	2	4	6
5	III.b	0	0	0
6	IV.a	1	2	3
7	IV.b			
TOTAL		3	6	9

Tabel 2.6 Jumlah Pejabat Struktural Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Eselon			
		I	II	III	IV
1	SMA / SMK	0	0	0	0
2	D1 - D3	0	0	0	0
3	S1 / D4	0	0	4	2
4	S2	0	0	2	1
5	S3	0	0	0	0
TOTAL		0	0	6	3

Tabel 2.7 Jumlah Jenis Jabatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Struktural	3	6	9
2	Fungsional	12	29	41
3	Pelaksana	32	50	82
TOTAL		47	85	132

Tabel 2.8 Jumlah Pejabat Fungsional Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Jenjang Jabatan dan Jenis Kelamin

No	Nama Jabatan Fungsional	Jenjang Ahli dan Jenis Kelamin						Jumlah Ahli +Trampil
		Ahli		Jml	Terampil		Jml	
		L	P		L	P		
1	Pustakawan	3	15	18	0	2	2	20
2	Arsiparis	3	8	11	2	2	4	15
3	Analisis SDM Aparatur	1	1	2	0	0	0	2
4	Perencana	1	1	2	0	0	0	2
5	Pranata Komputer	2	0	2	0	0	0	2
Total		10	25	35	2	4	6	41

b. Asset dan Unit Usaha yang masih Operasional

Aset yang tersedia pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah :

- 1. Gedung dan bangunan terdiri dari :
 - a. Gedung Perpustakaan A seluas 994 M2
 - b. Gedung Perpustakaan B seluas 400 M2
 - c. Gedung Arsip seluas 750 M2
 - d. Gedung Kantin seluas 50 M2

2. Tanah :

- a. Sebidang Tanah dengan Ukuran : 7.865,-alamat: Jl. Banteng No.6, Kec. Palu Selatan, Kota Palu
- b. Sebidang Tanah dengan Ukuran : 1.863,-alamat : Jl. Karajalembah No.6, Kec. Palu Selatan, Kota Palu

3. Peralatan dan Mesin

- a. Alat angkut roda 4 (empat) : 12 Mobil
- b. Alat angkut roda 2 (dua) : 21 Motor
- c. Alat kantor rumah tangga : 2.559
- d. Alat studio dan komunikasi : 6 buah

4. Aset tetap lainnya

- a. Buku : 74.237 buah

Sedangkan sarana dan prasarana yang tersedia yang mendukung Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah

- 1. Akseibilitas kaum difable : 8 M2
- 2. Ruang baca anak : 150 M2
- 3. Ruang Simpan Buku Perpustakaan Keliling : 200 M2
- 4. Ruang Baca Remaja : 150 M2
- 5. Ruang Baca Dewasa : 100 M2
- 6. Ruang Kepala Bidang : 75 M2
- 7. Ruang Refrensi : 190 M2
- 8. Ruang Baca koran/Majalah/Terbitan Berkala : 150 M2
- 9. Aula : 300 M2
- 10. Ruang Rapat : 100 M2
- 11. Lahan Parkir : 400 M2

Aplikasi yang mendukung kegiatan dalam menjalankan tugas, fungsi dan tata kerja Perpustakaan dan kearsipan:

- a) Aplikasi Sistem katalog on-line : 1 Unit

b) Wifi Area : 1 Unit

c) Genset : 1 unit

Peralatan kendaraan terdiri :

1. Server : 3 Unit
2. Komputer : 116 Unit
3. Laptop : 42 Unit
4. Infocus : 6 Unit
5. Mobil Perpustakaan Keliling : 4 Unit

Sarana Prasarana Kearsipan terdiri dari :

1. Ruang Layanan Pengguna Arsip : 100 M2
2. Ruang Records Centre Dispusaka : 100 M2
3. Ruang Sekretariat Arsiparis Indonesia Wilayah Sulawesi Tengah : 50 M2
4. Arsip Inaktif keuangan Rutin dan Kepegawaian:150 M2

Peralatan Kendaraan terdiri dari :

1. Rak Besi : 148 Unit
2. Komputer : 116 Unit
3. Filling Kabinet : 72 Unit
4. Lemari Arsip Peta/Gambar : 6 Unit
5. Lemari Arsip Vital : 6 Unit
6. Alat pemadam api tabung : 3 Unit
7. Mesin absen digital : 2 Unit
8. CCTV : 5 Unit

c. Pendayagunaan Layanan Perpustakaan dan Kearsipan

Produk jasa layanan perpustakaan yang ditawarkan oleh Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah untuk masyarakat Kalimantan Timur terdiri dari produk jasa layanan. Secara garis besar layanan yang diberikan dikelompokkan sebagai berikut :

1. Layanan Sirkulasi

Layanan yang diberikan dalam bentuk jasa peminjaman dan pengembalian buku-buku umum maupun koleksi sekolah.

2. Layanan Referensi

Layanan yang menyediakan koleksi rujukan berupa buku-buku referensi seperti; kamus, ensiklopedia, biografi, direktori handbook dan lain-lain.

3. Layanan Perpustakaan Digital

Layanan yang menyediakan jasa akses internet, layanan koleksi digital edutainment dalam format VCD/DVD.

4. Layanan Wisata Perpustakaan

Layanan yang diberikan kepada pengunjung atau anggota perpustakaan khususnya anak-anak TK atau SD secara berkelompok untuk mendengarkan cerita/dongeng dan pemutaran film edukas.

5. Layanan Perpustakaan Keliling

Layanan peminjaman bahan pustaka umum maupun sekolah dengan menggunakan armada mobil Perpustakaan keliling yang diperuntukkan bagi masyarakat yang secara geografis dan sosial tidak terlayani oleh perpustakaan permanent

6. Layanan Informasi Koleksi Terbaru

Layanan yang menyediakan informasi tentang koleksi terbaru yang akan dilayankan pada masyarakat. Layanan ini dilaksanakan dalam bentuk display buku-buku baru pada ruang lobby utama Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah

7. Bimbingan Pemakai.

Layanan yang diberikan dalam bentuk memberikan arahan pemakai dalam mendayagunakan sumber daya informasi yang tersedia di perpustakaan.

8. Jasa Kearsipan dan Konsultasi Kearsipan

Layanan yang diberikan berupa konsultasi untuk membantu menyelesaikan permasalahan kearsipan, sejak dari tata persuratan, pengurusan surat, pengelolaan arsip aktif, penanganan arsip inaktif sampai dengan penyusutan arsip/dokumen (termasuk penyusunan JRA

9. Pembuatan Sistem Kearsipan

Layanan perancangan Sistem kearsipan yang dirancang dan dibuat sesuai dengan kondisi dan keinginan instansi masing-masing, sehingga akan membantu di dalam kelancaran kegiatan administrasi, karena sistem tersebut meliputi sejak arsip diciptakan, digunakan sampai dengan disusutkan.

10. Penyempurnaan Sistem Kearsipan

Layanan yang dipergunakan untuk menyempurnakan sistem yang telah ada dengan memperhatikan kaidah-kaidah kearsipan sehingga merupakan sistem yang aplikatif

11. Pembuatan SOP Kearsipan

Memberikan layanan pembuatan SOP kearsipan OPD, Badan Usaha dan Organisasi Pendidikan, Kemasyarakatan dan Politik.

12. Otomasi Kearsipan

Layanan penggunaan sarana elektronik guna mendukung pengelolaan arsip/dokumen agar informasinya dapat diakses dengan lebih cepat.

13. Pembenahan/ Penataan Arsip/ Dokumen

Layanan untuk membantu merekonstruksi/menata ulang dan melaksanakan pembenahan/penataan arsip/dokumen kacau secara tepat dan benar baik fisik maupun informasinya. Hasil dari pembenahan arsip/dokumen adalah tertatanya fisik dan informasi berupa daftar sebagai jalan masuk untuk penemuan kembali arsip/dokumen yang dapat dibuat secara manual maupun elektronik.

14. Penyimpanan Arsip/ Dokumen

Jasa layanan penyimpanan sekaligus layanan pemakaian arsip/dokumen, pengiriman boks dan pengambilan arsip/dokumen. Ruang penyimpanan dirancang dengan spesifikasi ruang tahan api dan menggunakan AC selama 24 jam untuk Magnetic Tape, Catridge, CD-Rom, Disket, Mikrofilm, Microfiche dan Arsip Vital;

15. Perawatan Arsip/Dokumen

Layanan jasa perawatan arsip/dokumen meliputi perawatan arsip /dokumen, fumigasi, laminasi arsip/dokumen tekstual/kertas yang telah rusak/rapuh, dan penjilidan arsip/dokumen serta pengujian arsip konvensional;

16. Reproduksi Arsip/ Dokumen

Layanan pengerjaan reproduksi arsip/dokumen dari berbagai ukuran dan jenis yang dibutuhkan, baik arsip tekstual maupun media baru.

17. Alih Media Arsip/ Dokumen

layanann alih media arsip/dokumen dari media konvensional ke media digital.

18. Pemeliharaan dan Perawatan Pusat Arsip/ Dokumen

Bagi organisasi pemerintah maupun swasta yang sudah memiliki pusat arsip/dokumen sendiri, pada Bagian Layanan Kearsipan memberikan layanan jasa dalam pemeliharaan dan perawatan pusat arsip/dokumen.

19. Layanan Wisata Arsip

Memperkenalkan tentang informasi seputar dunia kearsipan serta pengenalan seputar sejarah di Provinsi Sulawesi Tengah dan di NKRI, baik melalui pemutaran film sejarah dan informasi tentang kearsipan serta kunjungan pada Galery atau ruang pameran arsip. Diperuntukkan untuk masyarakat umum, Dunia Pendidikan, OPD dan Organisasi.

20. Layanan Pengadaan Peralatan/ Sarana Kearsipan

Menyediakan peralatan/sarana kearsipan baik untuk arsip tekstual maupun arsip media baru, seperti : Boks arsip, rak arsip, folder, guide, microfiche dll.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah

a. Kinerja Pelayanan Urusan Perpustakaan

Salah satu tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah yang telah dilaksanakan pada Renstra periode sebelumnya yaitu Tahun 2026 - 2029 adalah memberikan pelayanan jasa perpustakaan kepada masyarakat melalui penyediaan koleksi bahan pustaka sehingga masyarakat dapat memperoleh berbagai informasi yang dibutuhkan guna peningkatan Kualitas Ilmu Pengetahuan dan ketrampilan dalam melaksanakan aktivitas kehidupannya. Ada beberapa layanan jasa perpustakaan yang diberikan kepada masyarakat antara lain layanan menetap yaitu layanan penyediaan bahan pustaka dan informasi, selanjutnya dalam rangka perluasan jangkauan layanan perpustakaan guna pemerataan kesempatan memperoleh informasi kepada masyarakat, maka telah dilakukan operasional perpustakaan keliling di 13 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Donggala, Kabupaten Poso, Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Banggai, Kabupaten Tojo Una-Una, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, Kabupaten Sigi dan Kota Palu melalui mobil unit perpustakaan keliling. Kabupaten Morowali selain adanya Mobil Perpustakaan Keliling juga dilayani dengan Kapal Perpustakaan Keliling KM Pustaka. Sedangkan untuk Kabupaten Morowali Utara dan Kabupaten Banggai Laut belum mendapatkan bantuan mobil perpustakaan keliling sehingga masih di lakukan layanan langsung dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah. Kemudian ada pula Layanan Terpusat Perpustakaan Sekolah (LTPS) pada 58 Sekolah (SD/SMP/SMA/SMK) dan Layanan Bulk Loan System (Sistem Layanan Kotak/Paket) pada 35 Sentra yang ada di 8 Kabupaten/Kota yaitu Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Tolitoli dan Kabupaten Banggai Kepulauan.

Guna mendayagunakan semua jenis perpustakaan telah dilaksanakan pula pembinaan perpustakaan umum kabupaten/kota, perpustakaan umum kecamatan dan perpustakaan desa/kelurahan, perpustakaan sekolah perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan dinas/instansi dan perpustakaan rumah ibadah. Selain itu dalam rangka pelestarian bahan pustaka dilakukan reprografi melalui kegiatan fumigasi dan perbaikan bahan pustaka serta melakukan penelusuran melalui kegiatan hunting koleksi terbitan Sulawesi Tengah atau terbitan tentang Daerah Sulawesi Tengah sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Wajib Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, penerimaan dan pengelolaan koleksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengembangan sumber daya manusia di bidang perpustakaan telah dilakukan pula melalui orientansi perpustakaan, diklat penyetaraan perpustakaan, diklat teknis pengelolaan perpustakaan, magang perpustakaan melalui kerjasama dengan Universitas Terbuka UPBJ Palu, pembinaan dan pengembangan pustakawan yang berdampak pada peningkatan layanan kepada masyarakat pemakai. Dengan peningkatan layanan perpustakaan dan informasi, diharapkan masyarakat akan lebih banyak menggunakan perpustakaan sebagai sumber informasi, belajar dan penelitian maupun jasa rujukan. Sedangkan untuk meningkatkan minat dan kebiasaan membaca masyarakat telah dilaksanakan berbagai kegiatan lomba minat baca, yang dikemas dalam berbagai kegiatan yang diikuti oleh semua jenjang pendidikan mulai anak TK/PAUD, SD/MI, SMP/M.Ts, SMU/SMK/MA/MAK dan masyarakat umum, pemilihan pustakawan berprestasi, seleksi perpustakaan terbaik dan seleksi lomba perpustakaan desa/kelurahan tingkat Provinsi Sulawesi Tengah.

Karakteristik jenis perpustakaan umum yang melekat pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah adalah contents koleksi dan masyarakat yang mendayagunakan koleksi yang ada bersifat majemuk dan

heterogen. Dengan kata lain orientasi layanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah diarahkan pada semua segmen masyarakat sehingga orientasi koleksi bahan pustaka yang disediakan juga diarahkan pada semua cakupan subyek /disiplin ilmu yang dibutuhkan oleh semua kelompok pengguna.

Berdasarkan statistik pendayagunaan layanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah, maka pemustaka (pengguna) dapat dikategorikan sebagai berikut :

- 1. Anak-anak pra sekolah (Play Group dan TK)
- 2. Pelajar (Tingkat SD s/d SLTA)
- 3. Mahasiswa
- 4. Pegawai Negeri/Swasta
- 5. Umum (Ibu Rumah Tangga)
- 6. Guru dan Dosen

Adapun data pendayagunaan layanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (2026 - 2029) dideskripsikan melalui tabel berikut

Tabel 2.9 Data Pengunjung Berdasarkan Segmen Masyarakat Pengguna Periode Tahun 2021 s/d 2025

No	Segmen	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Umum	3,616	4,188	2,264	1,931	1,383
2	Pegawai	1,001	995	594	378	
3	Dosen/ Guru	964	1,417	345	371	
4	Mahasiswa	6,780	8,013	3,919	3,537	1,485
5	SLTA	1,076	2,886	1,598	1,445	7,694
6	SLTP	969	3,124	1,383	1,106	
7	SD/ TK	5,190	10,910	10,936	14,722	
Jumlah		19,596	31,533	21,039	23,490	10,562

b. Kinerja Pelayanan Urusan Kearsipan

Adapun jenis pelayanan di bidang kearsipan yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah yaitu layanan peminjaman arsip dan penerbitan naskah sumber arsip serta layanan jasa

kearsipan. Layanan arsip dan penerbitan naskah sumber arsip adalah bentuk pemberian layanan peminjaman fisik maupun informasi arsip bagi para pengguna arsip sedangkan layanan jasa kearsipan adalah bentuk layanan yang diberikan bersifat teknis seperti layanan jasa pembenahan arsip, layanan jasa penyimpanan arsip, layanan jasa alih media arsip dan layanan jasa lainnya dibidang kearsipan.

Arsip adalah bukti kinerja organisasi yang merupakan bahan pertanggung jawaban yang autentik dan terpercaya, maka Dinas Perpustakaan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah juga memberikan akses arsip kepublik untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan maupun untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Melaksanakan pendataan dan pengumpulan kearsipan pemerintah daerah kabupaten/kota maupun di luar Provinsi Sulawesi Tengah terutama pada Arsip Nasional Republik Indonesia (ANR) dan lembaga lainnya, Pembinaan dan apresiasi kearsipan serta penyuluhan/sosialisasi bagi pelajar dan mahasiswa tentang pengelolaan arsip serta sosialisasi sadar arsip melalui layanan arsip keliling. Kemudian disadari bahwa arsip adalah memori kolektif dan jati diri daerah, maka perlu adanya pelestarian melalui restorasi, reprografi dan fumigasi arsip serta melakukan penilaian dan Penjadwalan Retensi Arsip (JRA) dan penyusutan arsip melalui pemusnahan.

Arsip sebagai identitas dan jati diri bangsa, serta sebagai memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus dikelola dan diselamatkan. Untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, serta mendinamiskan sistem kearsipan, diperlukan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan. Dalam menghadapi tantangan globalisasi dan mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih, serta peningkatan kualitas pelayanan publik, penyelenggaraan kearsipan baik di lingkungan lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan harus dilakukan dalam suatu sistem

penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif dan terpadu. Untuk mensukseskan gerakan sadar arsip yang sudah dicanangkan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah telah melakukan pembinaan kepada perangkat daerah provinsi maupun LKD kabupaten/kota dalam hal kearsipan, adapun yang sudah dibina meliputi :

Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah :

- a. Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
- b. DPRD Provinsi Sulawesi Tengah
- c. Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah
- d. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
- e. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sulawesi Tengah
- f. Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
- g. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah
- h. Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah
- i. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
- j. Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Tengah
- k. Dinas Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah
- l. Dinas Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah
- m. Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah

LKD kabupaten/kota:

- a. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palu
- b. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Donggala
- c. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sigi
- d. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Parigi Moutong
- e. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Toli Toli
- f. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Buol
- g. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Poso
- h. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Morowali Utara

- i. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Morowali
- j. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Touna
- k. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banggai
- l. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banggai Laut
- m. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banggai Kepulauan

Tabel 2.10 Data Arsip Hasil Akuisisi

OPD / Organisasi/ BUMN.BUMD	Jumlah Box	Jumlah (berkas)	Kategori Arsip	Tahun akuisisi	Kegiatan	Ket
Biro Umum	28	1203	statis	akuisisi tahun 2016		
Arsip Foto		247	statis	akuisisi tahun 2016		
Sub Bagian Umum Dispusarda	2	51	statis	akuisisi tahun 2016		
Arsip Foto		21	statis	akuisisi tahun 2017		
Arip Tekstual		6	statis	akuisisi tahun 2017		
Peta		9	statis	akuisisi tahun 2018		
Kumpulan SK Gubernur		6	statis	akuisisi tahun 2018		
Biro Pemerintahan	5	68	statis	akuisisi tahun 2018	Perlindungan & penyelamatan arsip	Likui dasi
Dinas Sosial	22	714	statis	akuisisi tahun 2018	Penyusutan	
BPKAD (eks biro Keuangan)	13	136	statis	akuisisi tahun 2018	Penyusutan	
Biro Ekonomi	11	424	statis	akuisisi tahun 2018	Penyusutan	

Secara umum pengertian Pengelolaan Arsip adalah keseluruhan proses pengaturan dan pengendalian arsip dinamis dan arsip statis. Adapun Pengelolaan arsip yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah adalah pengelolaan arsip dinamis inaktif perangkat daerah dengan retensi sekurang-kurangnya 10 tahun dan pengelolaan arsip statis.

Sedangkan pada sektor pemeliharaan dan pelestarian arsip preservasi arsip statis (pemeliharaan dan pelestarian) dilakukan untuk menghadapi masalah yang

serius karena kerusakan yang disebabkan oleh berbagai factor perusak. Sumber kerusakan arsip statis dapat berasal dari faktor internal dan eksternal. Faktor perusak internal dapat disebabkan oleh penyusun bahan dasar arsip itu sendiri diantaranya penggunaan bahan–bahan yang berbahaya dalam proses pembuatan bahan dasar arsip (misal lignin dan alum rosin), dan penggunaan tinta yang bersifat asam. Faktor perusak eksternal dapat disebabkan oleh lingkungan tempat arsip statis disimpan seperti suhu dan kelembaban yang tidak stabil, sinar ultraviolet, dan polusi udara, hama perusak arsip statis seperti jamur/kapang, serangga, dan binatang pengerat, serta factor manusia seperti ketidakpedulian ketika menangani arsip dan pencurian. Oleh karena itu dalam rangka menjamin keselamatan dan kelestarian arsip statis pada lembaga kearsipan dari berbagai factor perusak arsip, baik yang bersumber dari faktor internal dan eksternal diperlukan suatu tindakan preservasi arsip statis (preventif dan kuratif) yang sesuai dengan kaidah, standar preservasi arsip statis, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Preservasi adalah keseluruhan proses dan kerja dalam rangka perlindungan arsip terhadap kerusakan arsip atau unsur perusak dan restorasi/perbaikan bagian arsip yang rusak. Preservasi ditinjau dari tindakannya terdiri atas preservasi preventif dan preservasi kuratif. Preservasi preventif (pemeliharaan) adalah preservasi yang bersifat pencegahan terhadap kerusakan arsip, melalui penyediaan prasarana dan sarana, perlindungan arsip, serta metode pemeliharaan arsip.

Preservasi kuratif (Pelestarian) adalah preservasi yang bersifat perbaikan/perawatan terhadap arsip yang mulai/sudah rusak atau kondisinya memburuk, sehingga dapat memperpanjang usia arsip.

Tabel 2.11 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perpustakaan				73	75	77	80	85	72	75	76	78	84	0.99	1.00	0.99	0.98	0.99
2	Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Jumlah Pengunjung Perpustakaan per tahun				7,822	8,665	10,377	12,089	13,801	7,783	8,435	10,122	11,985	13,671	1.00	0.97	0.98	0.99	0.99
3	Koleksi Buku Yang Tersedia di Perpustakaan Daerah				43,675	45,873	52,492	59,112	65,732	42,775	44,985	51,934	58,792	63,799	0.98	0.98	0.99	0.99	0.97
4	Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk				0.15	0.17	0.18	0.19	0.20	0.15	0.17	0.18	0.19	0.20	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
5	Jumlah Rata-rata Pengunjung Perpustakaan /tahun				682	722	865	1,007	1,150	634	709	798	982	1,058	0.93	0.98	0.92	0.98	0.92
6	Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan				2,334	2,500	2,654	2,808	2,962	2,317	2,389	2,557	2,742	2,899	0.99	0.96	0.96	0.98	0.98
7	Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat				28	29	29	30	30	28	29	29	30	30	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
8	Pemenuhan Koleksi Ke khasan Daerah Tingkat Provinsi				0	0	600	1,000	1,400	0	0	588	972	1,345	-	-	0.98	0.97	0.96
9	Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca di Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat				125	152	525	525	525	120	142	505	512	520	0.96	0.93	0.96	0.98	0.99
10	Jumlah Perpustakaan Yang Melaksanakan Kegiatan Berbasis Inklusi Sosial				7	8	9	10	12	7	7	9	10	11	1.00	0.88	1.00	1.00	0.92
11	Terlaksananya Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial				13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
12	Jumlah Para Pengelola Perpustakaan dan Pustakaaan				85	102	142	162	177	82	97	138	158	163	0.96	0.95	0.97	0.98	0.92
13	Jumlah Perpustakaan Sekolah Yang Mendapatkan Akreditasi				6	6	9	19	18	6	6	9	19	18	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
14	Terlaksananya Kegiatan Gemar Membaca				13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
15	Pemenuhan Koleksi Nasional dan Naskah Kuno				385	452	860	1,313	1,766	380	450	845	1,305	1,745	0.99	1.00	0.98	0.99	0.99
16	Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku (Pengelolaan Arsip Secara Baku)				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
17	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan				8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Tabel 2.12 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah

No	Kode	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Anggaran Pada Tahun ke -				Realisasi Pada Tahun ke -				Rasio Antara Anggaran dan Realisasi Tahun ke -				Rata-rata Pertumbuhan	
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
TOTAL KESELURUHAN			19,020,756,598.00	20,188,867,824.00	22,535,240,311.00	26,803,512,512.23	17,372,349,578.00	18,593,234,305.00	20,254,724,648.00	23,457,910,451.87	0.91	0.92	0.90	0.88	2,594,251,971.41	2,028,520,291.29
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			18,152,543,898.00	19,023,283,701.00	20,716,063,945.00	25,712,374,364.23	16,557,066,254.00	17,495,744,091.00	18,492,080,874.00	22,430,734,563.87	0.91	0.92	0.89	0.87	2,519,943,488.74	1,957,889,436.62
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			16,962,616,577.00	17,017,453,231.00	17,392,160,926.00	22,983,962,202.23	15,399,464,386.00	15,582,412,449.00	15,217,597,085.00	19,760,604,484.87	0.91	0.92	0.87	0.86	2,007,115,208.41	1,453,713,366.29
	2.23.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	123,740,000.00	320,327,000.00	666,813,750.00	403,501,150.00	119,040,400.00	319,977,460.00	661,711,656.00	391,400,688.00	0.96	1.00	0.99	0.97	93,253,716.67	90,786,762.67
	2.23.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3,000,000.00	24,722,750.00	353,805,850.00		3,000,000.00	24,722,750.00	342,067,938.00	-	1.00	1.00	0.97	117,935,283.33	114,022,646.00
	2.23.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		4,650,000.00	7,620,000.00	17,565,950.00		4,650,000.00	7,620,000.00	17,556,350.00	-	1.00	1.00	1.00	5,855,316.67	5,852,116.67
	2.23.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		4,020,000.00	10,280,000.00	15,915,350.00		4,020,000.00	10,280,000.00	15,779,150.00	-	1.00	1.00	0.99	5,305,116.67	5,259,716.67
	2.23.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		258,862,000.00	309,581,000.00	5,064,500.00		258,797,460.00	306,268,902.00	5,056,100.00	-	1.00	0.99	1.00	1,688,166.67	1,685,366.67
	2.23.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		49,795,000.00	314,610,000.00	11,149,500.00		49,510,000.00	312,820,004.00	10,941,150.00	-	0.99	0.99	0.98	3,716,500.00	3,647,050.00
	2.23.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14,491,761,951.00	14,372,781,262.00	14,589,405,086.00	12,734,219,765.23	13,037,563,803.00	12,969,031,753.00	12,428,701,774.00	10,435,039,917.00	0.90	0.90	0.85	0.82	-585,847,395.26	-867,507,962.00
	2.23.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		12,958,471,262.00	12,754,061,186.00	12,518,599,765.23		11,563,544,753.00	10,617,214,775.00	10,225,419,917.00	-	0.89	0.83	0.82	4,172,866,588.41	3,408,473,305.67
	2.23.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1,414,310,000.00	1,401,144,000.00	0.00		1,405,487,000.00	1,394,837,999.00	0.00	-				0.00	0.00
	2.23.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			113,679,900.00	10,000,000.00			104,079,000.00	10,000,000.00	-	-	0.92	1.00	3,333,333.33	3,333,333.33
	2.23.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			320,520,000.00	205,620,000.00			312,570,000.00	199,620,000.00	-	-	0.98	0.97	68,540,000.00	66,540,000.00
	2.23.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	0.00	0.00	0.00	215,859,750.00	0.00	0.00	0.00	209,887,050.00	-	-	-	0.97	71,953,250.00	69,962,350.00
	2.23.01.1.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				50,100,000.00				46,027,120.00	-	-	-	0.92	16,700,000.00	15,342,373.33
	2.23.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				17,869,750.00				17,869,750.00	-	-	-	1.00	5,956,583.33	5,956,583.33
	2.23.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				147,890,000.00				145,990,180.00	-	-	-	0.99	49,296,666.67	48,663,393.33
	2.23.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	39,500,000.00	13,500,000.00	42,920,000.00	34,745,000.00	39,500,000.00	9,112,800.00	42,920,000.00	34,745,000.00	1.00	0.68	1.00	1.00	-1,585,000.00	-1,585,000.00
	2.23.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													0.00	0.00
	2.23.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		13,500,000.00	42,920,000.00	34,745,000.00		9,112,800.00	42,920,000.00	34,745,000.00	-	0.68	1.00	1.00	11,581,666.67	11,581,666.67
	2.23.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	403,189,580.00	797,809,043.00	713,868,984.00	706,034,310.00	371,253,055.00	780,871,253.00	706,808,541.00	692,714,252.00	0.92	0.98	0.99	0.98	100,948,243.33	107,153,732.33
	2.23.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		123,327,029.00	174,733,600.00	185,459,360.00		123,327,029.00	174,510,850.00	185,459,360.00	-	1.00	1.00	1.00	61,819,786.67	61,819,786.67
	2.23.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		31,117,614.00	35,357,134.00	48,033,900.00		31,117,614.00	34,862,726.00	48,033,900.00	-	1.00	0.99	1.00	16,011,300.00	16,011,300.00
	2.23.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		24,631,500.00	28,926,250.00	26,345,000.00		24,627,500.00	28,925,461.00	26,076,250.00	-	1.00	1.00	0.99	8,781,666.67	8,692,083.33
	2.23.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		618,732,900.00	474,852,000.00	446,196,050.00		601,799,110.00	468,509,504.00	433,144,742.00	-	0.97	0.99	0.97	148,732,016.67	144,381,580.67

	2.23.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		92,516,780.00	198,601,806.00	1,283,525,590.00	0.00	92,445,875.00	198,588,434.00	1,274,830,000.00	-	1.00	1.00	0.99	427,841,863.33	424,943,333.33
	2.23.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		92,516,780.00	198,601,806.00	1,283,525,590.00		92,445,875.00	198,588,434.00	1,274,830,000.00	-	1.00	1.00	0.99	427,841,863.33	424,943,333.33
	2.23.01.1.08	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	612,124,966.00	573,747,646.00	479,775,800.00	2,097,408,170.00	547,914,583.00	565,938,194.00	478,872,754.00	2,080,644,677.00	0.90	0.99	1.00	0.99	495,094,401.33	510,910,031.33
	2.23.01.1.08.02	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		509,817,646.00	434,710,800.00	445,869,840.00		503,338,194.00	434,407,754.00	438,691,985.00	-	0.99	1.00	0.98	148,623,280.00	146,230,661.67
	2.23.01.1.08.04	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor		63,930,000.00	45,065,000.00	1,651,538,330.00		62,600,000.00	44,465,000.00	1,641,952,692.00	-	0.98	0.99	0.99	550,512,776.67	547,317,564.00
	2.23.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1,292,300,080.00	846,771,500.00	700,775,500.00	5,508,668,467.00	1,284,192,545.00	845,035,114.00	699,993,926.00	4,641,342,900.87	0.99	1.00	1.00	0.84	1,405,456,129.00	1,119,050,118.62
	2.23.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		265,200,000.00		142,800,000.00		265,200,000.00		142,800,000.00	-	1.00	-	1.00	47,600,000.00	47,600,000.00
		Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor			131,400,000.00				131,400,000.00		-	-	1.00	-	0.00	0.00
	2.23.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		140,470,000.00	211,930,000.00	125,550,000.00		139,379,714.00	211,257,766.00	124,241,735.00	-	0.99	1.00	0.99	41,850,000.00	41,413,911.67
	2.23.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				70,760,000.00				70,760,000.00	-	-	-	1.00	23,586,666.67	23,586,666.67
	2.23.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		351,101,500.00	287,445,500.00	5,071,772,059.00		350,455,400.00	287,336,160.00	4,205,754,757.87	-	1.00	1.00	0.83	1,690,590,686.33	1,401,918,252.62
	2.23.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya		90,000,000.00	70,000,000.00	97,786,408.00		90,000,000.00	70,000,000.00	97,786,408.00	-	1.00	1.00	1.00	32,595,469.33	32,595,469.33
															0.00	0.00
	Program Pembinaan Perpustakaan		876,145,375.00	1,834,807,475.00	2,855,910,450.00	2,274,236,288.00	849,221,822.00	1,753,732,047.00	2,809,675,353.00	2,225,594,599.00	0.97	0.96	0.98	0.98	466,030,304.33	458,790,925.67
	2.23.02.1.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	574,919,625.00	876,208,600.00	1,206,955,850.00	1,025,225,088.00	567,121,446.00	809,258,320.00	1,172,671,754.00	1,009,423,037.00	0.99	0.92	0.97	0.98	150,101,821.00	147,433,863.67
	2.23.02.1.01.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi		27,337,000.00	390,527,200.00	57,084,300.00		21,362,600.00	384,835,702.00	54,189,040.00	-	0.78	0.99	0.95	19,028,100.00	18,063,013.33
	2.23.02.1.01.04	Pembinaan Perpustakaan Pada satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan		120,874,750.00	231,213,250.00	191,601,710.00		120,134,750.00	230,763,250.00	188,251,710.00	-	0.99	1.00	0.98	63,867,236.67	62,750,570.00
	2.23.02.1.01.05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Provinsi		148,722,000.00	8,640,000.00	3,143,410.00		126,492,000.00	8,640,000.00	3,143,410.00	-	0.85	1.00	1.00	1,047,803.33	1,047,803.33
	2.23.02.1.01.06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi		196,768,500.00	288,634,000.00	153,260,300.00		173,948,960.00	267,743,742.00	150,788,557.00	-	0.88	0.93	0.98	51,086,766.67	50,262,852.33
	2.23.02.1.01.07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		275,795,500.00	145,134,000.00	339,535,080.00		269,715,500.00	138,702,000.00	334,305,960.00	-	0.98	0.96	0.98	113,178,360.00	111,435,320.00
	2.23.02.1.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka		15,120,000.00				9,310,000.00			-	0.62	-	-	0.00	0.00
	2.23.02.1.01.10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi		40,060,850.00	77,512,400.00			38,597,250.00	77,432,400.00		-	0.96	1.00	-	0.00	0.00
	2.23.02.1.01.15	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik		51,530,000.00	65,295,000.00	215,875,088.00		49,697,260.00	64,554,660.00	214,041,660.00	-	0.96	0.99	0.99	71,958,362.67	71,347,220.00
	2.23.02.1.01.16	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan				64,725,200.00				64,702,700.00	-	-	-	1.00	21,575,066.67	21,567,566.67

	2.23.02.1.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	301,225,750.00	958,598,875.00	1,648,954,600.00	1,249,011,200.00	282,100,376.00	944,473,727.00	1,637,003,599.00	1,216,171,562.00	0.94	0.99	0.99	0.97	315,928,483.33	311,357,062.00
	2.23.02.1.02.01	Sosialisasi Budaya Baca Dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat		400,299,250.00	418,854,800.00	332,253,150.00		394,086,260.00	412,660,160.00	315,914,235.00	-	0.98	0.99	0.95	110,751,050.00	105,304,745.00
	2.23.02.1.02.03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar membaca		109,902,000.00	29,009,500.00	70,997,600.00		106,935,280.00	29,009,500.00	65,963,980.00	-	0.97	1.00	0.93	23,665,866.67	21,987,993.33
	2.23.02.1.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial		182,146,475.00	519,949,000.00	320,949,200.00		181,377,619.00	517,349,863.00	315,156,740.00	-	1.00	1.00	0.98	106,983,066.67	105,052,246.67
	2.23.02.1.02.06	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Provinsi		266,251,150.00	681,141,300.00	524,811,250.00		262,074,568.00	677,984,076.00	519,136,607.00	-	0.98	1.00	0.99	174,937,083.33	173,045,535.67
															0.00	0.00
	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno		313,781,946.00	171,022,995.00	467,992,569.00	454,175,874.00	308,380,046.00	159,599,595.00	464,808,436.00	444,535,480.00	0.98	0.93	0.99	0.98	46,797,976.00	45,385,144.67
	2.23.03.1.01	Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	13,600,000.00	36,974,800.00	90,000,000.00	135,939,700.00	13,510,000.00	36,974,800.00	88,676,600.00	130,720,146.00	0.99	1.00	0.99	0.96	40,779,900.00	39,070,048.67
	2.23.03.1.01.01	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam		36,974,800.00	90,000,000.00	135,939,700.00		36,974,800.00	88,676,600.00	130,720,146.00	-	1.00	0.99	0.96	45,313,233.33	43,573,382.00
	2.23.03.1.02	Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah	66,970,000.00				61,958,100.00				0.93	-	-	-	-22,323,333.33	-20,652,700.00
	2.23.03.1.03	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	160,881,946.00	96,910,695.00	130,046,000.00	120,499,003.00	160,881,946.00	86,787,295.00	128,812,592.00	116,770,163.00	1.00	0.90	0.99	0.97	-13,460,981.00	-14,703,927.67
	2.23.03.1.03.01	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian dan Pendaftaran Naskah Kuno		52,800,695.00	86,016,000.00	120,499,003.00		52,800,295.00	84,782,592.00	116,770,163.00	-	1.00	0.99	0.97	40,166,334.33	38,923,387.67
	2.23.03.1.03.02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan		44,110,000.00	44,030,000.00			33,987,000.00	44,030,000.00		-	0.77	1.00	-	0.00	0.00
	2.23.03.1.04	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	72,330,000.00	37,137,500.00	247,946,569.00	197,737,171.00	72,030,000.00	35,837,500.00	247,319,244.00	197,045,171.00	1.00	0.96	1.00	1.00	41,802,390.33	41,671,723.67
	2.23.03.1.04.01	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara		20,220,000.00				19,820,000.00			-	0.98	-	-	0.00	0.00
	2.23.03.1.04.02	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara		16,917,500.00	247,946,569.00	197,737,171.00		16,017,500.00	247,319,244.00	197,045,171.00	-	0.95	1.00	1.00	65,912,390.33	65,681,723.67
															0.00	0.00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN		868,212,700.00	1,165,584,123.00	1,819,176,366.00	1,091,138,148.00	815,283,324.00	1,097,490,214.00	1,762,643,774.00	1,027,175,888.00	0.94	0.94	0.97	0.94	74,308,482.67	70,630,854.67
	Pogram Pengelolaan Arsip		736,373,250.00	1,050,443,873.00	1,628,559,716.00	940,951,400.00	691,681,624.00	991,388,264.00	1,595,156,954.00	894,443,820.00	0.94	0.94	0.98	0.95	68,192,716.67	67,587,398.67
	2.24.02.1.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	531,138,150.00	452,246,600.00	390,713,900.00	642,481,100.00	508,392,524.00	429,057,900.00	384,497,760.00	606,503,720.00	0.96	0.95	0.98	0.94	37,114,316.67	32,703,732.00
	2.24.02.1.01.01	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi				175,949,100.00				174,819,100.00	-	-	-	0.99	58,649,700.00	58,273,033.33
		Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis		168,911,200.00	51,569,200.00			161,522,860.00	51,474,050.00		-	0.96	1.00	-	0.00	0.00
	2.24.02.1.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis		10,437,000.00	24,870,000.00			7,527,600.00	24,870,000.00		-	0.72	1.00	-	0.00	0.00
	2.24.02.1.01.03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi		272,898,400.00	314,274,700.00			260,007,440.00	308,153,710.00		-	0.95	0.98	-	0.00	0.00
	2.24.02.1.01.0005	Pelaksanaan Alih Media Arsip Dinamis dan Autentikasi				250,467,900.00				227,871,660.00	-	-	-	0.91	83,489,300.00	#VALUE!
	2.24.02.1.01.0006	Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis				216,064,100.00				203,812,960.00	-	-	-	0.94	72,021,366.67	67,937,653.33

	2.24.02.1.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	188,615,100.00	221,709,000.00	80,901,000.00	36,624,000.00	168,199,100.00	200,038,463.00	76,462,600.00	31,133,800.00	0.89	0.90	0.95	0.85	-50,663,700.00	-45,688,433.33
	2.24.02.1.02.01	Pengumpulan dan Penyampaian salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI		32,677,500.00	19,026,000.00	19,400,000.00		30,857,500.00	16,017,060.00	14,256,000.00	-	0.94	0.84	0.73	6,466,666.67	4,752,000.00
	2.24.02.1.02.0005	Akuisisi Arsip Statis		189,031,500.00	61,875,000.00	17,224,000.00		169,180,963.00	60,445,540.00	16,877,800.00	-	0.89	0.98	0.98	5,741,333.33	5,625,933.33
	2.24.02.1.03	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat	16,620,000.00	376,488,273.00	1,156,944,816.00	261,846,300.00	15,090,000.00	362,291,901.00	1,134,196,594.00	256,806,300.00	0.91	0.96	0.98	0.98	81,742,100.00	80,572,100.00
	2.24.02.1.03.01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN		22,090,000.00	103,905,866.00	96,139,000.00		21,840,000.00	97,305,646.00	95,649,000.00	-	0.99	0.94	0.99	32,046,333.33	31,883,000.00
	2.24.02.1.03.02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi		354,398,273.00	1,053,038,950.00	165,707,300.00		340,451,901.00	1,036,890,948.00	161,157,300.00	-	0.96	0.98	0.97	55,235,766.67	53,719,100.00
															0.00	0.00
	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip		131,839,450.00	115,140,250.00	190,616,650.00	150,186,748.00	123,601,700.00	106,101,950.00	167,486,820.00	132,732,068.00	0.94	0.92	0.88	0.88	6,115,766.00	3,043,456.00
	2.24.03.1.01	Pemusnahan Arsip dilindungi Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	41,674,000.00	14,688,800.00	25,934,550.00	26,524,848.00	39,192,400.00	12,317,400.00	18,269,600.00	24,182,828.00	0.94	0.84	0.70	0.91	-5,049,717.33	-5,003,190.67
	2.24.03.1.01.01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun		9,205,000.00	22,032,000.00	26,524,848.00		6,833,600.00	18,269,600.00	24,182,828.00	-	0.74	0.83	0.91	8,841,616.00	8,060,942.67
	2.24.03.1.01.02	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip Yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun		5,483,800.00	3,902,550.00			5,483,800.00			-	1.00	0.00	-	0.00	0.00
	2.24.03.1.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi	48,798,900.00	17,995,000.00	87,079,950.00	41,590,000.00	46,248,900.00	16,568,200.00	83,521,950.00	38,035,000.00	0.95	0.92	0.96	0.91	-2,402,966.67	-2,737,966.67
	2.24.03.1.02.01	Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan, dan Penyimpanan Akibat Bencana		8,790,000.00	34,760,000.00	41,590,000.00		8,640,000.00	33,160,000.00	38,035,000.00	-	0.98	0.95	0.91	13,863,333.33	12,678,333.33
	2.24.03.1.02.02	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana		9,205,000.00	52,319,950.00			7,928,200.00	50,361,950.00		-	0.86	0.96	-	0.00	0.00
	2.24.03.1.03	Penyelamatan Asip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota	32,706,150.00	45,133,800.00	26,870,800.00	27,544,750.00	29,500,000.00	44,193,800.00	18,720,000.00	23,750,000.00	0.90	0.98	0.70	0.86	-1,720,466.67	-1,916,666.67
	2.24.03.1.03.01	Pendataan, Penyusunan Daftar dan penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi		10,746,000.00	4,075,400.00	27,544,750.00		10,746,000.00		23,750,000.00	-	1.00	0.00	0.86	9,181,583.33	7,916,666.67
	2.24.03.1.03.02	Pendataan, Penyusunan Daftar dan penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi		10,746,000.00	4,075,400.00			10,746,000.00			-	1.00	0.00	-	0.00	0.00
	2.24.03.1.03.03	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Lintas kabupaten/Kota		23,641,800.00	18,720,000.00			22,701,800.00	18,720,000.00		-	0.96	1.00	-	0.00	0.00
	2.24.03.1.04	Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi		17,444,500.00	22,906,400.00	23,222,000.00	0.00	15,515,800.00	21,597,360.00	20,998,000.00	-	0.89	0.94	0.90	7,740,666.67	6,999,333.33
	2.24.03.1.04.01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip		9,717,000.00	17,350,000.00	17,724,000.00		8,238,300.00	16,040,960.00	15,598,000.00	-	0.85	0.92	0.88	5,908,000.00	5,199,333.33
	2.24.03.1.04.02	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip		7,727,500.00	5,556,400.00	5,498,000.00		7,277,500.00	5,556,400.00	5,400,000.00	-	0.94	1.00	0.98	1,832,666.67	1,800,000.00
	2.24.03.1.05	Pencarian Arsip Statis Provinsi yang dinyatakan Hilang	8,660,400.00	19,878,150.00	27,824,950.00	31,305,150.00	8,660,400.00	17,506,750.00	25,377,910.00	25,766,240.00	1.00	0.88	0.91	0.82	7,548,250.00	5,701,946.67
	2.24.03.1.05.01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang		9,205,000.00	16,838,000.00	16,873,950.00		6,833,600.00	16,040,960.00	15,546,240.00	-	0.74	0.95	0.92	5,624,650.00	5,182,080.00
	2.24.03.1.05.02	Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang		6,388,050.00	5,135,950.00	4,999,500.00		6,388,050.00	5,135,950.00	4,500,000.00	-	1.00	1.00	0.90	1,666,500.00	1,500,000.00
	2.24.03.1.05.03	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)		4,285,100.00	5,851,000.00	9,431,700.00		4,285,100.00	4,201,000.00	5,720,000.00	-	1.00	0.72	0.61	3,143,900.00	1,906,666.67

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah memberikan sasaran layanan yang dapat kami klasifikasikan berdasarkan urusannya, sebagai berikut :

- a. Sasaran Layanan Bidang Perpustakaan kepada:
 1. Masyarakat/pemustaka baik yang datang ke perpustakaan umum daerah maupun ke desa-desa/sekolah yang diberikan layanan dengan mobil perpustakaan keliling,
 2. Perpustakaan Sekolah, perpustakaan Khusus/perpustakaan pondok pesantren dan Perpustakaan Desa.
- b. Sasaran Layanan Bidang kearsipan kepada :
 - 1) Masyarakat yang memerlukan arsip dapat meminjam dan melihatnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
 - 2) Perangkat Daerah (PD), Ormas, Desa/kelurahan.

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Layanan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan provinsi Sulawesi Tengah tidak bisa bekerja sendiri sehingga memerlukan kerja sama atau kemitraan dengan berbagai pihak guna meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Mitra-mitra ini berperan dalam mendukung, memperluas, dan memperkuat layanan yang diberikan. Berikut adalah beberapa mitra strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah :

- a. Instansi Pemerintah Lainnya
 - 1) **Dinas Pendidikan:** Mendukung pengembangan literasi di sekolah-sekolah.
 - 2) **Dinas Komunikasi dan Informatika:** Bekerja sama dalam pengembangan layanan digital perpustakaan dan arsip,
 - 3) **Dinas Sosial:** Menjangkau kelompok masyarakat rentan agar bisa mengakses layanan perpustakaan.
- b. Lembaga Pendidikan
 - 1) Sekolah dan Universitas: Menjadi mitra dalam pengembangan koleksi,

- pelatihan literasi informasi, dan program literasi baca,
- 2) Perguruan Tinggi: Mendukung riset dan penyediaan tenaga ahli di bidang perpustakaan dan kearsipan.
- c. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Komunitas
- Komunitas literasi dan penggiat arsip sering bekerja sama dalam kegiatan seperti:
- 1) Gerakan membaca,
 - 2) Pelatihan menulis,
 - 3) Pendokumentasian sejarah local,
 - 4) Pelestarian arsip masyarakat.
- d. Perpustakaan dan Arsip Swasta
- Perpustakaan umum/swasta, taman bacaan masyarakat (TBM), hingga lembaga arsip swasta bisa menjadi mitra dalam memperluas jangkauan layanan
- e. Media Massa
- Mendukung promosi layanan perpustakaan dan kesadaran pentingnya arsip melalui berbagai saluran informasi.

2.1.6 Kerjasama Daerah yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah

Dalam konteks pemerintahan daerah, kerja sama daerah merupakan bentuk kolaborasi antara pemerintah provinsi dengan berbagai pihak, baik internal antar-daerah maupun eksternal lintas sektor, untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, termasuk di bidang perpustakaan dan kearsipan. Sebagai instansi teknis di tingkat provinsi. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah memiliki tanggung jawab dalam menjalin, mengelola, dan mengevaluasi kerja sama yang relevan dengan fungsi utamanya, yaitu peningkatan literasi masyarakat dan pengelolaan arsip daerah.

Jenis-Jenis Kerja Sama yang Dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah :

- a. Kerja Sama Antar-Daerah (Kabupaten/Kota) di Provinsi

- 1) Pendampingan perpustakaan desa atau kelurahan oleh dinas provinsi kepada dinas kab/kota,
 - 2) Pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM pengelola perpustakaan dan arsip di daerah,
 - 3) Integrasi sistem informasi perpustakaan dan kearsipan antar-kabupaten/kota dengan provinsi,
 - 4) Digitalisasi arsip dan koleksi lokal untuk memperkuat pelestarian warisan budaya daerah.
- b. Kerja Sama Lintas Provinsi
- a. Kegiatan literasi bersama, seperti festival literasi antar provinsi, seminar, atau workshop regional,
 - b. Penyelarasan kebijakan pengelolaan arsip daerah antarprovinsi dalam satu kawasan atau wilayah.
- c. Kerja Sama dengan Perpustakaan Nasional RI dan Arsip Nasional RI
- 1) Implementasi Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.
 - 2) Pendampingan teknis dan standarisasi pengelolaan arsip oleh ANRI.
 - 3) Sinkronisasi data dan pelaporan kinerja sektor perpustakaan dan kearsipan.
- d. Kerja Sama dengan Lembaga Pendidikan dan Perguruan Tinggi
- 1) Kolaborasi riset di bidang dokumentasi, arsip, sejarah lokal, dan literasi,
 - 2) Peningkatan kapasitas SDM melalui program magang, PKL, atau pelatihan bersama.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan dengan Perda Nomor 07 Tahun 2008 sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah serta Peraturan

Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2023 atas perubahan Peraturan Gubernur nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah tersebut diatas, maka Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tugas dan fungsi membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Perpustakaan dan Kearsipan yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi Peran

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah dalam pembangunan daerah adalah meningkatkan pembangunan masyarakat melalui upaya pembinaan perpustakaan di masyarakat dan sekolah menengah, pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno daerah, pengelolaan arsip baik dinamis maupun statis serta perlindungan dan penyelamatan arsip secara berdaya guna dan berhasil guna, dengan mengutamakan upaya pemanfaatan koleksi perpustakaan dan arsip berbasis digital (literasi digital).

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Memperhatikan dan menganalisis secara mendalam kondisi lingkungan internal dan eksternal yang begitu dinamis, dapat diidentifikasi dan dirumuskan permasalahan yang menjadi isu strategis dalam pembangunan bidang perpustakaan dan kearsipan di Sulawesi Tengah, maka untuk menghadapi berbagai hambatan dan permasalahan dalam mencapai pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai lembaga yang memberikan pelayanan informasi perpustakaan dan kearsipan kepada masyarakat yaitu :

a. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan belum berjalan secara optimal

Upaya Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah untuk memberdayakan semua jenis perpustakaan tidak dapat berjalan secara optimal karena terdapat faktor-faktor penghambat, seperti :

- 1) Jumlah perpustakaan yang perlu dibina dan dikembangkan sebanyak 2.620 unit, namun yang sudah dilakukan kegiatan pembinaan sampai dengan tahun 2020 baru mencapai 1.749 unit atau 66,75 %

- 2) Perpustakaan Umum Kab/Kota sebagai mitra kerja dalam melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan berbagai jenis perpustakaan di daerah belum dapat melaksanakan tugasnya secara optimal karena keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia.

b. Kuantitas dan Kualitas SDM Masih Terbatas

Substansi tugas yang diemban oleh Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah difokuskan pada lima aspek, yaitu;

- 1) Pengembangan Perpustakaan, Sumberdaya Manusia dan Pembudayaan Kegemaran Membaca,
- 2) Deposit, Pelestarian, Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan, baik koleksi umum maupun koleksi yang memiliki kandungan isi mengenai kearifan lokal (*heritage*),
- 3) Layanan, Otomasi dan Kerja Sama Perpustakaan.
- 4) Pengelolaan Arsip, dan
- 5) Pembinaan Kearsipan dan Tenaga Kearsipan.

Kelima aspek tersebut belum dapat berjalan secara optimal karena masih terkendala oleh rendahnya kuantitas dan kualitas SDM yang dimiliki oleh Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah.

Permasalahan SDM di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah menyangkut hal-hal berikut :

- 1) Jumlah tenaga pembina perpustakaan tidak sebanding dengan jumlah perpustakaan yang akan dibina. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah hanya memiliki tenaga pembina sebanyak 28 orang (tenaga fungsional pustakawan). Tenaga arsiparis sebanyak 8 orang, sedangkan jumlah perpustakaan yang perlu dibina sebanyak 2.620 unit.
- 2) Kemampuan teknis SDM Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal perawatan dan pelestarian koleksi bahan perpustakaan masih sangat terbatas.
- 3) Rasio jumlah pegawai Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi

Sulawesi Tengah dengan jumlah pemustaka yang berkunjung dan mendayagunakan jasa layanan perpustakaan sangat tidak seimbang. Pegawai Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah yang bertugas pada sektor layanan berjumlah 23 orang termasuk pejabat fungsional pustakawan, sedangkan jumlah pemustaka yang berkunjung pada tahun 2020 sebanyak 112.440 orang, dan

- 4) Kemampuan staf Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah dalam bidang aplikasi teknologi informasi, khususnya dalam hal aplikasi layanan perpustakaan digital masih sangat terbatas sehingga berdampak pada terbatasnya aplikasi teknologi informasi yang dimanfaatkan di perpustakaan.

c. Upaya Pengembangan Koleksi Deposit Belum Optimal

Salah satu fungsi Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai perpustakaan deposit yang bertugas untuk menghimpun, mengolah, melestarikan dan mendayagunakan hasil karya cetak dan karya rekam yang diterbitkan oleh instansi pemerintah/swasta dan perorangan dalam wilayah Sulawesi Tengah. Tugas dan tanggungjawab tersebut secara tegas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 1990, Peraturan Pemerintah Nomor. 70/1991 dan Peraturan Pemerintah Nomor. 23/1999 tentang Wajib Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. Namun demikian dalam pelaksanaannya ditemukan berbagai kendala, seperti :

- 1) Masih rendahnya kesadaran instansi pemerintah/swasta dan perorangan untuk menyerahkan hasil karyanya ke Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan,
- 2) Karya cetak, khususnya naskah kuno (manuskrip) yang dimiliki oleh perorangan di daerah Kabupaten/Kotasangat sulit dikumpulkan karena adanya anggapan bahwa naskah kuno atau manuskrip tersebut merupakan harta warisan dan bernilai magic.

d. Minat Baca dan Apresiasi Masyarakat terhadap Perpustakaan masih rendah

Minat baca dan apresiasi masyarakat di Sulawesi Tengah terhadap perpustakaan dinilai masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya animo masyarakat untuk mendayagunakan perpustakaan umum Kab/Kota serta belum membudayanya aktivitas membaca di tengah-tengah masyarakat.

Menghadapi kondisi demikian, maka diperlukan adanya pembinaan dan pengembangan perpustakaan dan pembudayaan minat baca untuk semua elemen masyarakat secara berkesinambungan melalui berbagai program dan kegiatan.

e. Layanan Kearsipan yang belum maksimal

- 1) Belum lengkapnya sarana dan prasarana layanan kearsipan berbasis TIK.
- 2) Beragamnya sasaran layanan kearsipan menurut Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan,
- 3) Perlu adanya standarisasi layanan prima untuk kearsipan berbasis TIK,
- 4) Perlunya disusun kajian kerjasama layanan jasa kearsipan (layanan system kearsipan. Layanan pembenahan arsip. Layanan penyimpanan, layanan pemeliharaan, dan layanan pengendalian arsip),
- 5) Perlunya disusun prosedur tetap Layanan Kearsipan,
- 6) Memberikan akses dan layanan arsip statis dalam bentuk dan media apapun sesuai dengan khazanah arsip yang dikelola, dan
- 7) Perlunya penyediaan jasa reproduksi arsip baik arsip kertas maupun non kertas.

f. Pembinaan Kearsipan belum maksimal

- 1) Penyelenggaraan Tata Kelola Kearsipan yang belum terpadu pada Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah,
- 2) Besarnya pemenuhan kebutuhan Tenaga Fungsional Arsiparis dilingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah,
- 3) Belum terpenuhinya standarisasi kompetensi Pejabat Fungsional Arsiparis

dan para Pengelola Arsip Perangkat Daerah,

- 4) Perlu regulasi yang lengkap tentang Penyelenggaraan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah dari mulai penciptaan arsip sampai dengan penyusutan arsip,
 - 5) Perlu adanya regulasi mengenai pengelolaan Arsip-arsip Aset Daerah,
 - 6) Kurangnya kualitas SDM dibidang pengembangan Sistem Kearsipan,
 - 7) Belum tersedianya Master Plan Pengembangan Sistem Kearsipan Provinsi, dan
- Perlu dibangunnya Sistem Monitoring berbasis TIK untuk pengendalian kearsipan.

g. Akuisisi dan Pengelolaan Arsip belum optimal

- 1) Kurang lengkapnya koleksi arsip yang bernilai sejarah dan khasanah budaya Sulawesi Tengah,
- 2) Perlu regulasi mengenai pengelolaan arsip vital dan dokumen penting serta pelestariannya,
- 3) Belum terlaksanakannya akuisisi dan pengelolaan arsip-arsip yang menyangkut asset daerah,
- 4) Perlu adanya standarisasi pengelolaan arsip yang terukur dan pelaksanaan Alih Media berbasis TIK yang handal untukantisipasi perubahan media arsip dan perlakuan terhadap arsip media baru, dan
- 5) Kurangnya sarana dan prasarana pemnyimpanan arsip menurut jenis media arsipnya, peralatan, perawatan dan pemeliharaan arsip.

2.2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah

Penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan serta pengelolaan kearsipan yang baik dan benar adalah merupakan bagian integral dalam pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan berkualitas serta berdaya saing dalam berbagai bidang

kehidupan. Tujuan pembangunan nasional secara eksplisit dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang ingin dicapai adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Pelayanan publik menjadi isu kian strategis manakala kualitas kinerja birokrasi pelayanan publik memiliki implikasi luas di berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dan munculnya berbagai fenomena dan kejadian pada dekade ini, sudah pasti membawa dampak yang beragam pada kinerja perpustakaan dan kearsipan. Jika hal ini dibiarkan, bukan tidak mungkin akan menimbulkan krisis identitas bangsa. Kondisi ini patut mendapat perhatian dari lembaga perpustakaan dan kearsipan, karena merupakan lembaga yang bertanggung jawab pada pembinaan, pengembangan, pembuatan kebijakan serta penyelamatan sumber informasi primer maupun sekunder. Berikut tabel isu strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah.

Tabel 2.13 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Yang Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pembinaan Perpustakaan Sekolah Desa dan Pengembangan Perpustakaan Umum Daerah	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan belum berjalan secara optimal	Minimnya Anggaran dan Prioritas Pembangunan Perpustakaan	Kurangnya interoperabilitas sistem informasi kearsipan dan Tantangan dalam pengelolaan data digital jangka panjang	Pembangunan budaya literasi belum merata dan Pengelolaan arsip belum sepenuhnya sesuai dengan Prinsip good governance.	Perpustakaan desa tidak aktif karena kekurangan buku dan tenaga pengelola dan Arsip pemerintah daerah tidak tertata dengan baik, berisiko hilang atau rusak.	Kegiatan Rendahnya kualitas layanan perpustakaan, keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM (pustakawan/ arsiparis), kurangnya infrastruktur pendukung, serta belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan perpustakaan dan pengelolaan arsip.
Pembinaan dan pengembangan SDM pustakawan dan arsiparis merupakan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah	Kuantitas dan Kualitas SDM Masih Terbatas	Masih banyak Petugas tidak memiliki latar belakang profesi atau pelatihan yang sesuai	Kesenjangan Kompetensi SDM dalam Transformasi Digital Perpustakaan dan Arsip	Rendahnya Profesionalisme SDM Perpustakaan dan Arsip dalam Mendukung Pembangunan Literasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Keterbatasan SDM Ahli Perpustakaan dan Kearsipan di Daerah Menghambat pemerataan Layanan Informasi	Rendahnya kualitas layanan publik, tidak optimalnya pengelolaan arsip daerah, serta lambatnya transformasi digital di sektor informasi dan literasi.
Digitalisasi dan Inovasi Layanan	Upaya Pengembangan Koleksi Deposit Belum Optimal	Keterbatasan Sarana dan Prasarana Perpustakaan	Transformasi Digital dan Akses Pengetahuan	Banyak perpustakaan di desa atau wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) belum memiliki akses listrik stabil dan internet	Belum Maksimalnya Digitalisasi dan Akses Informasi di Wilayah Pedesaan	Menjangkau layanan perpustakaan ke wilayah pedalaman dan penguatan perpustakaan digital sebagai solusi inklusif
Pengembangan Literasi dan Budaya Membaca	Minat Baca dan Apresiasi Masyarakat terhadap Perpustakaan masih rendah	Rendahnya minat baca, keterbatasan akses pustaka, dan belum mengakar budaya membaca.	Krisis Literasi dan Ketimpangan Akses Informasi	Rendahnya Indeks Literasi Nasional	Rendahnya Ketersediaan dan Kualitas Perpustakaan Daerah	Meningkatkan literasi masyarakat di seluruh lapisan, terutama wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) dan strategi efektif untuk menanamkan budaya literasi sejak usia dini

Pengembangan Sistem Kearsipan Terintegrasi dan Digitalisasi dan Akses Layanan Publik	Layanan Kearsipan yang belum maksimal	Kesenjangan Akses Layanan Perpustakaan	Pelestarian Warisan Budaya dan Arsip Dunia	Minimnya Pengelolaan Arsip yang Profesional	isu regional yang berdampak pada lemahnya sistem administrasi pemerintahan dan pelayanan publik. Ketiadaan sistem kearsipan yang baik menyebabkan kesulitan dalam penelusuran dokumen,	Meningkatkan kompetensi SDM pengelola perpustakaan dan arsip di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dan
Penguatan Lembaga Kearsipan di Tingkat Daerah dan Pengembangan Kapasitas SDM Kearsipan	Pembinaan Kearsipan belum maksimal	Rendahnya Kualitas Pembinaan Kearsipan Menghambat Terwujudnya Tertib Arsip dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	Kesenjangan Kapasitas Kelembagaan dalam Pengelolaan Arsip untuk Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel”	Lemahnya pengawasan kearsipan daerah berdampak pada rendahnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel	Tidak tertibnya pengelolaan arsip OPD di daerah menyebabkan kesenjangan informasi dan risiko kehilangan data penting lokal.	Memperkuat sistem pembinaan, meningkatkan kompetensi SDM, dan mengembangkan sistem informasi kearsipan daerah secara terintegrasi untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan transparan
Memperkuat tata kelola arsip melalui pengembangan sistem yang terstandarisasi.	Akuisisi dan Pengelolaan Arsip belum optimal	Keterbatasan Integrasi dan Sinergi antara Pengelolaan Arsip dan Perpustakaan dalam Mendukung Pelestarian Informasi dan Pengetahuan Daerah”	Kesenjangan Kapasitas Pengelolaan Arsip dalam Mendukung Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan	Keterbatasan Sistem dan Kapasitas Pengelolaan Arsip Pemerintah Daerah	Kesenjangan Kapasitas Kearsipan Antar Daerah Menghambat Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif	Belum Optimalnya Akuisisi dan Pengelolaan Arsip Menghambat Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan”

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Dalam menentukan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah erat kaitannya dengan isu strategis daerah aktual yang telah dirumuskan sebelumnya dengan tetap memperhatikan keberlanjutan dan keselarasan dengan Visi Misi dan analisis sasaran pokok atau arah kebijakan RPJPD 2025 – 2045 tahap pertama. Berdasarkan hal tersebut ditetapkan dengan menggunakan penyelarasan, ditetapkan tujuan dalam Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 – 2029. Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah merupakan proses menetapkan program – program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan perkiraan jumlah sumber daya yang akan dialokasikan ke setiap Program jangka Panjang selama beberapa tahun ke depan.

Penetapan tujuan Renstra perangkat daerah adalah untuk mewujudkan pembangunan daerah yang lebih terencana, terukur, dan berkualitas, dengan memperhatikan kepentingan masyarakat, pemanfaatan sumber daya yang ada, serta pengelolaan yang transparan dan akuntabel. Dalam Renstra, setiap perangkat daerah akan memiliki tujuan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya, namun secara umum, tujuannya adalah untuk mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 – 2029 merupakan kondisi yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan dengan memperhatikan tugas dan fungsi, kelompok sasaran, tujuan organisasi, permasalahan dan isu – isu strategis pembangunan daerah. Dengan demikian, penentuan tujuan dan sasaran focus dari tujuan Pembangunan daerah dan menggambarkan kondisi pencapaian hasil (outcome) kinerja Perangkat Daerah yang terukur, spesifik, rasional dan dapat dicapai pada akhir periode perencanaan. Dalam rangka menghadapi permasalahan, isu – isu strategis, tantangan dan

peluang perubahan yang akan terjadi, maka sesuai tugas dan fungsinya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah berupaya mendukung untuk mencapai Visi, melaksanakan Misi, dan memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Dalam menyambut Indonesia Emas 2045 Provinsi Sulawesi Tengah perlu melakukan penguatan fondasi transformasi dan akselerasi transformasi, dan ekspansi global disegala bidang. Provinsi Sulawesi Tengah juga harus menjadi daerah maju sehingga dibutuhkan kemampuan untuk menghasilkan produk – produk pertanian dan industry berbasis sumber daya alam yang yang mampu berekspansi secara global serta memberikan berbagai sumbangsih yang positif di Tahun 2045. Untuk itu ditetapkanlah Visi Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 2025 – 2045 adalah : **“SULAWESI TENGAH SEBAGAI WILAYAH PERTANIAN DAN INDUSTRI BERBASIS SUMBERDAYA ALAM YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN”**. Sedangkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 – 2029, Visi Provinsi Sulawesi Tengah adalah :

“BERANI MEWUJUDKAN SULAWESI TENGAH SEBAGAI WILAYAH PERTANIAN DAN INDUSTRI YANG MAJU DAN BERKELANJUTAN 2025 – 2029”



“Berani mewujudkan Sulawesi Tengah sebagai Wilayah Pertanian dan Industri yang Maju dan Berkelanjutan Tahun 2025 – 2029 dengan Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Masyarakat Sehat, Cerdas dan Sejahtera melalui Pemenuhan kebutuhan dasar dan penyediaan lapangan kerja.
2. Mewujudkan Masyarakat Bahagia dna Produktif melalui peningkatan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan.

3. Mewujudkan Pembangunan berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan berorientasi pada konektivitas antar wilayah dan antar sektor.
4. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan bersih, inovatif, kalaboratif serta keamanan daerah yang Tangguh berlandaskan nilai religious dan kearifan local.

Dalam rangka mencapai visi, misi pemerintah daerah, tujuan dan sasaran strategis, telah ditetapkan indikator-indikator sebagai pengukur capaian kinerja yang direncanakan, sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerjanya. Indikator dan sasaran dimaksud sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perpustakaan Provisi Sulawesi Tengah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
2.23.2.24.0.00.01.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah											
MENINGKATNYA KUALITAS PENDIDIKAN	Meningkatnya literasi masyarakat, tata kelola Kearsipan dan tingkat digitalisasi Arsip		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (Indeks)	71,70	72	73	75	77	80	83	
			Tingkat Digitalisasi Arsip	71,71	72	73	74	75	76	77	
		Meningkatnya capaian nilai dimensi kepatuhan	Nilai Dimensi Kepatuhan (Nilai)	21,51	21,6	21,9	22,5	23,1	24	24,9	
		Meningkatnya capaian nilai dimensi kinerja	Nilai Dimensi Kinerja (Nilai)	50,19	50,4	51,1	52,5	53,9	56	58,1	
		Meningkatnya capaian Nilai Digitalisasi Arsip	Nilai Aspek Kebijakan (Nilai)	22,71	22,74	22,76	22,78	22,8	23	23,2	
			Nilai Implementasi Kebijakan (Nilai)	49	49,26	50,24	51,22	52,2	53	53,8	
		Meningkatnya capaian Nilai Pengawasan Kearsipan	Indeks hasil pengawasan kearsipan pada lingkup Pemerintah Daerah (Indeks)	63,49	70	71	72	73	74	75	

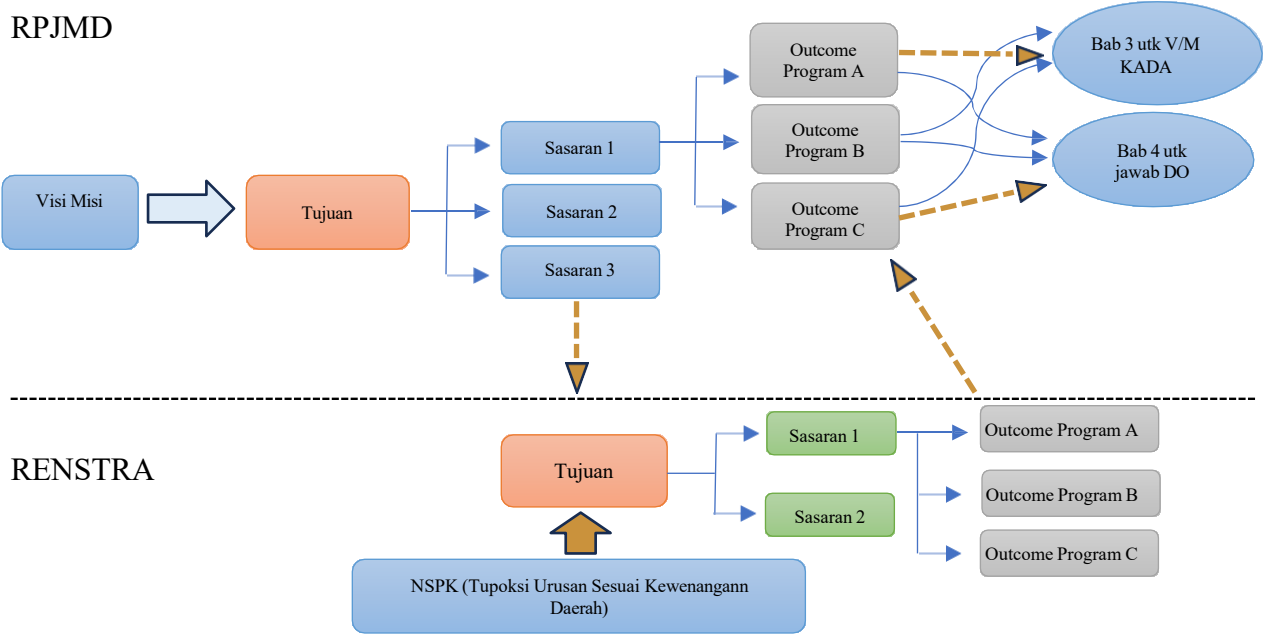
3.2 Strategi untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Konsep dan kerangka strategi manajemen Dinas perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah, disusun atas dasar permasalahan dan isu – isu strategis nasional yang ada dan dengan memperhatikan sasaran - sasaran yang ditetapkan terkait dengan agenda pembangunan yang telah dirumuskan dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah.

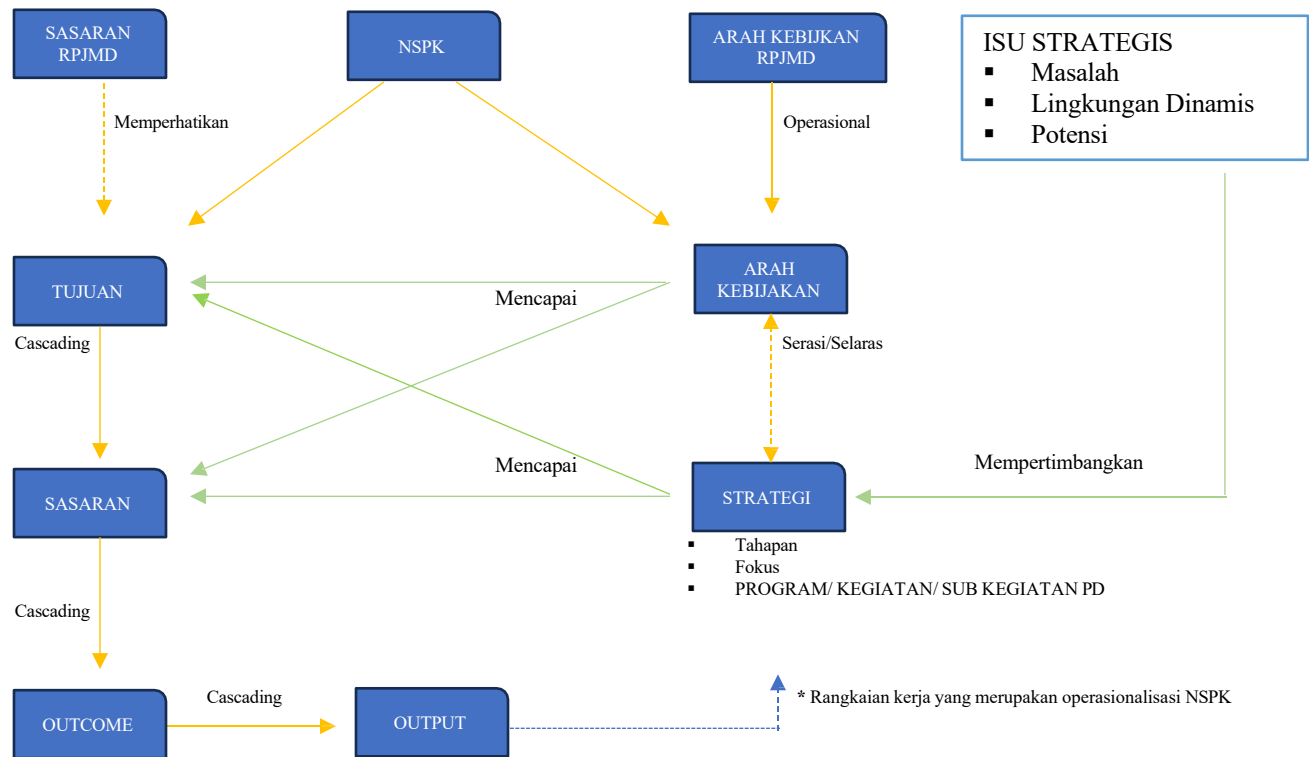
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan Pembangunan Daerah untuk jangka 5 (lima) tahun yang berfungsi sebagai penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih. Renstra berfungsi sebagai penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan arah kebijakan yang tercantum dalam RPJMD sesuai tugas, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah.

Adapun keterkaitan RPJMD dengan Renstra terletak pada hubungan hierarkis dan fungsional. Dimana RPJMD menjadi pedoman utama Perangkat Daerah untuk menjabarkan Pembangunan Daerah lebih lanjut ke dalam Renstra. Dalam pencapaian target – target kinerja Renstra Perangkat Daerah secara agregat akan berkontribusi terhadap terwujudnya sasaran Pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD. Renstra merupakan dokumen turunan dari RPMJD yang bersidat operasional dan sectoral.

Gambar 3.1 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD



Gambar 3.2 Konsep Renstra Perangkat Daerah



Dalam pencapaian Visi dan Misi Gubernur Sulawesi Tengah, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam mendukung :

- Misi 1 : Mewujudkan Masyarakat sehat, cerdas dan Sejahtera melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan penyediaan lapangan kerja.
- Misi 9 : Memperkuat birokrasi yang akuntabel, membangun budaya kerja yang bersih, mencegah terjadinya tindak korupsi dan menjamin seluruh kegiatan pemerintahan berjalan tepat sasaran.

Berdasarkan hasil telaah Visi, dan Misi Gubernur Sulawesi Tengah maka Tujuan pelaksanaan pembangunan yang akan dicapai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 – 2029 mendatang adalah “*Meningkatnya literasi masyarakat, tata kelola Kearsipan dan tingkat digitalisasi Arsip*”. Penetapan tujuan dari misi ini berdasarkan hasil telaah kesesuaian RPJMD Tahun 2025-2029 Provinsi Sulawesi

Tengah dengan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah.

Untuk mencapai tujuan tersebut Maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan sasaran strategis jangka menengah yang merupakan indikator pencapaian hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Strategi merupakan cara mencapai seluruh tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dimaksud merupakan pemilihan langkah-langkah yang menyeluruh dan terpadu dalam implementasi perencanaan strategik, yang meliputi penetapan program dan serangkaian kegiatan dengan memperhatikan segala sumber daya dan lingkungan yang ada. Adapun strategi yang akan dilaksanakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut :

- a. Peningkatan Akses dan Layanan Perpustakaan Berkualitas
- b. Penguatan Budaya Literasi Sejak Dini
- c. Digitalisasi Layanan Informasi dan Edukasi
- d. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Perpustakaan
- e. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Perpustakaan
- f. Pemanfaatan Arsip sebagai Sumber Pembelajaran
- g. Sinergi Program dan Kolaborasi Lintas Sektor.

Adapun Cascading Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut :

Gambar 3.3 Cascading Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2025 – 2029

“Mewujudkan Masyarakat Sehat, Cerdas dan Sejahtera Melalui Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Penyediaan Lapangan Kerja”

**BERANI BERINTEGRITAS -
TERWUJUDNYA TATA KELOLA
PEMERINTAHAN YANG BERKUALITAS**

Sasaran : - Tertibnya Arsip Pemerintah Daerah
Indikator : - Nilai Pengawasan Kearsipan

Nama Program :
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Perpustakaan Dan Kearsipan)

Nama Program :
Pengelolaan Arsip

Persentase perangkat daerah minimal berkategori baik dalam pengelolaan arsip

Sasaran : - Meningkatnya Ketersediaan Sumber Arsip
Indikator : - Tingkat Digitalisasi Arsip

Nama Program :
Pengelolaan Arsip

Jumlah salinan otentik naskah asip terjaga

Nama Program :
Pengelolaan Arsip

Jumlah arsip statis PD dan LKD yang dikelola

Nama Program :
Pengelolaan Arsip

Jumlah arsip dinamis PD dan LKD yang di alih media

Nama Program :
Pengelolaan Arsip

Jumlah arsip dinamis PD dan LKD yang dikelola

Nama Program :
Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

Persentase arsip perangkat daerah dan LKD yang dilindungi dan diselamatkan

**BERANI CERDAS - MENINGKATNYA
KUALITAS PENDIDIKAN**

Sasaran : - Meningkatnya Literasi Masyarakat
Indikator : - Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Nama Program :
Pembinaan Perpustakaan

Persentase perpustakaan yang ber standar nasional nernustakaan (SNP)

Nama Program :
Pembinaan Perpustakaan

Persentase kunjungan Pustaka

Nama Program :
Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno

Persentase Naskah Nasional dan Naskah Kuno yang dilestarikan

Sasaran : - Meningkatnya Kegemaran Membaca Masyarakat
Indikator : - Nilai Tingkat Kegemaran

Nama Program :
Pembinaan Perpustakaan

Persentase keterlibatan masyarakat di bidang perpustakaan

Nama Program :
Pembinaan Perpustakaan

Rasio tenaga perpustakaan yang tersedia

Nama Program :
Pembinaan Perpustakaan

Persentase Anggota Perpustakaan

3.3 Metadata Indikator Tujuan dan Sasaran RENSTRA Perangkat Daerah

Berikut Metadata Indikator Tujuan dan Sasaran RENSTRA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah :

1. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Nama Indikator	:	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
Dasar Hukum	:	Peraturan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM).
Defenisi	:	Ukuran statistik yang mengukur efektivitas upaya pemerintah daerah dalam membina dan mengembangkan perpustakaan untuk menciptakan budaya literasi melalui dua dimensi utama: Kepatuhan dan Kinerja . Dimensi kepatuhan mencakup koleksi dan sumber daya manusia (pustakawan) perpustakaan, sementara dimensi kinerja mencakup layanan perpustakaan dan pengelolaan perpustakaan
Rumus Perhitungan	:	$\text{Indeks}_{0-100} = 100 \times (W_{\text{Kepatuhan}} \times \text{Dim}_{\text{Kepatuhan}} + W_{\text{Kinerja}} \times \text{Di}_{\text{Kinerja}})$ Dengan bobot : $W_{\text{Kepatuhan}} = 0,30$ $W_{\text{Kinerja}} = 0,70$
Interpretasi	:	Instrumen baru IPLM 2025 lebih mengukur sejauh mana fasilitas perpustakaan benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat melalui variabel layanan dan pengelolaan, termasuk pemanfaatan koleksi, kegiatan penguatan budaya baca, dan jumlah pengunjung. Semakin tinggi nilai indeks menunjukkan keberhasilan dalam program literasi di suatu Instansi.
Sumber Data	:	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah, SMA/SMK, SLB. Khusus
Frekwensi	:	Tahunan

2. Tingkat digitalisasi arsip

TUJUAN : Meningkatnya literasi masyarakat, tata kelola Kearsipan dan tingkat digitalisasi Arsip		
	Tabel definisi operasional Indikator RENSTRA	
Nama Indikator		Tingkat Digitalisasi Arsip .
Dasar Hukum		▪ Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, ▪ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, ▪ Peraturan ANRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan, ▪ Peraturan ANRI Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja ANRI, ▪ Keputusan Kepala ANRI Nomor 322 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Kepala ANRI Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tim Pengawas Kearsipan.
Defenisi		Nilai <u>Tingkat Digitalisasi Arsip</u> adalah sebuah pengukuran kuantitatif yang menilai seberapa jauh suatu lembaga atau instansi telah berhasil mengkonversi arsip fisik menjadi arsip elektronik dan mengelola sistem kearsipan berbasis digital. Nilai ini menjadi indikator kemajuan dalam transformasi digital kearsipan untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan preservasi arsip di era digital
Rumus Perhitungan		= Nilai asepek kebijakan (30%) + Nilai implementasi kebijakan (70%)
Interpretasi		Semakin tinggi nilai tingkat digitalisasi arsip maka ini mencerminkan pengelolaan arsip digital yang komprehensif, efisien, dan transparan, seperti penggunaan aplikasi terintegrasi (misalnya, SRIKANDI), Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN), dan alih media arsip yang optimal.
Sumber Data		Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
ekwensi		Tahunan

3. Nilai Dimensi Kepatuhan dalam Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)

TUJUAN : Meningkatnya literasi masyarakat, tata kelola Kearsipan dan tingkat digitalisasi Arsip		
	Tabel definisi operasional Indikator RENSTRA	
Sasaran Strategis		Meningkatnya capaian nilai dimensi kepatuhan
Nama Indikator		<i>Nilai Dimensi Kepatuhan dalam IPLM</i>
Dasar Hukum		Peraturan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM).

Defenisi	"Nilai Dimensi Kepatuhan" adalah bagian dari penilaian dale Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM), yang dikelola oleh lembaga seperti Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan dinas-dinas terkait di daerah yang didasarkan pada 2 (dua) variabel yaitu : 1. Variabel koleksi, meliputi : a. Jumlah koleksi tercetak b. Jumlah koleksi elektronik c. Jumlah penambahan koleksi tercetak dalam satu tahun terakhir d. Jumlah penambahan koleksi elektronik e. Komitmen anggaran pengembangan koleksi tercetak dan digital dalam 1 (satu) tahun terakhir. 2. Variabel SDM, meliputi : a. Jumlah fungsional pustakawan sesuai kualifikasi (fungsional/profesional) dan tenaga teknis perpustakaan b. Jumlah tenaga teknis perpustakaan c. Jumlah tenaga perpustakaan yang mengikuti kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) di bidang perpustakaan dalam satu tahun terakhir
Rumus Perhitungan	lai akhir Dimensi Kepatuhan dalam IPLM = Nilai Dimensi Kepatuhan x 30%
Interpretasi	Semakin tinggi nilai dimensi kepatuhan dalam IPLM berarti Pemerintah Daerah Provinsi semakin patuh terhadap standar nasional dan kebijakan terkait pembangunan literasi masyarakat
Sumber Data	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
Frekwensi	Tahunan

4. Nilai Dimensi Kinerja dalam Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)

TUJUAN : Meningkatnya literasi masyarakat, tata kelola Kearsipan dan tingkat digitalisasi Arsip	
	Tabel defenisi operasional Indikator RENSTRA
Sasaran Strategis	Meningkatnya capaian nilai dimensi kinerja
Nama Indikator	<i>Nilai Dimensi Kinerja dalam IPLM</i>
Dasar Hukum	Peraturan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM).
Defenisi	Nilai Dimensi Kinerja" adalah bagian dari penilaian dalam Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) , yang dikelola oleh lembaga seperti Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan dinas-dinas terkait di daerah yang didasarkan pada 2 (dua) variabel yaitu : 1. Variabel layanan , meliputi : a. Koleksi tercetak yang dimanfaatkan b. Koleksi elektronik yang dimanfaatkan c. Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan penguatan baca dan peningkatan literasi d. Jumlah masyarakat yang memanfaatkan perpustakaan secara luring/daring e. Jumlah masyarakat yang memanfaatkan fasilitas sarana TIK f. Jumlah aktivitas kegiatan penguatan budaya baca dan literasi 2. Variabel pengelolaan, meliputi : a. Jumlah kolaborasi dan kerjasama perpustakaan b. Jumlah variasi dan layanan yang tersedia c. Jumlah dokumen kebijakan dan prosedur layanan
Rumus Perhitungan	Nilai akhir Dimensi Kinerja dalam IPLM = Nilai Dimensi Kinerja x 70%
Interpretasi	menunjukkan sejauh mana efektivitas dan produktivitas suatu wilayah dalam mengelola layanan perpustakaan serta menggerakkan aktivitas literasi secara nyata di tengah masyarakat
Sumber Data	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
Frekwensi	Tahunan

5. Nilai aspek kebijakan dalam tujuan tingkat digitalisasi arsip

TUJUAN : Meningkatkan literasi masyarakat, tata kelola Kearsipan dan tingkat digitalisasi Arsip		
	Tabel definisi operasional Indikator RENSTRA	
Sasaran Strategis		Meningkatnya capaian Nilai Digitalisasi Arsip
Nama Indikator		Nilai aspek kebijakan dalam Digitalisasi Arsip
Dasar Hukum		- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, - Peraturan ANRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan, - Peraturan ANRI Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja ANRI, dan - Keputusan Kepala ANRI Nomor 322 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Kepala ANRI Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tim Pengawas Kearsipan.
Defenisi		aspek kebijakan dalam pengukuran digitalisasi arsip adalah tingkat ketersediaan, kepatuhan, dan formalisasi regulasi internal (seperti peraturan atau SOP) yang mengatur tata cara alih media, pengelolaan, serta pengamanan arsip digital di dalam suatu instansi
Rumus Perhitungan		Nilai aspek kebijakan dalam digitalisasi arsip $= \frac{\text{Nilai akhir aspek kebijakan}}{\text{Nilai standar aspek kebijakan (1.100)}} \times \text{Bobot (30\%)}$
Interpretasi		Kategori Tinggi / Memuaskan: Menunjukkan bahwa instansi telah memiliki regulasi internal yang komprehensif, selaras dengan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik), dan dijalankan secara konsisten. Kategori Cukup / Kurang: Mengindikasikan bahwa regulasi internal masih parsial, belum spesifik mengatur arsip digital, atau kurang didukung oleh komitmen struktural pimpinan
Sumber Data		Lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
Frekwensi		Tahunan

6. Nilai implementasi kebijakan dalam tingkat digitalisasi arsip

TUJUAN : Meningkatkan literasi masyarakat, tata kelola Kearsipan dan tingkat digitalisasi Arsip		
	Tabel definisi operasional Indikator RENSTRA	
Sasaran Strategis		Meningkatnya capaian Nilai Digitalisasi Arsip
Nama Indikator		ilai implementasi kebijakan dalam Digitalisasi Arsip
Dasar Hukum		- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, - Peraturan ANRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan, - Peraturan ANRI Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja ANRI, dan - Keputusan Kepala ANRI Nomor 322 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Kepala ANRI Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tim Pengawas Kearsipan.
Defenisi		Implementasi kebijakan dalam digitalisasi arsip merupakan transformasi tata kelola arsip konvensional menjadi sistem digital terintegrasi guna mendukung efisiensi birokrasi, transparansi, dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Rumus Perhitungan		Nilai aspek implementasi kebijakan dalam digitalisasi arsip $= \frac{\text{Nilai akhir aspek implementasi kebijakan}}{\text{Nilai standar implementasi kebijakan (1.200)}} \times \text{Bobot (70\%)}$
Interpretasi		Nilai tinggi (Kategori memuaskan / Baik) Menandakan instansi tersebut berhasil membangun transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi anggaran melalui pengelolaan arsip elektronik yang sah secara hukum. Nilai Rendah: Menunjukkan perlunya perbaikan mendasar pada infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), kompetensi arsiparis, serta kepatuhan prosedur alih media arsip.
Sumber Data		Lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
Frekwensi		Tahunan

7. Indeks hasil pengawasan kearsipan pada lingkup Pemerintah Daerah

TUJUAN : Meningkatnya literasi masyarakat, tata kelola Kearsipan dan tingkat digitalisasi Arsip		
	Tabel definisi operasional Indikator RENSTRA	
Sasaran Strategis		Meningkatnya capaian Nilai Pengawasan Kearsipan
Nama Indikator		Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada lingkup Pemerintah Daerah .
Dasar Hukum		▪ Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, ▪ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, ▪ Peraturan ANRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan, ▪ Peraturan ANRI Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja ANRI, dan ▪ Keputusan Kepala ANRI Nomor 322 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Kepala ANRI Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tim Pengawas Kearsipan
Defenisi		Skor numerik atau kategori (misalnya, "Baik", "Sangat Baik") yang dihasilkan dari penilaian terhadap kesesuaian penyelenggaraan kearsipan di instansi pemerintah daerah dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan yang ditetapkan. Indeks ini mengukur seberapa efektif dan efisien pengelolaan arsip, baik arsip dinamis (aktif dan inaktif) maupun arsip statis, dan digunakan untuk menilai kinerja kearsipan secara menyeluruh.
Rumus Perhitungan		Indeks Nilai Pengawasan Kearsipan = (Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Eksternal x 60%) + (Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal x 40%) Dimana : a. Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Eksternal = (15% x Nilai aspek kebijakan)+(25% x Nilai aspek pembinaan) + (10% x Aspek pengelolaan arsip inaktif dengn retensi sekurang – kurangnya 10 ATahun) + (30% x Aspek pengelolaan arsip statis) + (20% x Aspek sumber daya kearsipan). b. Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal = (60% x Nilai Aspek Pengelolan arsip dinamis) + (40% Nilai Aspek Sumber Daya Manusia)
Interpretasi		Nilai tinggi (Kategori memuaskan / Baik) Menandakan instansi tersebut berhasil membangun transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi anggaran melalui pengelolaan arsip elektronik yang sah secara hukum. Nilai Rendah: Menunjukkan perlunya perbaikan mendasar pada infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), kompetensi arsiparis, serta kepatuhan prosedur alih media arsip.
Sumber Data		Lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
Frekwensi		Tahunan

3.4 Penahapan Prioritas Pembangunan Tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan Sasaran Renstra perangkat daerah

Penahapan prioritas Pembangunan Daerah melibatkan berbagai tahapan yang sistematis untuk menentukan program dan kegiatan yang paling penting bagi pencapaian target Pembangunan daerah. Tahapan ini meliputi identifikasi masalah dan potensi daerah, rumusan tujuan dan sasaran Pembangunan, serta seleksi program prioritas yang relevan. Prioritas Pembangunan daerah bertujuan untuk mendukung capaian sasaran Pembangunan Daerah bertujuan untuk mendukung capaian sasaran Pembangunan daerah, serta meningkatkan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Penahapan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran meningkatnya literasi masyarakat, tata kelola kearsipan dan tingkat digitalisasi arsip ini dirancang untuk :

- 1. Memberikan arah pelaksanaan program/kegiatan secara bertahap dan terukur,
- 2. Memastikan ketercapaian indikator kinerja utama dan kunci pada urusan perpustakaan dan kearsipan,
- 3. Mendukung transformasi kelembagaan berbasis literasi, akuntabilitas arsip, dan digitalisasi layanan publik.

Adapun tahapan prioritas Pembangunan Tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2 Penahapan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2029)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan tata Kelola transformasi digital Literasi dan Kearsipan	Peningkatan kemitraan/ kerjasama dengan stakeholder Perpustakaan da Kearsipan	Perluasan literasi dan optimalisasi penyelenggaraan kearsipan	Pemantapan Sarana Prasarana dan kualitas SDM Perpustakaan dan Kearsipan yang berdaya saing	Perwujudan dan budaya literasi Masyarakat yang maju dan penyelenggaraan Kearsipan yang berkelanjutan.

Tahapan ini menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan setiap tahun agar selaras dengan Visi, Misi dan Tujuan Pembangunan Daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD.

Melalui penahapan ini, setiap tahun diarahkan pada focus prioritas yang berbeda namun saling terkait. Dengan demikian, kebijakan yang dilaksanakan secara bertahap diharapkan dapat menghasilkan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan berkarakter.

3.5 Locus Perangkat Daerah Provinsi berdasarkan wilayah pengembangan kabupaten/Kota sesuai kebutuhan pengembangan daerah

Locus (lokasi fokus) kegiatan dan intervensi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah diarahkan pada wilayah pengembangan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah, untuk memperkuat pemerataan literasi masyarakat, pengelolaan arsip daerah, serta transformasi layanan digital, sesuai potensi dan kebutuhan masing-masing wilayah.

Pembagian Wilayah Pengembangan Provinsi Sulawesi Tengah :

- a. Wilayah I (Kota Palu, Donggala, Sigi, Parigi Moutong) focus kegiatannya adalah
 - 1) Pusat pengembangan perpustakaan digital dan layanan inklusi social
 - 2) Pusat koordinasi penerapan SRIKANDI dan digitalisasi arsip Perangkat Daerah
 - 3) Percontohan unit kearsipan model untuk kabupaten/kota lain
 - 4) Revitalisasi perpustakaan sekolah dan kelurahan
- b. Wilayah II (Poso, Tojo Una-Una) focus kegiatannya adalah
 - 1) Penguatan budaya literasi berbasis kearifan lokal dan multicultural
 - 2) Pendampingan pengelolaan arsip pada OPD pasca-konflik
 - 3) Pengembangan perpustakaan desa sebagai pusat edukasi masyarakat
- c. Wilayah III(Timur) – Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai Laut Fokus Kegiatan :
 - 1) Peningkatan layanan perpustakaan keliling dan digital
 - 2) Pendampingan unit kearsipan daerah yang memiliki kendala akses geografis
 - 3) Digitalisasi dan pelestarian arsip sejarah kelautan dan migas
- d. Wilayah IV (Morowali, Morowali Utara) Fokus Kegiatan :
 - 1) Penguatan perpustakaan komunitas dan literasi pekerja industry
 - 2) Pembinaan pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pemerintahan industry
 - 3) Kolaborasi literasi digital dengan dunia usaha (CSR)
- e. Wilayah V (Kepulauan dan Terpencil) – Buol, Tolitoli focus kegiatan
 - 1) Pelatihan literasi digital masyarakat pesisir
 - 2) Penambahan sarana perpustakaan terapung/keliling
 - 3) Pendampingan pembentukan unit arsip di daerah terpenci

3.6 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan skala prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu lima tahun mendatang, guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Arah kebijakan juga merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada Pemerintah Daerah agar lebih terarah, terukur dan sistematis dalam menentukan strategi pencapaian tujuan, melalui berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah sesuai tugas dan fungsi, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Arah kebijakan juga dimaksudkan untuk memberikan jawaban atas permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan kewilayahan serta usulan sesuai kebutuhan dan lokalitas dari berbagai komponen masyarakat sebagai pemangku kepentingan (stakeholder). Analisis permasalahan dan isu-isu strategis tersebut akan menjadi basis utama dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan untuk memberikan prioritas untuk mewujudkan percepatan dan pemerataan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Arah kebijakan harus dipedomani bersama oleh seluruh Perangkat Daerah yang selanjutnya akan dijabarkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.3 Arah kebijakan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
2.23.2.24.0.00.01.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah											
- MENINGKATNYA KUALITAS PENDIDIKAN	Meningkatnya literasi masyarakat,tata kelola Kearsipan dan tingkat digitalisasi Arsip		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (Indeks)	71,7	72	73	75	77	80	83	
			Tingkat Digitalisasi Arsip	71,71	72	73	74	75	76	77	
		Meningkatnya capaian nilai dimensi kepatuhan	Nilai Dimensi Kepatuhan (Nilai)	21,51	21,6	21,9	22,5	23,1	24	24,9	
		Meningkatnya capaian nilai dimensi kinerja	Nilai Dimensi Kinerja (Nilai)	50,19	50,4	51,1	52,5	53,9	56	58,1	
		Meningkatnya capaian Nilai Digitalisasi Arsip	Nilai Aspek Kebijakan (Nilai)	22,71	22,74	22,76	22,78	22,8	23	23,2	
			Nilai Implementasi Kebijakan (Nilai)	49	49,26	50,24	51,22	52,2	53	53,8	
		Meningkatnya capaian Nilai Pengawasan Kearsipan	Indeks hasil pengawasan kearsipan pada lingkup Pemerintah Daerah (Indeks)	63,49	70	71	72	73	74	75	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian program/Kegiatan/SubKegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah akan melaksanakan 6 (enam) program dari 2 urusan pemerinatahan yakni urusan perpustakaan dan urusan kearsipan. Adapun program tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Program Pembinaan Perustakaan
- b. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno
- c. Program Pengelolaan Arsip
- d. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
- e. Program Perisinan Penggunaan Arsip
- f. Program Penunjang Pemerintah Daerah Provinsi

Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah, yang diselaraskan dengan:

1. Kebijakan Pusat, khususnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia, penguatan literasi, transformasi digital, serta pengelolaan kearsipan secara profesional;
2. Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, yang menekankan pada peningkatan kualitas SDM,

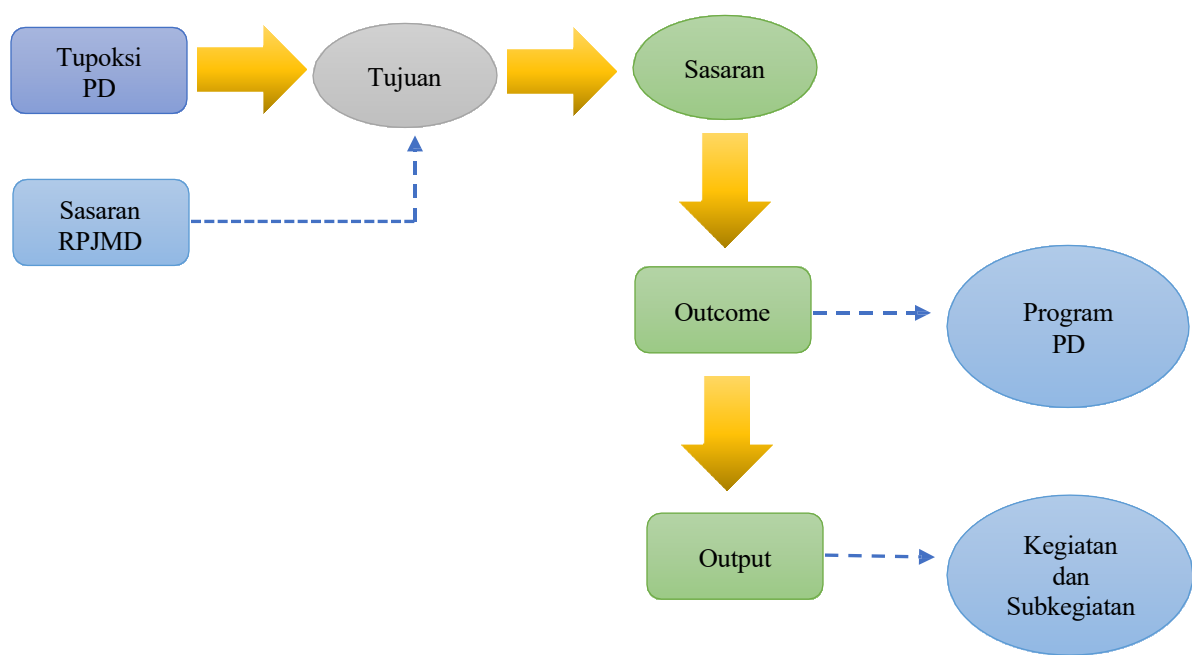
pemerataan akses informasi, dan tata kelola pemerintahan berbasis data dan arsip yang akuntabel;

3. Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025–2029, yang memuat arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah, termasuk peningkatan kualitas layanan perpustakaan dan penguatan sistem kearsipan daerah.

Dengan arah kebijakan ini, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan informasi dan pengelolaan arsip, tetapi juga menjadi mitra strategis dalam memperkuat kapasitas masyarakat untuk mendukung agenda pembangunan nasional. Dengan demikian, seluruh program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah disusun untuk memberikan kontribusi nyata terhadap visi pembangunan daerah serta mendukung agenda nasional dalam bidang perpustakaan dan kearsipan.

Adapun teknik merumuskan program/ kegiatan/ subkegiatan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah serta pendanaan Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada gambar dan beberapa tabel di bawah ini :

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah



Tabel 4.2 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rancangan Akhir Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Propinsi Sulawesi Tengah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
2.23.2.24.0.00.01.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah							
- MENINGKATNYA KUALITAS PENDIDIKAN	Meningkatnya literasi masyarakat, tata kelola Kearsipan dan tingkat digitalisasi Arsip				Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (Indeks)		
					Tingkat Digitalisasi Arsip (Nilai)		
		Meningkatnya capaian Nilai Pengawasan Kearsipan			Indeks hasil pengawasan kearsipan pada lingkup Pemerintah Daerah (Indeks)		
			Meningkatnya kualitas pengelolaan Arsip Perangkat Daerah		Persentase Perangkat daerah yang memiliki tata kelola kearsipan sesuai standar (%)	2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	
					Tingkat ketersediaan arsip yang dikelola (Nilai)	2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	
				Jumlah Pembinaan Kearsipan Kewenangan Provinsi	Jumlah arsiparis (Dokumen)	2.24.02.1.01 - Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	
					Jumlah ORMAS, ORPOL, OPD/BUMD yang telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis (Instansi)	2.24.02.1.01.0008 - Pembinaan Kearsipan kewenangan Provinsi	
					Jumlah OPD dan BUMD yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan (Lembaga)	2.24.02.1.01.0012 - Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi	
		Meningkatnya capaian Nilai Digitalisasi Arsip			Nilai aspek kebijakan		
					Nilai Implementasi Kebijakan (Nilai)		
			Meningkatnya Pembinaan dan pengawasan kearsipan		Persentase perangkat daerah minimal berkategori baik dalam pengelolaan arsip	2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	
				Jumlah Pembinaan Kearsipan Kewenangan Provinsi	Jumlah arsiparis (Dokumen)	2.24.02.1.01 - Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	
					Jumlah arsiparis yang memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan kearsipan yang diusulkan untuk mengikuti kegiatan pemilihan arsiparis teladan (Orang)	2.24.02.1.01 - Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	
					Jumlah arsip dinamis yang telah disusutkan (Arsip)	2.24.02.1.01 - Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	
					Jumlah Arsip yang di Alih Mediakan dan diautentikasi (Arsip)	2.24.02.1.01 - Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	
					Jumlah Daftar Arsip Dinamis (Arsip)	2.24.02.1.01 - Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	
					Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan (Laporan)	2.24.02.1.01 - Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	
					Jumlah OPD, BUMD dan SDM Kearsipan yang mendapatkan	2.24.02.1.01 - Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					penghargaan Tertib Arsip (Lembaga)		
					Jumlah OPD dan BUMD yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan (Lembaga)	2.24.02.1.01 - Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	
					Jumlah ORMAS, ORPOL, OPD/BUMD yang telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis (Instansi)	2.24.02.1.01 - Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	
					Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan arsip statis (Unit)	2.24.02.1.01 - Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	
					Jumlah arsip dinamis yang telah disusutkan (Arsip)	2.24.02.1.01.0004 - Penyusutan Arsip Dinamis	
					Jumlah Arsip yang di Alih Mediakan dan diautentikasi (Arsip)	2.24.02.1.01.0005 - Pelaksanaan Alih Media Arsip Dinamis dan Autentikasi	
					Jumlah Daftar Arsip Dinamis (Arsip)	2.24.02.1.01.0006 - Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis	
					Jumlah arsiparis yang memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan kearsipan yang diusulkan untuk mengikuti kegiatan pemilihan arsiparis teladan (Orang)	2.24.02.1.01.0007 - Pemilihan Arsiparis Teladan	
					Jumlah arsiparis (Dokumen)	2.24.02.1.01.0009 - Penyusunan Database Arsiparis	
					Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan arsip statis (Unit)	2.24.02.1.01.0010 - Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Arsip Statis	
					Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan (Laporan)	2.24.02.1.01.0011 - Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi	
					Jumlah OPD dan BUMD yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan (Lembaga)	2.24.02.1.01.0012 - Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi	
					Jumlah OPD, BUMD dan SDM Kearsipan yang mendapatkan penghargaan Tertib Arsip (Lembaga)	2.24.02.1.01.0013 - Pemberian Penghargaan Gerakan Sadar Tertib Arsip	
				Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi (Arsip)	2.24.02.1.02 - Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	
					jumlah arsip yang di akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis di Provinsi (Arsip)	2.24.02.1.02 - Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	
					Jumlah Orang yang diwawancarai (Orang)	2.24.02.1.02 - Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	
					Jumlah penerbitan naskah sumber Arsip (Arsip)	2.24.02.1.02 - Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	
					Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang dikumpulkan dan Disampaikan Kepada ANRI (Arsip)	2.24.02.1.02 - Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	
					Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang dikumpulkan dan Disampaikan Kepada ANRI (Arsip)	2.24.02.1.02.0001 - Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	
					Jumlah Orang yang diwawancarai (Orang)	2.24.02.1.02.0003 - Pengembangan Khazanah Arsip Statis Melalui Wawancara Sejarah Lisan	
					Jumlah penerbitan naskah sumber	2.24.02.1.02.0004 - Pengembangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Arsip (Arsip)	Khazanah Arsip Statis melalui Penerbitan naskah sumber Arsip	
					Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi (Arsip)	2.24.02.1.02.0005 - Akuisisi Arsip Statis	
					jumlah arsip yang di akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis di Provinsi (Arsip)	2.24.02.1.02.0006 - Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	
				Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi (Laporan)	2.24.02.1.03 - Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	
					Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN (Pegguna)	2.24.02.1.03 - Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	
				Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi		2.24.02.1.03 - Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	
						2.24.02.1.03 - Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	
				Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN (Pegguna)	2.24.02.1.03.0001 - Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	
					Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi (Laporan)	2.24.02.1.03.0002 - Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	
					Nilai Implementasi Kebijakan (Nilai)		
			Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK		Persentase cakupan perlindungan dan penyelamatan arsip (%)	2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	
				Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun (Arsip)	2.24.03.1.01 - Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	
					Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan (Berkas)	2.24.03.1.01 - Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	
					Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan (Berkas)	2.24.03.1.01.0003 - Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun	
					Jumlah Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun (Arsip)	2.24.03.1.01.0004 - Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	
				Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Jumlah Arsip yang dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat	2.24.03.1.02 - Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Akibat Bencana yang Berskala Provinsi	Bencana (Arsip)	yang Berskala Provinsi	
					Jumlah Arsip yang dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana (Arsip)	2.24.03.1.02.0002 - Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	
				Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota (Arsip)	2.24.03.1.03 - Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi (Arsip)	2.24.03.1.03 - Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi (Daftar)	2.24.03.1.03 - Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi (Daftar)	2.24.03.1.03.0001 - Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi (Arsip)	2.24.03.1.03.0002 - Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota (Arsip)	2.24.03.1.03.0003 - Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota	
				Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi	Jumlah Daftar Arsip yang dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip (Arsip)	2.24.03.1.04 - Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi	
					Jumlah Daftar Autentisitas Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip (Arsip)	2.24.03.1.04 - Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi	
					Jumlah Daftar Autentisitas Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip (Arsip)	2.24.03.1.04.0001 - Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	
					Jumlah Daftar Arsip yang dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip (Arsip)	2.24.03.1.04.0002 - Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	
				Pencarian Arsip Statis Provinsi yang Dinyatakan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih	2.24.03.1.05 - Pencarian Arsip Statis Provinsi yang Dinyatakan Hilang	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Hilang	Media yang Dinyatakan Hilang (Arsip)		
					Jumlah Daftar Autentisitas Statis Arsip yang Dinyatakan Hilang Berdasarkan Penilaian dan penetapan (Arsip)	2.24.03.1.05 - Pencarian Arsip Statis Provinsi yang Dinyatakan Hilang	
					Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman (Arsip)	2.24.03.1.05 - Pencarian Arsip Statis Provinsi yang Dinyatakan Hilang	
					Jumlah Daftar Autentisitas Statis Arsip yang Dinyatakan Hilang Berdasarkan Penilaian dan penetapan (Arsip)	2.24.03.1.05.0001 - Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	
					Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang (Arsip)	2.24.03.1.05.0002 - Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang	
					Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman (Arsip)	2.24.03.1.05.0003 - Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	
		Meningkatnya capaian nilai dimensi kinerja		Nilai Dimensi Kinerja (Nilai)	Nilai Dimensi Kinerja (Nilai)		
			Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan		Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (%)	2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	
					Persentase perpustakaan SMA dan SMK yang terstandarisasi dan terakreditasi (%)	2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	
				Jumlah perpustakaan yang berSNP	Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya (Perpustakaan)	2.23.02.1.01 - Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	
				Jumlah perpustakaan yang dibina di satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus di seluruh wilayah provinsi sulawesi tengah	Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khusus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan)	2.23.02.1.01 - Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	
				Jumlah tenaga perpustakaan dan pustakawan yang tersertifikasi	Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi (Orang)	2.23.02.1.01 - Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	
				Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan provinsi	Jumlah Perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan provinsi dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan (Perpustakaan)	2.23.02.1.01 - Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perpustakaan	Capaian Tingkat Gemar Membaca Masyarakat Tingkat Propinsi (Nilai)	2.23.02.1.01 - Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah kerjasama peningkatan Kegemaran Membaca dan literasi (Dokumen)	2.23.02.1.01 - Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang Dikembangkan Melalui Peningkatan	2.23.02.1.01 - Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Meningkatnya Pelayanan Perpustakaan Elektronik	Koleksi (Layanan) Jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK (Perpustakaan)	2.23.02.1.01 - Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat (Dokumen)	2.23.02.1.01 - Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	
				Jumlah koleksi perpustakaan khas daerah	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan (Eksemplar)	2.23.02.1.01 - Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	
				Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	2.23.02.1.01 - Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	
				Jumlah perpustakaan yang dibina di satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus di seluruh wilayah provinsi sulawesi tengah	Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khusus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan)	2.23.02.1.01.0004 - Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	
				Jumlah tenaga perpustakaan dan pustakawan yang tersertifikasi	Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi (Orang)	2.23.02.1.01.0006 - Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	
				Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan provinsi	Jumlah Perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan provinsi dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan (Perpustakaan)	2.23.02.1.01.0004 - Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perpustakaan	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang Dikembangkan Melalui Peningkatan Koleksi (Layanan)	2.23.02.1.01.0007 - Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
					Capaian Tingkat Gemar Membaca Masyarakat Tingkat Propinsi (Nilai)	2.23.02.1.01.0012 - Pengukuran Tingkat Gemar Membaca Masyarakat Tingkat Propinsi	
					Jumlah kerjasama peningkatan Kegemaran Membaca dan literasi (Dokumen)	2.23.02.1.01.0014 - Kerjasama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi	
				Meningkatnya Pelayanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat (Dokumen)	2.23.02.1.01.0011 - Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	
					Jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK (Perpustakaan)	2.23.02.1.01.0015 - Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	
				Jumlah koleksi perpustakaan khas daerah	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan (Eksemplar)	2.23.02.1.01.0009 - Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	
				Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan (Dokumen)	2.23.02.1.01.0016 - Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
		Meningkatnya capaian nilai dimensi kepatuhan		Nilai Dimensi Kepatuhan (Nilai)	Nilai Dimensi Kinerja (Nilai)		
			Meningkatnya Jumlah Perangkat Desa/Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Budaya Baca		Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dimiliki (%)	2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	
					Jumlah orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca (Orang)	2.23.02.1.02.0003 - Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	
				Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan	Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan (Perpustakaan)	2.23.02.1.02.0004 - Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	
				Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi yang dipilih dan didukung kegiatannya (Orang)	2.23.02.1.02.0006 - Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi	
			Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno		Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dimiliki (%)	2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	
				Jumlah eksemplar koleksi cetak dan karya rekam	Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR (Eksemplar)	2.23.03.1.01 - Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	
					Jumlah Penerima Penghargaan Kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif Dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Penerbit)	2.23.03.1.01 - Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	
					Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR (Eksemplar)	2.23.03.1.01.0001 - Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	
					Jumlah Penerima Penghargaan Kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif Dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Penerbit)	2.23.03.1.01.0002 - Pemberian Penghargaan kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	
				Jumlah buku katalog induk daerah yang diterbitkan	Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder Lainnya yang Diterbitkan (Entry)	2.23.03.1.02 - Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah	
						2.23.03.1.02 - Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah	
					Jumlah Bibliografi Daerah yang Diterbitkan (Naskah)	2.23.03.1.02 - Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah	
					Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder Lainnya yang Diterbitkan (Entry)	2.23.03.1.02.0001 - Penerbitan Katalog Induk Daerah	
					Jumlah Bibliografi Daerah yang Diterbitkan (Naskah)	2.23.03.1.02.0002 - Penerbitan Bibliografi Daerah	
				Jumlah eksemplar koleksi	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki	2.23.03.1.03 - Pelestarian Naskah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				naskah kuno yang diolah dan dialihmediakan	masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan (Eksemplar)	Kuno Milik Daerah Provinsi	
					Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno (Orang)	2.23.03.1.03 - Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	
					Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan (Eksemplar)	2.23.03.1.03.0003 - Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	
					Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno (Orang)	2.23.03.1.03.0004 - Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	
				Terpenuhinya jumlah Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diseleksi dan Dilakukan Pengadaan Oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi (Eksemplar)	2.23.03.1.04 - Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	
					Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diolah dan Dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi (Eksemplar)	2.23.03.1.04 - Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	
					Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diseleksi dan Dilakukan Pengadaan Oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi (Eksemplar)	2.23.03.1.04.0001 - Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	
					Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diolah dan Dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi (Eksemplar)	Terpenuhinya Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang dilakukan pengolahan dan penyiangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah ORMAS, ORPOL, OPD/BUMD yang telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis (Instansi)	2.24.02.1.01 - Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	
					Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan arsip statis (Unit)	2.24.02.1.01 - Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	
					Jumlah arsip dinamis yang telah disusutkan (Arsip)	2.24.02.1.01.0004 - Penyusutan Arsip Dinamis	
					Jumlah Arsip yang di Alih Mediakan dan diautentikasi (Arsip)	2.24.02.1.01.0005 - Pelaksanaan Alih Media Arsip Dinamis dan Autentikasi	
					Jumlah Daftar Arsip Dinamis (Arsip)	2.24.02.1.01.0006 - Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis	
					Jumlah arsiparis yang memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan kearsipan yang diusulkan untuk mengikuti kegiatan pemilihan arsiparis teladan (Orang)	2.24.02.1.01.0007 - Pemilihan Arsiparis Teladan	
					Jumlah ORMAS, ORPOL, OPD/BUMD yang telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis (Instansi)	2.24.02.1.01.0008 - Pembinaan Kearsipan kewenangan Provinsi	
					Jumlah arsiparis (Dokumen)	2.24.02.1.01.0009 - Penyusunan Database Arsiparis	
					Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan arsip statis (Unit)	2.24.02.1.01.0010 - Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Arsip Statis	
					Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan (Laporan)	2.24.02.1.01.0011 - Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi	
					Jumlah OPD dan BUMD yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan (Lembaga)	2.24.02.1.01.0012 - Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi	
					Jumlah OPD, BUMD dan SDM Kearsipan yang mendapatkan penghargaan Tertib Arsip (Lembaga)	2.24.02.1.01.0013 - Pemberian Penghargaan Gerakan Sadar Tertib Arsip	
				Pengelolaan Arsip	Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi (Arsip)	2.24.02.1.02 - Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	

				Statis Daerah Provinsi	jumlah arsip yang di akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis di Provinsi (Arsip)	2.24.02.1.02 - Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	
					Jumlah Orang yang diwawancarai (Orang)	2.24.02.1.02 - Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah penerbitan naskah sumber Arsip (Arsip)	2.24.02.1.02 - Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	
					Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang dikumpulkan dan Disampaikan Kepada ANRI (Arsip)	2.24.02.1.02 - Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	
					Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang dikumpulkan dan Disampaikan Kepada ANRI (Arsip)	2.24.02.1.02.0001 - Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	
					Jumlah Orang yang diwawancarai (Orang)	2.24.02.1.02.0003 - Pengembangan Khazanah Arsip Statis Melalui Wawancara Sejarah Lisan	
					Jumlah penerbitan naskah sumber Arsip (Arsip)	2.24.02.1.02.0004 - Pengembangan Khazanah Arsip Statis melalui Penerbitan naskah sumber Arsip	
					Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi (Arsip)	2.24.02.1.02.0005 - Akuisisi Arsip Statis	
					jumlah arsip yang di akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis di Provinsi (Arsip)	2.24.02.1.02.0006 - Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	
				Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi (Laporan)	2.24.02.1.03 - Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	
					Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN (Pengguna)	2.24.02.1.03 - Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	

				Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi		2.24.02.1.03 - Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	
				Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN (Pengguna)	2.24.02.1.03.0001 - Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	
				Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi (Laporan)	2.24.02.1.03.0002 - Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK		Persentase cakupan perlindungan dan penyelamatan arsip (%)	2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	
				Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun (Arsip)	2.24.03.1.01 - Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	
					Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan (Berkas)	2.24.03.1.01 - Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	
					Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan (Berkas)	2.24.03.1.01.0003 - Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun	
					Jumlah Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun (Arsip)	2.24.03.1.01.0004 - Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	

				Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi	Jumlah Arsip yang dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana (Arsip)	2.24.03.1.02 - Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi	
					Jumlah Arsip yang dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana (Arsip)	2.24.03.1.02.0002 - Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	
				Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota (Arsip)	2.24.03.1.03 - Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi (Arsip)	2.24.03.1.03 - Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi (Daftar)	2.24.03.1.03 - Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi (Daftar)	2.24.03.1.03.0001 - Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi (Arsip)	2.24.03.1.03.0002 - Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi	

					Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota (Arsip)	2.24.03.1.03.0003 - Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota	
				Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi	Jumlah Daftar Arsip yang dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip (Arsip)	2.24.03.1.04 - Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi	
					Jumlah Daftar Autentisitas Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip (Arsip)	2.24.03.1.04 - Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi	
					Jumlah Daftar Autentisitas Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip (Arsip)	2.24.03.1.04.0001 - Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	
					Jumlah Daftar Arsip yang dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip (Arsip)	2.24.03.1.04.0002 - Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	
					Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang (Arsip)	2.24.03.1.05 - Pencarian Arsip Statis Provinsi yang Dinyatakan Hilang	
				Pencarian Arsip Statis Provinsi yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Autentisitas Statis Arsip yang Dinyatakan Hilang Berdasarkan Penilaian dan penetapan (Arsip)	2.24.03.1.05 - Pencarian Arsip Statis Provinsi yang Dinyatakan Hilang	
					Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman (Arsip)	2.24.03.1.05 - Pencarian Arsip Statis Provinsi yang Dinyatakan Hilang	
					Jumlah Daftar Autentisitas Statis Arsip yang Dinyatakan Hilang Berdasarkan Penilaian dan penetapan (Arsip)	2.24.03.1.05.0001 - Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	
					Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang (Arsip)	2.24.03.1.05.0002 - Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang	
					Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman (Arsip)	2.24.03.1.05.0003 - Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	

Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				21.543.010.650,00		23.054.357.028,68		24.741.199.129,03		26.628.745.659,39		28.746.320.382,56		
2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				19.108.291.984,00		20.448.831.074,01		21.945.031.949,00		23.619.254.313,80		25.497.507.858,10		
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	75,45	77,00	19.108.291.984,00	78,00	20.448.831.074,01	79,00	21.945.031.949,00	78,00	23.619.254.313,80	80,00	25.497.507.858,10	2.23.2.24.0.00.01.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah	
2.23.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				300.978.940,05		322.094.068,22		345.661.059,65		372.032.107,00		401.616.894,67		
Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2,00	2,00	180.587.540,05	2,00	193.256.568,22	2,00	207.396.709,65	2,00	223.219.357,00	2,00	240.970.194,67		
	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00			
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2,00	2,00		2,00		2,00		2,00		2,00			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	12,00	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00			
	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2,00	2,00		2,00		2,00		2,00		2,00			
2.23.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				108.352.790,05		115.954.368,22		124.438.309,65		133.931.957,00		144.582.494,67		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2,00	2,00	108.352.790,05	2,00	115.954.368,22	2,00	124.438.309,65	2,00	133.931.957,00	2,00	144.582.494,67		
2.23.01.1.01.0002 -				18.058.700,00		19.325.600,00		20.739.600,00		22.321.900,00		24.096.900,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1,00	1,00	18.058.700,00	1,00	19.325.600,00	1,00	20.739.600,00	1,00	22.321.900,00	1,00	24.096.900,00		
2.23.01.1.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				15.048.900,00		16.104.600,00		17.283.000,00		18.601.500,00		20.080.800,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2,00	2,00	15.048.900,00	2,00	16.104.600,00	2,00	17.283.000,00	2,00	18.601.500,00	2,00	20.080.800,00		
2.23.01.1.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				15.048.900,00		16.104.600,00		17.283.000,00		18.601.500,00		20.080.800,00		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1,00	1,00	15.048.900,00	1,00	16.104.600,00	1,00	17.283.000,00	1,00	18.601.500,00	1,00	20.080.800,00		
2.23.01.1.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				12.039.100,00		12.883.700,00		13.826.400,00		14.881.200,00		16.064.600,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2,00	2,00	12.039.100,00	2,00	12.883.700,00	2,00	13.826.400,00	2,00	14.881.200,00	2,00	16.064.600,00		
2.23.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12.039.150,00		12.883.700,00		13.826.400,00		14.881.300,00		16.064.600,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	12,00	12,00	12.039.150,00	12,00	12.883.700,00	12,00	13.826.400,00	12,00	14.881.300,00	12,00	16.064.600,00		
Laporan Hasil Capaian IKU Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1,00	1,00	9.029.300,00	1,00	9.662.750,00	1,00	10.369.700,00	1,00	11.160.800,00	1,00	12.048.400,00		
2.23.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan				9.029.300,00		9.662.750,00		10.369.700,00		11.160.800,00		12.048.400,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1,00	1,00	9.029.300,00	1,00	9.662.750,00	1,00	10.369.700,00	1,00	11.160.800,00	1,00	12.048.400,00		
Laporan Hasil Nilai Kematangan Statistik Sektoral pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0,00	1,00	111.362.100,00	1,00	119.174.750,00	1,00	127.894.650,00	1,00	137.651.950,00	1,00	148.598.300,00		
	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	0,00	1,00		1,00		1,00		1,00					
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	0,00	1,00		1,00		1,00		1,00					
2.23.01.1.01.0008 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				6.019.600,00		6.441.900,00		6.913.250,00		7.440.700,00		8.032.400,00		
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	0,00	1,00	6.019.600,00	1,00	6.441.900,00	1,00	6.913.250,00	1,00	7.440.700,00	1,00	8.032.400,00		
2.23.01.1.01.0009 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				90.293.600,00		96.628.250,00		103.698.400,00		111.609.650,00		120.485.100,00		
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan	0,00	1,00	90.293.600,00	1,00	96.628.250,00	1,00	103.698.400,00	1,00	111.609.650,00	1,00	120.485.100,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Daerah	Perangkat Daerah (Berita Acara)													
2.23.01.1.01.0010 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				15.048.900,00		16.104.600,00		17.283.000,00		18.601.600,00		20.080.800,00		
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0,00	1,00	15.048.900,00	1,00	16.104.600,00	1,00	17.283.000,00	1,00	18.601.600,00	1,00	20.080.800,00		
2.23.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				15.929.267.069,00		17.046.782.188,00		18.294.061.817,00		19.689.745.701,00		21.255.516.329,00		
Hasil Capaian Realisasi APBD Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1,00	1,00	15.929.267.069,00	1,00	17.046.782.188,00	1,00	18.294.061.817,00	1,00	19.689.745.701,00	1,00	21.255.516.329,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	2,00	2,00		2,00		2,00		2,00		2,00			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	103,00	129,00		132,00		130,00		130,00		130,00			
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	2,00	2,00		2,00		2,00		2,00		2,00			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2,00	2,00		2,00		2,00		2,00		2,00			
2.23.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				15.619.588.341,00		16.402.781.736,00		17.456.393.461,00		18.789.745.077,00		20.367.493.649,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	103,00	129,00	15.619.588.341,00	132,00	16.402.781.736,00	130,00	17.456.393.461,00	130,00	18.789.745.077,00	130,00	20.367.493.649,00		
2.23.01.1.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				77.419.682,00		161.000.113,00		209.417.089,00		225.000.156,00		222.005.670,00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2,00	2,00	77.419.682,00	2,00	161.000.113,00	2,00	209.417.089,00	2,00	225.000.156,00	2,00	222.005.670,00		
2.23.01.1.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				77.419.682,00		161.000.113,00		209.417.089,00		225.000.156,00		222.005.670,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	2,00	2,00	77.419.682,00	2,00	161.000.113,00	2,00	209.417.089,00	2,00	225.000.156,00	2,00	222.005.670,00		
2.23.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				77.419.682,00		161.000.113,00		209.417.089,00		225.000.156,00		222.005.670,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1,00	1,00	77.419.682,00	1,00	161.000.113,00	1,00	209.417.089,00	1,00	225.000.156,00	1,00	222.005.670,00		
2.23.01.1.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				77.419.682,00		161.000.113,00		209.417.089,00		225.000.156,00		222.005.670,00		
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	2,00	2,00	77.419.682,00	2,00	161.000.113,00	2,00	209.417.089,00	2,00	225.000.156,00	2,00	222.005.670,00		
2.23.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				146.211.745,00		156.469.205,00		167.917.750,00		180.728.470,00		195.100.385,00		
Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1,00	1,00	146.211.745,00	1,00	156.469.205,00	1,00	167.917.750,00	1,00	180.728.470,00	1,00	195.100.385,00		
	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	2,00	2,00				2,00		2,00		2,00			
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00			
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	6,00	6,00				6,00		6,00		6,00			
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2,00	2,00				2,00		2,00		2,00			
2.23.01.1.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				29.242.349,00		31.293.841,00		33.583.550,00		36.145.694,00		39.020.077,00		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2,00	2,00	29.242.349,00	2,00	31.293.841,00	2,00	33.583.550,00	2,00	36.145.694,00	2,00	39.020.077,00		
2.23.01.1.03.0003 -				29.242.349,00		31.293.841,00		33.583.550,00		36.145.694,00		39.020.077,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														
Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	2,00	2,00	29.242.349,00	2,00	31.293.841,00	2,00	33.583.550,00	2,00	36.145.694,00	2,00	39.020.077,00		
2.23.01.1.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				29.242.349,00		31.293.841,00		33.583.550,00		36.145.694,00		39.020.077,00		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	6,00	6,00	29.242.349,00	6,00	31.293.841,00	6,00	33.583.550,00	6,00	36.145.694,00	6,00	39.020.077,00		
2.23.01.1.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				29.242.349,00		31.293.841,00		33.583.550,00		36.145.694,00		39.020.077,00		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1,00	1,00	29.242.349,00	1,00	31.293.841,00	1,00	33.583.550,00	1,00	36.145.694,00	1,00	39.020.077,00		
2.23.01.1.03.0007 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				29.242.349,00		31.293.841,00		33.583.550,00		36.145.694,00		39.020.077,00		
Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1,00	1,00	29.242.349,00	1,00	31.293.841,00	1,00	33.583.550,00	1,00	36.145.694,00	1,00	39.020.077,00		
2.23.01.1.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Dokumen Laporan Pengelolaan dan Ketetapan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan dan Ketetapan Retribusi Daerah (Laporan)	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00		
	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah (Dokumen)	1,00	1,00				1,00				1,00			
2.23.01.1.04.0006 - Penetapan Wajib Retribusi Daerah				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah (Dokumen)	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00		
2.23.01.1.04.0007 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00		
2.23.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat				274.879.420,95		292.023.232,09		313.389.999,36		337.299.034,74		364.121.774,18		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Daerah														
Laporan Hasil Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1,00	1,00	135.524.999,95	1,00	142.892.424,51	1,00	153.347.583,03	1,00	165.046.720,81	1,00	178.171.588,45		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang)	60,00	80,00		90,00		100,00		110,00		120,00			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang)	40,00	30,00		25,00		20,00		15,00		15,00			
	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00			
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	60,00	100,00		110,00		120,00		130,00		140,00			
2.23.01.1.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				10.000.000,00		10.701.548,36		11.484.559,67		12.360.735,50		13.343.687,58		
Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	1,00	1,00	10.000.000,00	1,00	10.701.548,36	1,00	11.484.559,67	1,00	12.360.735,50	1,00	13.343.687,58		
2.23.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				25.000.000,00		26.753.870,90		28.711.399,18		30.901.838,76		33.359.218,96		
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1,00	1,00	25.000.000,00	1,00	26.753.870,90	1,00	28.711.399,18	1,00	30.901.838,76	1,00	33.359.218,96		
2.23.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				35.000.000,00		37.455.419,27		40.195.958,85		43.262.574,27		46.702.906,54		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	60,00	100,00	35.000.000,00	110,00	37.455.419,27	120,00	40.195.958,85	130,00	43.262.574,27	140,00	46.702.906,54		
2.23.01.1.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				20.000.000,00		21.403.096,72		22.969.119,34		24.721.471,01		26.687.375,17		
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang)	60,00	80,00	20.000.000,00	90,00	21.403.096,72	100,00	22.969.119,34	110,00	24.721.471,01	120,00	26.687.375,17		
2.23.01.1.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan				45.524.999,95		46.578.489,26		49.986.545,99		53.800.101,27		58.078.400,20		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Perundang-Undangan														
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	40,00	30,00	45.524.999,95	25,00	46.578.489,26	20,00	49.986.545,99	15,00	53.800.101,27	15,00	58.078.400,20		
Laporan Hasil Nilai Survey Implementasi ASN BerAKHLAK	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	2,00	6,00	100.000.000,00	8,00	107.015.483,62	9,00	114.845.596,70	11,00	123.607.355,04	13,00	133.436.875,84		
2.23.01.1.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				100.000.000,00		107.015.483,62		114.845.596,70		123.607.355,04		133.436.875,84		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	2,00	6,00	100.000.000,00	8,00	107.015.483,62	9,00	114.845.596,70	11,00	123.607.355,04	13,00	133.436.875,84		
Laporan Hasil Indeks Reformasi Hukum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	5,00	8,00	39.354.421,00	8,00	42.115.323,96	10,00	45.196.819,63	11,00	48.644.958,89	12,00	52.513.309,89		
2.23.01.1.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				39.354.421,00		42.115.323,96		45.196.819,63		48.644.958,89		52.513.309,89		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	5,00	8,00	39.354.421,00	8,00	42.115.323,96	10,00	45.196.819,63	11,00	48.644.958,89	12,00	52.513.309,89		
2.23.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				572.796.364,00		615.121.108,75		660.128.314,05		710.490.582,43		766.990.310,53		
Laporan Hasil Nilai Kematangan Penerapan SPBE	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2,00	3,00	201.750.000,00	3,00	215.903.738,19	4,00	231.700.991,34	4,00	249.377.838,80	5,00	269.208.896,99		
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2,00	3,00		4,00		4,00		5,00		5,00			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2,00	3,00		4,00		4,00		5,00		5,00			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00			
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis	2,00	5,00		5,00		5,00		5,00		5,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Elektronik pada SKPD (Dokumen)													
2.23.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi				23.000.000,00		24.613.561,23		26.414.487,24		28.429.691,66		30.690.481,44		
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
Tersedianya Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi	1,00	1,00	23.000.000,00	1,00	24.613.561,23	1,00	26.414.487,24	1,00	28.429.691,66	1,00	30.690.481,44		
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)													
2.23.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				85.500.000,00		91.498.238,49		98.192.985,18		105.684.288,56		114.088.528,84		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2,00	3,00	85.500.000,00	4,00	91.498.238,49	4,00	98.192.985,18	5,00	105.684.288,56	5,00	114.088.528,84		
2.23.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				45.750.000,00		48.959.583,75		52.541.860,49		56.550.364,93		61.047.370,69		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2,00	3,00	45.750.000,00	4,00	48.959.583,75	4,00	52.541.860,49	5,00	56.550.364,93	5,00	61.047.370,69		
2.23.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				22.000.000,00		23.543.406,40		25.266.031,27		27.193.618,11		29.356.112,68		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2,00	3,00	22.000.000,00	3,00	23.543.406,40	4,00	25.266.031,27	4,00	27.193.618,11	5,00	29.356.112,68		
2.23.01.1.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				25.500.000,00		27.288.948,32		29.285.627,16		31.519.875,54		34.026.403,34		
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	2,00	5,00	25.500.000,00	5,00	27.288.948,32	5,00	29.285.627,16	5,00	31.519.875,54	5,00	34.026.403,34		
Laporan Hasil Nilai Capaian Pelaksanaan Pembangunan ZI	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	0,00	1,00	20.000.000,00	1,00	23.543.406,40	1,00	25.266.031,27	1,00	27.193.618,11	1,00	29.356.112,68		
2.23.01.1.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				20.000.000,00		23.543.406,40		25.266.031,27		27.193.618,11		29.356.112,68		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	0,00	1,00	20.000.000,00	1,00	23.543.406,40	1,00	25.266.031,27	1,00	27.193.618,11	1,00	29.356.112,68		
Laporan Hasil Tindakan Laporan Pengaduan melalui SP4N Lapor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,00	2,00	305.796.364,00	2,00	327.249.457,82	2,00	351.193.658,93	2,00	377.986.797,36	2,00	408.045.114,54		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
	(Laporan)															
2.23.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				305.796.364,00		327.249.457,82		351.193.658,93		377.986.797,36		408.045.114,54				
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1,00	2,00	305.796.364,00	2,00	327.249.457,82	2,00	351.193.658,93	2,00	377.986.797,36	2,00	408.045.114,54				
Laporan Hasil Penilaian Kualitas Pengelolaan Kearsipan Digital Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0,00	20,00	45.250.000,00	30,00	48.424.506,34	40,00	51.967.632,51	50,00	55.932.328,16	60,00	60.380.186,32				
2.23.01.1.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				45.250.000,00		48.424.506,34		51.967.632,51		55.932.328,16		60.380.186,32				
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0,00	20,00	45.250.000,00	30,00	48.424.506,34	40,00	51.967.632,51	50,00	55.932.328,16	60,00	60.380.186,32				
2.23.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				242.196.491,00		259.187.746,14		278.152.005,29		299.372.676,54		323.179.430,97				
Laporan Hasil Penilaian Kepatuhan Pencatatan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah pada SPSE	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1,00	2,00	242.196.491,00	2,00	259.187.746,14	3,00	278.152.005,29	3,00	299.372.676,54	3,00	323.179.430,97				
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1,00	2,00				2,00				2,00					2,00
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2,00	2,00				2,00				3,00					3,00
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1,00	5,00				5,00				6,00					6,00
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	1,00	1,00				1,00				1,00					1,00
2.23.01.1.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				38.000.000,00		40.665.883,77		43.641.326,75		46.970.794,92		50.706.012,82				
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1,00	2,00	38.000.000,00	2,00	40.665.883,77	2,00	43.641.326,75	2,00	46.970.794,92	2,00	50.706.012,82				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.23.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel				75.500.000,00		80.796.690,13		86.708.425,51		93.323.553,06		100.744.841,26		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	1,00	1,00	75.500.000,00	1,00	80.796.690,13	1,00	86.708.425,51	1,00	93.323.553,06	1,00	100.744.841,26		
2.23.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				65.000.000,00		69.560.064,35		74.649.637,86		80.344.780,78		86.733.969,29		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2,00	2,00	65.000.000,00	2,00	69.560.064,35	3,00	74.649.637,86	3,00	80.344.780,78	3,00	86.733.969,29		
2.23.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				45.525.000,00		48.718.798,92		52.283.457,90		56.272.248,38		60.747.137,72		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1,00	5,00	45.525.000,00	5,00	48.718.798,92	6,00	52.283.457,90	6,00	56.272.248,38	6,00	60.747.137,72		
2.23.01.1.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				18.171.491,00		19.446.308,97		20.869.157,27		22.461.299,40		24.247.469,88		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1,00	2,00	18.171.491,00	2,00	19.446.308,97	3,00	20.869.157,27	3,00	22.461.299,40	3,00	24.247.469,88		
2.23.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.176.478.746,00		1.259.014.419,67		1.351.134.035,93		1.454.214.260,57		1.569.856.483,52		
Laporan Hasil Penilaian Pengukuran Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1,00	1,00	271.978.746,00	1,00	291.059.370,36	1,00	312.355.613,75	1,00	336.185.734,21	1,00	362.919.941,59		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1,00	1,00				2,00				2,00			
2.23.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				265.000.000,00		283.591.031,58		304.340.831,26		327.559.490,86		353.607.720,96		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1,00	1,00	265.000.000,00	1,00	283.591.031,58	1,00	304.340.831,26	1,00	327.559.490,86	1,00	353.607.720,96		
2.23.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan				6.978.746,00		7.468.338,78		8.014.782,49		8.626.243,35		9.312.220,63		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Perengkapan Kantor														
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1,00	1,00	6.978.746,00	2,00	7.468.338,78	2,00	8.014.782,49	3,00	8.626.243,35	3,00	9.312.220,63		
Laporan Penilaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Aplikasi SKM Terintegrasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1,00	1,00	904.500.000,00	1,00	967.955.049,31	1,00	1.038.778.422,18	1,00	1.118.028.526,36	1,00	1.206.936.541,93		
2.23.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				904.500.000,00		967.955.049,31		1.038.778.422,18		1.118.028.526,36		1.206.936.541,93		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1,00	1,00	904.500.000,00	1,00	967.955.049,31	1,00	1.038.778.422,18	1,00	1.118.028.526,36	1,00	1.206.936.541,93		
2.23.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				465.483.208,00		498.139.106,14		534.586.967,72		575.371.481,52		621.126.250,23		
Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Ketentuan	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	1,00	1,00	465.483.208,00	1,00	498.139.106,14	1,00	534.586.967,72	1,00	575.371.481,52	1,00	621.126.250,23		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	10,00	15,00				15,00				15,00			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1,00	1,00				1,00				1,00			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10,00	15,00				15,00				15,00			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	10,00	15,00				15,00				15,00			
2.23.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				185.000.000,00		197.978.644,69		212.464.353,90		228.673.606,83		246.858.220,29		
Tersedianya Jasa	Jumlah Kendaraan	10,00	15,00	185.000.000,00	15,00	197.978.644,69	15,00	212.464.353,90	15,00	228.673.606,83	15,00	246.858.220,29		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)													
2.23.01.1.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				75.500.000,00		80.796.690,13		86.708.425,51		93.323.553,06		100.744.841,26		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	1,00	1,00	75.500.000,00	1,00	80.796.690,13	1,00	86.708.425,51	1,00	93.323.553,06	1,00	100.744.841,26		
2.23.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				75.000.000,00		80.261.612,71		86.134.197,53		92.705.516,28		100.077.656,88		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10,00	15,00	75.000.000,00	15,00	80.261.612,71	15,00	86.134.197,53	15,00	92.705.516,28	15,00	100.077.656,88		
2.23.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				74.483.208,00		79.708.565,20		85.540.684,61		92.066.723,30		99.388.065,71		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1,00	1,00	74.483.208,00	1,00	79.708.565,20	1,00	85.540.684,61	1,00	92.066.723,30	1,00	99.388.065,71		
2.23.01.1.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				55.500.000,00		59.393.593,41		63.739.306,17		68.602.082,05		74.057.466,09		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	10,00	15,00	55.500.000,00	15,00	59.393.593,41	15,00	63.739.306,17	15,00	68.602.082,05	15,00	74.057.466,09		
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				2.046.954.437,00		2.190.558.189,79		2.350.837.037,43		2.530.186.238,35		2.731.392.051,49		
Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (%)	67,48	70,00	2.046.954.437,00	72,00	2.190.558.189,79	74,00	2.350.837.037,43	76,00	2.530.186.238,35	78,00	2.731.392.051,49	2.23.2.24.0.00.01.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah	
	Persentase perpustakaan SMA dan SMK yang terstandarisasi dan terakreditasi (%)	2,83	347,00		3,86		4,12		4,50		4,76			
2.23.02.1.01 - Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi				864.942.701,00		925.622.613,79		993.348.605,43		1.069.132.794,35		1.154.152.515,49		
Jumlah perpustakaan yang berSNP	Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di	0,00	1,00	72.078.558,00	1,00	84.147.513,79	1,00	90.304.415,43	1,00	97.193.894,35	1,00	104.922.955,49		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	wilayah provinsi sesuai kewenangannya (Perpustakaan)													
2.23.02.1.01.0002 - Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi				72.078.558,00		84.147.513,79		90.304.415,43		97.193.894,35		104.922.955,49		
Terlaksananya Pengembangan Perpustakaan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya	Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya (Perpustakaan)	0,00	1,00	72.078.558,00	1,00	84.147.513,79	1,00	90.304.415,43	1,00	97.193.894,35	1,00	104.922.955,49		
Jumlah perpustakaan yang dibina di satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus di seluruh wilayah provinsi sulawesi tengah	Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khusus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan)	13,00	13,00	72.078.558,00	13,00	84.147.510,00	13,00	90.304.419,00	13,00	97.193.890,00	13,00	104.922.956,00		
2.23.02.1.01.0004 - Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan				72.078.558,00		84.147.510,00		90.304.419,00		97.193.890,00		104.922.956,00		
Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah dan Pendidikan khusus di seluruh wilayah provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khusus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan)	13,00	13,00	72.078.558,00	13,00	84.147.510,00	13,00	90.304.419,00	13,00	97.193.890,00	13,00	104.922.956,00		
Jumlah tenaga perpustakaan dan pustakawan yang tersertifikasi	Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi (Orang)	55,00	55,00	72.078.558,00	55,00	84.147.510,00	55,00	90.304.419,00	55,00	97.193.890,00	55,00	104.922.956,00		
2.23.02.1.01.0006 - Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi				72.078.558,00		84.147.510,00		90.304.419,00		97.193.890,00		104.922.956,00		
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Sertifikasi Tenaga	Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan	55,00	55,00	72.078.558,00	55,00	84.147.510,00	55,00	90.304.419,00	55,00	97.193.890,00	55,00	104.922.956,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi (Orang)													
Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan provinsi	Jumlah Perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan provinsi dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan (Perpustakaan)	1,00	1,00	72.078.558,00	1,00	84.147.510,00	1,00	90.304.419,00	1,00	97.193.890,00	1,00	104.922.956,00		
2.23.02.1.01.0017 - Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Provinsi				72.078.558,00		84.147.510,00		90.304.419,00		97.193.890,00		104.922.956,00		
Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan umum dan khusus sesuai Kewenangan Provinsi dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan provinsi dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan (Perpustakaan)	1,00	1,00	72.078.558,00	1,00	84.147.510,00	1,00	90.304.419,00	1,00	97.193.890,00	1,00	104.922.956,00		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perpustakaan	Capaian Tingkat Gemar Membaca Masyarakat Tingkat Propinsi (Nilai)	67,48	69,50	275.344.863,00	71,59	252.442.530,00	73,74	270.913.257,00	75,95	291.581.670,00	78,23	314.768.868,00		
	Jumlah kerjasama peningkatan Kegemaran Membaca dan literasi (Dokumen)	0,00	13,00		16,00		20,00		25,00		31,00			
	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang Dikembangkan Melalui Peningkatan Koleksi (Layanan)	13,00	13,00		13,00		13,00		13,00		13,00			
2.23.02.1.01.0007 - Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				91.781.621,00		84.147.510,00		90.304.419,00		97.193.890,00		104.922.956,00		
Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Melalui Peningkatan Koleksi	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang Dikembangkan Melalui Peningkatan Koleksi (Layanan)	13,00	13,00	91.781.621,00	13,00	84.147.510,00	13,00	90.304.419,00	13,00	97.193.890,00	13,00	104.922.956,00		
2.23.02.1.01.0012 - Pengukuran Tingkat Gemar Membaca Masyarakat Tingkat Propinsi				91.781.621,00		84.147.510,00		90.304.419,00		97.193.890,00		104.922.956,00		
Terlaksananya Pengukuran Tingkat Gemar Membaca	Capaian Tingkat Gemar Membaca Masyarakat Tingkat	67,48	69,50	91.781.621,00	71,59	84.147.510,00	73,74	90.304.419,00	75,95	97.193.890,00	78,23	104.922.956,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Masyarakat Tingkat Propinsi	Propinsi (Nilai)													
2.23.02.1.01.0014 - Kerjasama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi				91.781.621,00		84.147.510,00		90.304.419,00		97.193.890,00		104.922.956,00		
Terlaksananya kerjasama peningkatan Kegemaran Membaca dan literasi	Jumlah kerjasama peningkatan Kegemaran Membaca dan literasi (Dokumen)	0,00	13,00	91.781.621,00	16,00	84.147.510,00	20,00	90.304.419,00	25,00	97.193.890,00	31,00	104.922.956,00		
Meningkatnya Pelayanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK (Perpustakaan)	4,00	5,00	183.563.242,00	6,00	168.295.020,00	7,00	180.608.838,00	8,00	194.387.780,00	9,00	209.845.912,00		
	Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat (Dokumen)	0,00	1,00				1,00				1,00			
2.23.02.1.01.0011 - Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat				91.781.621,00		84.147.510,00		90.304.419,00		97.193.890,00		104.922.956,00		
Terlaksananya Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat (Dokumen)	0,00	1,00	91.781.621,00	1,00	84.147.510,00	1,00	90.304.419,00	1,00	97.193.890,00	1,00	104.922.956,00		
2.23.02.1.01.0015 - Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik				91.781.621,00		84.147.510,00		90.304.419,00		97.193.890,00		104.922.956,00		
Terlaksananya Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik dengan Manajemen Layanan TIK	Jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK (Perpustakaan)	4,00	5,00	91.781.621,00	6,00	84.147.510,00	7,00	90.304.419,00	8,00	97.193.890,00	9,00	104.922.956,00		
Jumlah koleksi perpustakaan khas daerah	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan (Eksemplar)	0,00	100,00	45.641.806,00	130,00	84.147.510,00	160,00	90.304.419,00	190,00	97.193.890,00	200,00	104.922.956,00		
2.23.02.1.01.0009 - Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka				45.641.806,00		84.147.510,00		90.304.419,00		97.193.890,00		104.922.956,00		
Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Provinsi untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	0,00	100,00	45.641.806,00	130,00	84.147.510,00	160,00	90.304.419,00	190,00	97.193.890,00	200,00	104.922.956,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	(Eksemplar)													
Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan (Dokumen)		1,00	72.078.558,00	1,00	84.147.510,00	1,00	90.304.419,00	1,00	97.193.890,00	1,00	104.922.956,00		
2.23.02.1.01.0016 - Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan				72.078.558,00		84.147.510,00		90.304.419,00		97.193.890,00		104.922.956,00		
Terlaksananya Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan (Dokumen)		1,00	72.078.558,00	1,00	84.147.510,00	1,00	90.304.419,00	1,00	97.193.890,00	1,00	104.922.956,00		
2.23.02.1.02 - Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi				1.182.011.736,00		1.264.935.576,00		1.357.488.432,00		1.461.053.444,00		1.577.239.536,00		
Jumlah Perangkat Desa/Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Budaya Baca	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus (Lokus)	0,00	1,00	295.502.934,00	1,00	316.233.894,00	1,00	339.372.108,00	1,00	365.263.361,00	1,00	394.309.884,00		
2.23.02.1.02.0001 - Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat				295.502.934,00		316.233.894,00		339.372.108,00		365.263.361,00		394.309.884,00		
Meningkatnya Keterlibatan Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus dalam Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus (Lokus)	0,00	1,00	295.502.934,00	1,00	316.233.894,00	1,00	339.372.108,00	1,00	365.263.361,00	1,00	394.309.884,00		
Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca (Orang)	0,00	7,00	295.502.934,00	7,00	316.233.894,00	7,00	339.372.108,00	7,00	365.263.361,00	7,00	394.309.884,00		
2.23.02.1.02.0003 - Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca				295.502.934,00		316.233.894,00		339.372.108,00		365.263.361,00		394.309.884,00		
Terlaksananya Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca (Orang)	0,00	7,00	295.502.934,00	7,00	316.233.894,00	7,00	339.372.108,00	7,00	365.263.361,00	7,00	394.309.884,00		
Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan	Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan (Perpustakaan)	0,00	11,00	295.502.934,00	11,00	316.233.894,00	11,00	339.372.108,00	11,00	365.263.361,00	11,00	394.309.884,00		
2.23.02.1.02.0004 - Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial				295.502.934,00		316.233.894,00		339.372.108,00		365.263.361,00		394.309.884,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi	Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan (Perpustakaan)	0,00	11,00	295.502.934,00	11,00	316.233.894,00	11,00	339.372.108,00	11,00	365.263.361,00	11,00	394.309.884,00		
Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi yang dipilih dan didukung kegiatannya (Orang)	0,00	1,00	295.502.934,00	1,00	316.233.894,00	1,00	339.372.108,00	1,00	365.263.361,00	1,00	394.309.884,00		
2.23.02.1.02.0006 - Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi				295.502.934,00		316.233.894,00		339.372.108,00		365.263.361,00		394.309.884,00		
Terlaksananya Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi yang dipilih dan didukung kegiatannya (Orang)	0,00	1,00	295.502.934,00	1,00	316.233.894,00	1,00	339.372.108,00	1,00	365.263.361,00	1,00	394.309.884,00		
2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO				387.764.229,00		414.967.764,88		445.330.142,60		479.305.107,24		517.420.472,97		
Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dimiliki (%)	81,11	84,39	387.764.229,00	86,08	414.967.764,88	87,80	445.330.142,60	89,55	479.305.107,24	91,34	517.420.472,97	2.23.2.24.0.00.01.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah	
2.23.03.1.01 - Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi				111.898.568,00		119.748.794,88		128.510.578,60		138.314.860,24		149.313.953,97		
Jumlah eksemplar koleksi cetak dan karya rekam	Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR (Eksemplar)	100,00	144,00	100.708.711,00	172,00	107.773.915,88	207,00	115.659.520,60	248,00	124.483.374,24	299,00	134.382.558,97		
2.23.03.1.01.0001 - Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam				100.708.711,00		107.773.915,88		115.659.520,60		124.483.374,24		134.382.558,97		
Terlaksananya Penghimpunan dan Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam Serta Peningkatan Kepatuhan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR (Eksemplar)	100,00	144,00	100.708.711,00	172,00	107.773.915,88	207,00	115.659.520,60	248,00	124.483.374,24	299,00	134.382.558,97		
Jumlah penerbit dan produsen yang diberikan penghargaan	Jumlah Penerima Penghargaan Kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif Dalam	0,00	6,00	11.189.857,00	6,00	11.974.879,00	6,00	12.851.058,00	6,00	13.831.486,00	6,00	14.931.395,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Penerbit)													
2.23.03.1.01.0002 - Pemberian Penghargaan kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam				11.189.857,00		11.974.879,00		12.851.058,00		13.831.486,00		14.931.395,00		
Terlaksananya Pemberian Penghargaan Kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif Dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah Penerima Penghargaan Kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif Dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Penerbit)	0,00	6,00	11.189.857,00	6,00	11.974.879,00	6,00	12.851.058,00	6,00	13.831.486,00	6,00	14.931.395,00		
2.23.03.1.02 - Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah				38.776.423,00		41.496.776,00		44.533.014,00		47.930.511,00		51.742.047,00		
Jumlah buku katalog induk daerah yang diterbitkan	Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder Lainnya yang Diterbitkan (Entry)	0,00	200,00	19.388.212,00	200,00	20.748.388,00	200,00	22.266.507,00	200,00	23.965.256,00	200,00	25.871.024,00		
2.23.03.1.02.0001 - Penerbitan Katalog Induk Daerah				19.388.212,00		20.748.388,00		22.266.507,00		23.965.256,00		25.871.024,00		
Terlaksananya Penerbitan Katalog Induk Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder Lainnya yang Diterbitkan (Entry)	0,00	200,00	19.388.212,00	200,00	20.748.388,00	200,00	22.266.507,00	200,00	23.965.256,00	200,00	25.871.024,00		
Jumlah buku bibliografi daerah yang diterbitkan	Jumlah Bibliografi Daerah yang Diterbitkan (Naskah)	0,00	20,00	19.388.211,00	20,00	20.748.388,00	20,00	22.266.507,00	20,00	23.965.255,00	20,00	25.871.023,00		
2.23.03.1.02.0002 - Penerbitan Bibliografi Daerah				19.388.211,00		20.748.388,00		22.266.507,00		23.965.255,00		25.871.023,00		
Terlaksananya Penerbitan Bibliografi Daerah Provinsi	Jumlah Bibliografi Daerah yang Diterbitkan (Naskah)	0,00	20,00	19.388.211,00	20,00	20.748.388,00	20,00	22.266.507,00	20,00	23.965.255,00	20,00	25.871.023,00		
2.23.03.1.03 - Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi				56.927.157,00		60.920.872,00		65.378.333,00		70.366.153,00		75.961.820,00		
Jumlah eksemplar koleksi naskah kuno yang diolah dan dialihmediakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan (Eksemplar)	0,00	3,00	14.231.789,00	3,00	15.230.218,00	3,00	16.344.583,00	3,00	17.591.538,00	3,00	18.990.455,00		
2.23.03.1.03.0003 - Pengembangan, Pengolahan dan				14.231.789,00		15.230.218,00		16.344.583,00		17.591.538,00		18.990.455,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan														
Terlaksananya Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki Oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan (Eksemplar)	0,00	3,00	14.231.789,00	3,00	15.230.218,00	3,00	16.344.583,00	3,00	17.591.538,00	3,00	18.990.455,00		
Terpenuhinya penyimpanan , perawatan dan pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno (Orang)	70,00	84,00	42.695.368,00	93,00	45.690.654,00	102,00	49.033.750,00	113,00	52.774.615,00	124,00	56.971.365,00		
2.23.03.1.03.0004 - Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno				42.695.368,00		45.690.654,00		49.033.750,00		52.774.615,00		56.971.365,00		
Meningkatnya Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno (Orang)	70,00	84,00	42.695.368,00	93,00	45.690.654,00	102,00	49.033.750,00	113,00	52.774.615,00	124,00	56.971.365,00		
2.23.03.1.04 - Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi				180.162.081,00		192.801.322,00		206.908.217,00		222.693.583,00		240.402.652,00		
Terpenuhinya jumlah Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diseleksi dan Dilakukan Pengadaan Oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi (Eksemplar)	1.000,00	1.210,00	117.105.352,00	1.331,00	125.320.859,00	1.464,00	134.490.341,00	1.611,00	144.750.829,00	1.772,00	156.261.724,00		
2.23.03.1.04.0001 - Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara				117.105.352,00		125.320.859,00		134.490.341,00		144.750.829,00		156.261.724,00		
Terlaksananya Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara Oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diseleksi dan Dilakukan Pengadaan Oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi (Eksemplar)	1.000,00	1.210,00	117.105.352,00	1.331,00	125.320.859,00	1.464,00	134.490.341,00	1.611,00	144.750.829,00	1.772,00	156.261.724,00		
Terpenuhinya Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang dilakukan	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diolah dan Dilakukan	1,00	1,21	63.056.729,00	1,33	67.480.463,00	1,46	72.417.876,00	1,61	77.942.754,00	1,77	84.140.928,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
pengolahan dan penyiangan	penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi (Eksemplar)													
2.23.03.1.04.0002 - Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara				63.056.729,00		67.480.463,00		72.417.876,00		77.942.754,00		84.140.928,00		
Terlaksananya Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diolah dan Dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi (Eksemplar)	1,00	1,21	63.056.729,00	1,33	67.480.463,00	1,46	72.417.876,00	1,61	77.942.754,00	1,77	84.140.928,00		
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				1.341.213.864,00		1.435.306.502,65		1.540.325.065,18		1.657.838.982,65		1.789.673.879,04		
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP				929.224.243,00		994.413.817,36		1.067.173.126,59		1.148.589.509,12		1.239.927.799,81		
Meningkatnya kualitas pengelolaan Arsip Perangkat Daerah	Persentase Prangkat daerah yang memiliki tata kelola kearsipan sesuai standar (%)	8,33	14,58	929.224.243,00	18,75	994.413.817,36	22,92	1.067.173.126,59	27,08	1.148.589.509,12	31,25	1.239.927.799,81	2.23.2.24.0.00.01.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah	
	Tingkat ketersediaan arsip yang dikelola (Nilai)	170,36	171,41		171,94		172,46		172,99		173,51			
2.24.02.1.01 - Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi				601.529.840,00		643.729.726,47		690.830.168,37		743.534.731,36		802.662.201,09		
Pembinaan Kearsipan Kewenangan Provinsi	Jumlah OPD, BUMD dan SDM Kearsipan yang mendapatkan penghargaan Tertib Arsip (Lembaga)	0,00	5,00	601.529.840,00	6,00	643.729.726,47	6,00	690.830.168,37	6,00	743.534.731,36	6,00	802.662.201,09		
	Jumlah OPD dan BUMD yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan (Lembaga)	61,00	61,00		61,00		61,00		61,00		61,00			
	Jumlah ORMAS, ORPOL, OPD/BUMD yang telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis (Instansi)	87,00	87,00		87,00		87,00		87,00		87,00			
	Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan arsip statis (Unit)	10,00	15,00		17,00		20,00		23,00		25,00			
	Jumlah arsiparis (Dokumen)	0,00	1,00		2,00		3,00		4,00		5,00			
	Jumlah arsiparis yang memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan kearsipan yang diusulkan untuk mengikuti kegiatan pemilihan arsiparis teladan (Orang)	0,00	30,00		35,00		40,00		45,00		50,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah arsip dinamis yang telah disusutkan (Arsip)	350,00	500,00		600,00		700,00		800,00		1.000,00			
	Jumlah Arsip yang di Alih Mediakan dan diautentikasi (Arsip)	350,00	450,00		500,00		600,00		700,00		800,00			
	Jumlah Daftar Arsip Dinamis (Arsip)	350,00	500,00		600,00		700,00		800,00		1.000,00			
	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan (Laporan)	0,00	10,00		20,00		35,00		45,00		61,00			
2.24.02.1.01.0004 - Penyusutan Arsip Dinamis				50.000.905,00		53.507.795,93		57.422.856,45		61.803.740,06		66.718.505,46		
Terlaksananya Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah arsip dinamis yang telah disusutkan (Arsip)	350,00	500,00	50.000.905,00	600,00	53.507.795,93	700,00	57.422.856,45	800,00	61.803.740,06	1.000,00	66.718.505,46		
2.24.02.1.01.0005 - Pelaksanaan Alih Media Arsip Dinamis dan Autentikasi				50.000.000,00		53.507.793,80		57.422.854,15		61.803.737,58		66.718.502,78		
Terlaksananya Alih Media Arsip dan Autentikasi	Jumlah Arsip yang di Alih Mediakan dan diautentikasi (Arsip)	350,00	450,00	50.000.000,00	500,00	53.507.793,80	600,00	57.422.854,15	700,00	61.803.737,58	800,00	66.718.502,78		
2.24.02.1.01.0006 - Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis				90.611.935,00		96.968.894,67		104.063.918,56		112.003.125,04		120.909.852,74		
Terciptanya dan Terpeliharanya Arsip Dinamis	Jumlah Daftar Arsip Dinamis (Arsip)	350,00	500,00	90.611.935,00	600,00	96.968.894,67	700,00	104.063.918,56	800,00	112.003.125,04	1.000,00	120.909.852,74		
2.24.02.1.01.0007 - Pemilihan Arsiparis Teladan				33.000.000,00		35.315.143,91		37.899.083,74		40.790.466,80		44.034.211,83		
Terlaksananya pemilihan arsiparis teladan	Jumlah arsiparis yang memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan kearsipan yang diusulkan untuk mengikuti kegiatan pemilihan arsiparis teladan (Orang)	0,00	30,00	33.000.000,00	35,00	35.315.143,91	40,00	37.899.083,74	45,00	40.790.466,80	50,00	44.034.211,83		
2.24.02.1.01.0008 - Pembinaan Kearsipan kewenangan Provinsi				120.000.000,00		128.418.705,11		137.814.849,97		148.328.970,18		160.124.406,67		
Terlaksananya Implementasi Pengelolaan Arsip Dinamis pada ORMAS, ORPOL, OPD/SKPD, BUMD	Jumlah ORMAS, ORPOL, OPD/BUMD yang telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis (Instansi)	87,00	87,00	120.000.000,00	87,00	128.418.705,11	87,00	137.814.849,97	87,00	148.328.970,18	87,00	160.124.406,67		
2.24.02.1.01.0009 - Penyusunan Database Arsiparis				4.400.000,00		4.708.685,85		5.053.211,17		5.438.728,91		5.871.228,24		
Terlaksananya penyusunan data dan informasi arsiparis	Jumlah arsiparis (Dokumen)	0,00	1,00	4.400.000,00	2,00	4.708.685,85	3,00	5.053.211,17	4,00	5.438.728,91	5,00	5.871.228,24		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.24.02.1.01.0010 - Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Arsip Statis				50.000.000,00		53.507.793,80		57.422.854,15		61.803.737,58		66.718.502,78		
Tersedianya prasarana dan sarana pengelolaan arsip statis	Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan arsip statis (Unit)	10,00	15,00	50.000.000,00	17,00	53.507.793,80	20,00	57.422.854,15	23,00	61.803.737,58	25,00	66.718.502,78		
2.24.02.1.01.0011 - Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi				33.000.000,00		35.315.143,91		37.899.083,74		40.790.466,80		44.034.211,83		
Terlaksananya monitoring dan evaluasi	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaran kearsipan (Laporan)	0,00	10,00	33.000.000,00	20,00	35.315.143,91	35,00	37.899.083,74	45,00	40.790.466,80	61,00	44.034.211,83		
2.24.02.1.01.0012 - Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi				164.000.000,00		175.505.563,65		188.346.961,63		202.716.259,25		218.836.689,11		
Terselenggaranya Pengawasan kearsipan pada OPD provinsi dan BUMD provinsi	Jumlah OPD dan BUMD yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan (Lembaga)	61,00	61,00	164.000.000,00	61,00	175.505.563,65	61,00	188.346.961,63	61,00	202.716.259,25	61,00	218.836.689,11		
2.24.02.1.01.0013 - Pemberian Penghargaan Gerakan Sadar Tertib Arsip				6.517.000,00		6.974.205,84		7.484.494,81		8.055.499,16		8.696.089,65		
Terlaksananya pemberian penghargaan Gerakan Sadar Tertib Arsip	Jumlah OPD, BUMD dan SDM Kearsipan yang mendapatkan penghargaan Tertib Arsip (Lembaga)	0,00	5,00	6.517.000,00	6,00	6.974.205,84	6,00	7.484.494,81	6,00	8.055.499,16	6,00	8.696.089,65		
2.24.02.1.02 - Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi				95.388.343,00		102.080.395,76		109.549.418,17		117.907.122,36		127.283.348,53		
Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	Jumlah Orang yang diwawancarai (Orang)	25,00	35,00	95.388.343,00	40,00	102.080.395,76	45,00	109.549.418,17	50,00	117.907.122,36	55,00	127.283.348,53		
	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang dikumpulkan dan Disampaikan Kepada ANRI (Arsip)	7,00	10,00		15,00		20,00		25,00		30,00			
	Jumlah penerbitan naskah sumber Arsip (Arsip)	200,00	300,00		350,00		400,00		450,00		500,00			
	jumlah arsip yang di akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis di Provinsi (Arsip)	250,00	350,00		400,00		450,00		500,00		600,00			
	Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi (Arsip)	250,00	350,00		400,00		450,00		500,00		600,00			
2.24.02.1.02.0001 -				45.388.343,00		48.572.601,96		52.126.564,01		56.103.384,80		60.564.845,77		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI															
Terlaksananya Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang dikumpulkan dan Disampaikan Kepada ANRI (Arsip)	7,00	10,00	45.388.343,00	15,00	48.572.601,96	20,00	52.126.564,01	25,00	56.103.384,80	30,00	60.564.845,77			
2.24.02.1.02.0003 - Pengembangan Khazanah Arsip Statis Melalui Wawancara Sejarah Lisan				12.500.000,00		13.376.948,45		14.355.713,54		15.450.934,39		16.679.625,69			
Terlaksananya Pengembangan Khazanah Arsip Statis Melalui Wawancara Sejarah Lisan	Jumlah Orang yang diwawancarai (Orang)	25,00	35,00	12.500.000,00	40,00	13.376.948,45	45,00	14.355.713,54	50,00	15.450.934,39	55,00	16.679.625,69			
2.24.02.1.02.0004 - Pengembangan Khazanah Arsip Statis melalui Penerbitan naskah sumber Arsip				12.500.000,00		13.376.948,45		14.355.713,54		15.450.934,39		16.679.625,69			
Terlaksananya Pengembangan Khazanah Arsip Statis melalui Penerbitan naskah sumber Arsip	Jumlah penerbitan naskah sumber Arsip (Arsip)	200,00	300,00	12.500.000,00	350,00	13.376.948,45	400,00	14.355.713,54	450,00	15.450.934,39	500,00	16.679.625,69			
2.24.02.1.02.0005 - Akuisisi Arsip Statis				12.500.000,00		13.376.948,45		14.355.713,54		15.450.934,39		16.679.625,69			
Terlaksananya Akuisisi Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi (Arsip)	250,00	350,00	12.500.000,00	400,00	13.376.948,45	450,00	14.355.713,54	500,00	15.450.934,39	600,00	16.679.625,69			
2.24.02.1.02.0006 - Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis				12.500.000,00		13.376.948,45		14.355.713,54		15.450.934,39		16.679.625,69			
terlaksananya akuisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis di Provinsi	jumlah arsip yang di akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis di Provinsi (Arsip)	250,00	350,00	12.500.000,00	400,00	13.376.948,45	450,00	14.355.713,54	500,00	15.450.934,39	600,00	16.679.625,69			
2.24.02.1.03 - Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi				232.306.060,00		248.603.695,13		266.793.540,05		287.147.655,40		309.982.250,19			
Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN (Pengguna)	5,00	10,00	232.306.060,00	15,00	248.603.695,13	20,00	266.793.540,05	25,00	287.147.655,40	30,00	309.982.250,19			
	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan	1,00	1,00				1,00				2,00				2,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Daerah Provinsi (Laporan)													
2.24.02.1.03.0001 - Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN				182.306.060,00		195.095.901,33		209.370.685,90		225.343.917,82		243.263.747,41		
Terlaksananya Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN (Pengguna)	5,00	10,00	182.306.060,00	15,00	195.095.901,33	20,00	209.370.685,90	25,00	225.343.917,82	30,00	243.263.747,41		
2.24.02.1.03.0002 - Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi				50.000.000,00		53.507.793,80		57.422.854,15		61.803.737,58		66.718.502,78		
Terlaksananya Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi (Laporan)	1,00	1,00	50.000.000,00	1,00	53.507.793,80	1,00	57.422.854,15	2,00	61.803.737,58	2,00	66.718.502,78		
2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP				128.225.764,00		137.221.421,44		147.261.643,79		158.496.475,35		171.100.453,56		
Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Persentase cakupan perlindungan dan penyelamatan arsip (%)	1,46	1,88	128.225.764,00	2,01	137.221.421,44	2,15	147.261.643,79	2,29	158.496.475,35	2,43	171.100.453,56	2.23.2.24.0.00.01.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah	
2.24.03.1.01 - Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun				39.050.760,00		41.790.359,94		44.848.078,59		48.269.612,05		52.108.114,66		
Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan (Berkas)	1,00	1,00	39.050.760,00	1,00	41.790.359,94	1,00	44.848.078,59	1,00	48.269.612,05	1,00	52.108.114,66		
	Jumlah Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun (Arsip)	17,00	20,00				23,00				25,00			27,00
2.24.03.1.01.0003 - Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun				9.000.000,00		9.631.393,50		10.336.103,70		11.124.661,90		12.009.318,80		
Terlaksananya Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun yang	1,00	1,00	9.000.000,00	1,00	9.631.393,50	1,00	10.336.103,70	1,00	11.124.661,90	1,00	12.009.318,80		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN				
			2026		2027		2028		2029		2030							
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU						
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)				
10 Tahun	Dimusnahkan (Berkas)																	
2.24.03.1.01.0004 - Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun				30.050.760,00		32.158.966,44		34.511.974,89		37.144.950,15		40.098.795,86						
Tersusunnya Daftar Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun (Arsip)	17,00	20,00	30.050.760,00	23,00	32.158.966,44	25,00	34.511.974,89	27,00	37.144.950,15	30,00	40.098.795,86						
2.24.03.1.02 - Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi				20.941.891,00		22.411.065,90		24.050.839,60		25.885.717,50		27.944.205,10						
Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi	Jumlah Arsip yang dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana (Arsip)	250,00	350,00	20.941.891,00	400,00	22.411.065,90	450,00	24.050.839,60	500,00	25.885.717,50	600,00	27.944.205,10						
2.24.03.1.02.0002 - Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana				20.941.891,00		22.411.065,90		24.050.839,60		25.885.717,50		27.944.205,10						
Terlaksananya Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana (Arsip)	250,00	350,00	20.941.891,00	400,00	22.411.065,90	450,00	24.050.839,60	500,00	25.885.717,50	600,00	27.944.205,10						
2.24.03.1.03 - Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota				17.532.523,00		18.762.514,20		20.135.330,50		21.671.487,80		23.394.850,80						
Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi (Arsip)	200,00	300,00	17.532.523,00	350,00	18.762.514,20	400,00	20.135.330,50	450,00	21.671.487,80	500,00	23.394.850,80						
	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota (Arsip)	30,00	40,00				45,00				50,00				55,00		60,00	
	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta	1,00	1,00				1,00				1,00				1,00		1,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi (Daftar)													
2.24.03.1.03.0001 - Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi				5.844.177,00		6.254.174,20		6.711.779,90		7.223.832,60		7.798.287,20		
Terkelolanya Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi (Daftar)	1,00	1,00	5.844.177,00	1,00	6.254.174,20	1,00	6.711.779,90	1,00	7.223.832,60	1,00	7.798.287,20		
2.24.03.1.03.0002 - Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi				5.844.173,00		6.254.170,00		6.711.775,30		7.223.827,60		7.798.281,80		
Terkelolanya Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi (Arsip)	200,00	300,00	5.844.173,00	350,00	6.254.170,00	400,00	6.711.775,30	450,00	7.223.827,60	500,00	7.798.281,80		
2.24.03.1.03.0003 - Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota				5.844.173,00		6.254.170,00		6.711.775,30		7.223.827,60		7.798.281,80		
Terlaksananya Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota (Arsip)	30,00	40,00	5.844.173,00	45,00	6.254.170,00	50,00	6.711.775,30	55,00	7.223.827,60	60,00	7.798.281,80		
2.24.03.1.04 - Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi				37.878.014,00		40.535.339,80		43.501.231,20		46.820.011,20		50.543.238,40		
Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan Sesuai Persyaratan Penjaminan	7,00	10,00	37.878.014,00	15,00	40.535.339,80	20,00	43.501.231,20	25,00	46.820.011,20	30,00	50.543.238,40		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Keabsahan Arsip (Arsip)													
	Jumlah Daftar Arsip yang dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip (Arsip)	10,00	15,00		20,00		25,00		30,00		35,00			
2.24.03.1.04.0001 - Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip				18.939.007,00		20.267.669,90		21.750.615,60		23.410.005,60		25.271.619,20		
Terlaksananya Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip (Arsip)	7,00	10,00	18.939.007,00	15,00	20.267.669,90	20,00	21.750.615,60	25,00	23.410.005,60	30,00	25.271.619,20		
2.24.03.1.04.0002 - Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip				18.939.007,00		20.267.669,90		21.750.615,60		23.410.005,60		25.271.619,20		
Terlaksananya Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip (Arsip)	10,00	15,00	18.939.007,00	20,00	20.267.669,90	25,00	21.750.615,60	30,00	23.410.005,60	35,00	25.271.619,20		
2.24.03.1.05 - Pencarian Arsip Statis Provinsi yang Dinyatakan Hilang				12.822.576,00		13.722.141,60		14.726.163,90		15.849.646,80		17.110.044,60		
Pencarian Arsip Statis Provinsi yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang (Arsip)	5,00	7,00	12.822.576,00	10,00	13.722.141,60	12,00	14.726.163,90	15,00	15.849.646,80	17,00	17.110.044,60		
	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman (Arsip)	5,00	7,00		10,00		12,00		15,00		17,00			
	Jumlah Daftar Autentisitas Statis Arsip yang Dinyatakan Hilang Berdasarkan Penilaian dan penetapan (Arsip)	2,00	5,00		7,00		10,00		12,00		15,00			
2.24.03.1.05.0001 - Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang				4.274.192,00		4.574.047,20		4.908.721,30		5.283.215,60		5.703.348,20		
Terlaksananya Penilaian	Jumlah Daftar	2,00	5,00	4.274.192,00	7,00	4.574.047,20	10,00	4.908.721,30	12,00	5.283.215,60	15,00	5.703.348,20		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	Autentisitas Statis Arsip yang Dinyatakan Hilang Berdasarkan Penilaian dan penetapan (Arsip)													
2.24.03.1.05.0002 - Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang				4.274.192,00		4.574.047,20		4.908.721,30		5.283.215,60		5.703.348,20		
Terlaksananya Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang (Arsip)	5,00	7,00	4.274.192,00	10,00	4.574.047,20	12,00	4.908.721,30	15,00	5.283.215,60	17,00	5.703.348,20		
2.24.03.1.05.0003 - Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)				4.274.192,00		4.574.047,20		4.908.721,30		5.283.215,60		5.703.348,20		
Terlaksananya Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman (Arsip)	5,00	7,00	4.274.192,00	10,00	4.574.047,20	12,00	4.908.721,30	15,00	5.283.215,60	17,00	5.703.348,20		
2.24.04 - PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP				283.763.857,00		303.671.263,85		325.890.294,80		350.752.998,18		378.645.625,67		
Meningkatnya akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup dan terbuka	Persentase pemenuhan layanan akses masyarakat terhadap arsip tertutup (%)	0,00	100,00	283.763.857,00	100,00	303.671.263,85	100,00	325.890.294,80	100,00	350.752.998,18	100,00	378.645.625,67	2.23.2.24.0.00.01.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah	
	Persentase pemenuhan layanan akses masyarakat terhadap arsip terbuka (%)	0,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
2.24.04.1.01 - Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Daerah Provinsi				283.763.857,00		303.671.263,85		325.890.294,80		350.752.998,18		378.645.625,67		
Pelayanan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup di daerah Provinsi	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan ditetapkanJumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan ditetapkan (SOP)	0,00	1,00	283.763.857,00	1,00	303.671.263,85	1,00	325.890.294,80	1,00	350.752.998,18	1,00	378.645.625,67		
	Tersedianya Daftar Arsip Hasil Penyediaan dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup (Arsip)	0,00	5,00		10,00		15,00		20,00		25,00			
2.24.04.1.01.0004 - Penyusunan dan Penerapan SOP Penggunaan Arsip yang				141.881.929,00		151.835.632,85		162.945.147,80		175.376.499,18		189.322.813,67		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Bersifat Tertutup														
Terlaksananya Penyusunan dan Penerapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan ditetapkanJumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan ditetapkan (SOP)	0,00	1,00	141.881.929,00	1,00	151.835.632,85	1,00	162.945.147,80	1,00	175.376.499,18	1,00	189.322.813,67		
2.24.04.1.01.0005 - Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup				141.881.928,00		151.835.631,00		162.945.147,00		175.376.499,00		189.322.812,00		
Terlaksananya Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Tersedianya Daftar Arsip Hasil Penyediaan dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup (Arsip)	0,00	5,00	141.881.928,00	10,00	151.835.631,00	15,00	162.945.147,00	20,00	175.376.499,00	25,00	189.322.812,00		

4.2 Program/Kegiatan/Subkegiatan mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan 5 Program wajib dan 1 Program Penunjang dengan jumlah 24 kegiatan yang terdiri dari 15 kegiatan teknis dan 9 (sembilan) kegiatan rutin, dari beberapa program wajib Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang menjadi program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung prioritas pembangunan adalah sebagai berikut :

- (1) Program Pembinaan Perpustakaan
 - 1) Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi.
 - 2) Pengukuran Tingkat Gemar Membaca Masyarakat Tingkat Propinsi
 - 3) Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik
 - (2) Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno
 - 1) Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
 - 2) Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara
 - (3) Program Pengelolaan Arsip
 - 1) Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi
 - 2) Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi
- program/kegiatan/subkegiatan yang mendukung prioritas pembangunan daerah

terdapat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.4 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Rancangan Akhir Renstra

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
2.23.2.24.0.00.01.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah				
1.	2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	2.23.02.1.01 - Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	
			2.23.02.1.01.0012 - Pengukuran Tingkat Gemar Membaca Masyarakat Tingkat Propinsi	
			2.23.02.1.01.0015 - Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	
2.	2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	2.23.03.1.04 - Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	
			2.23.03.1.04.0001 - Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	
3.	2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Meningkatnya kualitas pengelolaan Arsip Perangkat Daerah	2.24.02.1.01 - Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	
			2.24.02.1.01.0012 - Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi	

4.3 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini telah disusun agar selaras dengan arah pembangunan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah, serta mendukung indikator nasional dari Perpustakaan Nasional RI dan ANRI.

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama rancangan Akhir Renstra

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	2.23.2.24.0.00.01.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah									
2.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	71,7	72	73	75	77	80	83	
3.	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah	Indeks	63,49	70	71	72	73	74	75	

4.4 Target Kinerja Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Pada renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan provinsi Sulawesi Tengah Tahun (2025–2029), urusan perpustakaan harus menunjukkan kinerja penyelenggaraan melalui IKI (Indikator Kinerja Kunci), yang mencerminkan capaian prioritas pembangunan daerah dan capaian Reformasi Birokrasi Tematik SDM & Pelayanan Publik. Indikator Kinerja Kunci pada urusan Perpustakaan terdiri dari Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dan Nilai Tingkat Kegemaran Membaca masyarakat (TGM). Target 2025–2029 untuk IPLM naik secara progresif, dan target TGM naik secara progresif, sehingga bisa menunjukkan perbaikan layanan literasi dan budaya baca masyarakat. Untuk pencapaian target IPLM dan TGM tersebut di atas maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melakukan Penguatan layanan perpustakaan berbasis inklusi, Penambahan koleksi bahan bacaan, Literasi digital dan kegiatan gemar membaca berbasis komunitas dan pembinaan perpustakaan sekolah, desa dan kelurahan.

Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan (IHPK) adalah indikator utama keberhasilan urusan kearsipan dalam Renstra Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Target capaian IHPK 2025–2029 adalah naik menuju kategori “Baik” (75) di akhir periode.

Untuk mencapai nilai tersebut Dinas Perpustakaan dan kearsipan yang membidangi kearsipan harus memperkuat Sumber Daya Manusia & sarana dan prasarana kearsipan.

Berikut Tabel Indikator Kinerja Kunci pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang menggambarkan Target 2025–2029 untuk IPLM dan target TGM naik secara progresif serta Target capaian IHPK 2025–2029 adalah naik menuju kategori “Baik.

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci Rancangan Akhir Resntra Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN										
2.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	komulatif	Indeks	71,7	72	73	75	77	80	83	
3.	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	komulatif	Nilai	67	68	70	72	74	76	78	
4.	2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN										
5.	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah	komulatif	Indeks	63,49	65	67	69	71	73	75	

BAB V

PENUTUP

Dokumen rencana strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 – 2029 dimaksudkan sebagai dokumen rencana resmi yang dipersyaratkan dalam mengarahkan pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Rencana strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 – 2029 ini merupakan dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang menggambarkan visi, misi, strategi atau kebijakan umum serta tahapan program kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tengah .

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Sedangkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 15, mengamanatkan pada setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana strategis perangkat daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Rencana strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah disusun secara konsisten dan selaras dengan RPJMD pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga terbentuk satu rangkaian yang runtut berkesinambungan dan saling berkaitan dalam memberikan kontribusi secara langsung terhadap upaya pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran serta kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah. Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah harus digunakan sebagai pedoman dan arah pelayanan bidang perpustakaan dan arsip bagi semua pemangku kepentingan dan masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah. Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah ini diharapkan bisa dipahami serta dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat, khusus para pemangku kepentingan. Dengan demikian, banyak pihak dapat terlibat aktif secara efektif dan konstruktif dalam kegiatan pembangunan dan pelayanan bidang perpustakaan dan kearsipan, termasuk memberi kritik, evaluasi, dan rekomendasi. Pelibatan publik secara lebih aktif dan terintegrasi diharapkan mampu meningkatkan hasil

pembangunan dan pelayanan perpustakaan dan kearsipan untuk masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah pada khususnya, dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Palu, 01 September 2025

Plt. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi Sulawesi Tengah



Muh. Idham Khalid, S.Sos, M.A.P
Pembina Utama Muda



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jalan Banteng No. 6 Palu Kode Pos 94114

Telp. (0451) 481490 Fax (0451) 482978

Website: <http://dispusarda.sultengprov.go.id> – email: sultengperpus@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : 006.4.8.3/1872/ DISPUSAKA

TENTANG

DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR SASARAN RENSTRA, DAN
INDIKATOR SASARAN PROGRAM
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
2025 - 2029

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pemerintah dan pembangunan serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan pembangunan Tahun 2025 - 2029, maka perlu disusun definisi operasional Indikator sasaran Renstra, dan indikator sasaran program Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah tentang definisi operasional Indikator sasaran Renstra, dan indikator sasaran program Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6777);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Pembangunan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta, Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR SASARAN RENSTRA, DAN INDIKATOR SASARAN PROGRAM DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI SULAWESI TENGAH.

PERTAMA Definisi operasional indikator sasaran Renstra, dan indikator sasaran program Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA Definisi operasional indikator sasaran Renstra, dan indikator sasaran program Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah,

meliputi Tabel indikator sasaran Renstra, tabel dan tabel Indikator Sasaran Program Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah;

KETIGA

Definisi operasional indikator sasaran Renstra, dan indikator sasaran program Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah menjadi acuan dalam penyusunan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana terlampir.

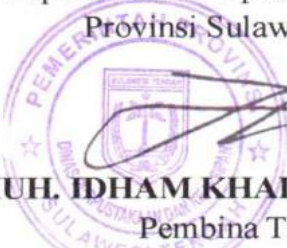
KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu

Pada Tanggal : 25 Oktober 2025

Plt. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi Sulawesi Tengah,



MUH. IDHAM KHALID, S.Sos., M.A.P.
Pembina Tingkat I
NIP. 19731231 199403 1 010

LAMPIRAN

Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah

Nomor : 000.4.8.3/1872/Dispusaka

Tanggal : 25 Oktober 2025

Tentang :

Definisi operasional indikator sasaran Renstra, indikator kinerja utama dan indikator program Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah.

I. TABEL DEFENISI OPERASIONAL INDIKATOR RENSTRA.

TUJUAN : Meningkatnya literasi masyarakat, tata kelola Kearsipan dan tingkat digitalisasi Arsip		
I.	Tabel definisi operasional Indikator RENSTRA	
1.		
Nama Indikator	:	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
Dasar Hukum	:	Peraturan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM).
Defenisi	:	Ukuran statistik yang mengukur efektivitas upaya pemerintah daerah dalam membina dan mengembangkan perpustakaan untuk menciptakan budaya literasi melalui dua dimensi utama: Kepatuhan dan Kinerja . Dimensi kepatuhan mencakup koleksi dan sumber daya manusia (pustakawan) perpustakaan, sementara dimensi kinerja mencakup layanan perpustakaan dan pengelolaan perpustakaan
Rumus Perhitungan	:	Indeks $0-100 = 100 \times (W_{Kepatuhan} \times Dim_{Kepatuhan} + W_{Kinerja} \times Di_{Kinerja})$. Dengan bobot : $W_{Kepatuhan} = 0,30$, $W_{Kinerja} = 0,70$
Interpretasi	:	Instrumen baru IPLM 2025 lebih mengukur sejauh mana fasilitas perpustakaan benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat melalui variabel layanan dan pengelolaan, termasuk pemanfaatan koleksi, kegiatan penguatan budaya baca, dan jumlah pengunjung. Semakin tinggi nilai indeks menunjukkan keberhasilan dalam program literasi di suatu Instansi.
Sumber Data	:	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
Frekwensi	:	Tahunan

TUJUAN : Meningkatnya literasi masyarakat, tata kelola Kearsipan dan tingkat digitalisasi Arsip		
I.	Tabel definisi operasional Indikator RENSTRA	
2.		
Nama Indikator	:	Tingkat Digitalisasi Arsip .
Dasar Hukum	:	▪ Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, ▪ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, ▪ Peraturan ANRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan, ▪ Peraturan ANRI Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja ANRI, ▪ Keputusan Kepala ANRI Nomor 322 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Kepala ANRI Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tim Pengawas Kearsipan.
Defenisi	:	Nilai <u>Tingkat Digitalisasi Arsip</u> adalah sebuah pengukuran kuantitatif yang menilai seberapa jauh suatu lembaga atau instansi telah berhasil mengkonversi arsip fisik menjadi arsip elektronik dan mengelola sistem kearsipan berbasis digital. Nilai ini menjadi indikator kemajuan dalam transformasi digital kearsipan untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan preservasi arsip di era digital

Rumus Perhitungan	:	= Nilai asepek kebijakan (30%) + Nilai implementasi kebijakan (70%)
Interpretasi	:	Semakin tinggi nilai tingkat digitalisasi arsip maka ini mencerminkan pengelolaan arsip digital yang komprehensif, efisien, dan transparan, seperti penggunaan aplikasi terintegrasi (misalnya, SRIKANDI), Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN), dan alih media arsip yang optimal.
Sumber Data	:	Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Frekwensi	:	Tahunan

I.	Tabel definisi operasional Indikator RENSTRA	
3.		
Sasaran Strategis	:	Meningkatnya capaian nilai dimensi kepatuhan
Nama Indikator	:	Nilai Dimensi Kepatuhan dalam IPLM
Dasar Hukum	:	Peraturan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM).
Defenisi	:	"Nilai Dimensi Kepatuhan" adalah bagian dari penilaian dale Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM), yang dikelola oleh lembaga seperti Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan dinas-dinas terkait di daerah yang didasarkan pada 2 (dua) variabel yaitu : - Variabel koleksi, meliputi : - Jumlah koleksi tercetak - Jumlah koleksi elektronik - Jumlah penambahan koleksi tercetak dalam satu tahun terakhir - Jumlah penambahan koleksi elektronik - Komitmen anggaran pengembangan koleksi tercetak dan digital dalam 1 (satu) tahun terakhir. - Variabel SDM, meliputi : - Jumlah fungsional pustakawan sesuai kualifikasi (fungsional/profesional) dan tenaga teknis perpustakaan - Jumlah tenaga teknis perpustakaan - Jumlah tenaga perpustakaan yang mengikuti kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) di bidang perpustakaan dalam satu tahun terakhir
Rumus Perhitungan	:	Nilai akhir Dimensi Kepatuhan dalam IPLM = Nilai Dimensi Kepatuhan x 30%
Interpretasi	:	Semakin tinggi nilai dimensi kepatuhan dalam IPLM berarti Pemerintah Daerah Provinsi semakin patuh terhadap standar nasional dan kebijakan terkait pembangunan literasi masyarakat
Sumber Data	:	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
Frekwensi	:	Tahunan

I.	Tabel definisi operasional Indikator RENSTRA	
4.		
Sasaran Strategis	:	Meningkatnya capaian nilai dimensi kinerja
Nama Indikator	:	Nilai Dimensi Kinerja dalam IPLM
Dasar Hukum	:	Peraturan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM).
Defenisi	:	Nilai Dimensi Kinerja" adalah bagian dari penilaian dalam Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM), yang dikelola oleh lembaga seperti Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan dinas-dinas terkait di daerah yang didasarkan pada 2 (dua) variabel yaitu :

		- Variabel layanan, meliputi : - Koleksi tercetak yang dimanfaatkan - Koleksi elektronik yang dimanfaatkan - Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan penguatan baca dan peningkatan literasi - Jumlah masyarakat yang memanfaatkan perpustakaan secara luring/daring - Jumlah masyarakat yang memanfaatkan fasilitas sarana TIK - Jumlah aktivitas kegiatan penguatan budaya baca dan literasi - Variabel pengelolaan, meliputi : - Jumlah kolaborasi dan kerjasama perpustakaan - Jumlah variasi dan layanan yang tersedia - Jumlah dokumen kebijakan dan prosedur layanan
Rumus Perhitungan	:	Nilai akhir Dimensi Kinerja dalam IPLM = Nilai Dimensi Kinerja x 70%
Interpretasi	:	menunjukkan sejauh mana efektivitas dan produktivitas suatu wilayah dalam mengelola layanan perpustakaan serta menggerakkan aktivitas literasi secara nyata di tengah masyarakat
Sumber Data	:	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
Frekwensi	:	Tahunan

I. Tabel definisi operasional Indikator RENSTRA		
5.		
Sasaran Strategis	:	Meningkatnya capaian Nilai Digitalisasi Arsip
Nama Indikator	:	Nilai aspek kebijakan dalam Digitalisasi Arsip
Dasar Hukum	:	- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, - Peraturan ANRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan, - Peraturan ANRI Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja ANRI, dan - Keputusan Kepala ANRI Nomor 322 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Kepala ANRI Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tim Pengawas Kearsipan.
Defenisi	:	aspek kebijakan dalam pengukuran digitalisasi arsip adalah tingkat ketersediaan, kepatuhan, dan formalisasi regulasi internal (seperti peraturan atau SOP) yang mengatur tata cara alih media, pengelolaan, serta pengamanan arsip digital di dalam suatu instansi
Rumus Perhitungan	:	$\text{Nilai aspek kebijakan dalam digitalisasi arsip} = \frac{\text{Nilai akhir aspek kebijakan}}{\text{Nilai standar aspek kebijakan (1.100)}} \times \text{Bobot (30\%)}$
Interpretasi	:	Kategori Tinggi / Memuaskan: Menunjukkan bahwa instansi telah memiliki regulasi internal yang komprehensif, selaras dengan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik), dan dijalankan secara konsisten. Kategori Cukup / Kurang: Mengindikasikan bahwa regulasi internal masih parsial, belum spesifik mengatur arsip digital, atau kurang didukung oleh komitmen struktural pimpinan
Sumber Data	:	Lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
Frekwensi	:	Tahunan

I.	Tabel definisi operasional Indikator RENSTRA	
6.		
Sasaran Strategis	:	Meningkatnya capaian Nilai Digitalisasi Arsip
Nama Indikator	:	Nilai implementasi kebijakan dalam Digitalisasi Arsip
Dasar Hukum	:	- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, - Peraturan ANRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan, - Peraturan ANRI Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja ANRI, dan - Keputusan Kepala ANRI Nomor 322 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Kepala ANRI Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tim Pengawas Kearsipan.
Defenisi	:	Implementasi kebijakan dalam digitalisasi arsip merupakan transformasi tata kelola arsip konvensional menjadi sistem digital terintegrasi guna mendukung efisiensi birokrasi, transparansi, dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Rumus Perhitungan	:	$\text{Nilai aspek implementasi kebijakan dalam digitalisasi arsip} = \frac{\text{Nilai akhir aspek implementasi kebijakan}}{\text{Nilai standar implementasi kebijakan (1.200)}} \times \text{Bobot (70\%)}$
Interpretasi	:	Nilai tinggi (Kategori memuaskan / Baik) Menandakan instansi tersebut berhasil membangun transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi anggaran melalui pengelolaan arsip elektronik yang sah secara hukum. Nilai Rendah: Menunjukkan perlunya perbaikan mendasar pada infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), kompetensi arsiparis, serta kepatuhan prosedur alih media arsip.
Sumber Data	:	Lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
Frekwensi	:	Tahunan

I.	Tabel definisi operasional Indikator RENSTRA	
7.		
Sasaran Strategis	:	Meningkatnya capaian Nilai Pengawasan Kearsipan
Nama Indikator	:	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada lingkup Pemerintah Daerah .
Dasar Hukum	:	- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, - Peraturan ANRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan, - Peraturan ANRI Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja ANRI, dan - Keputusan Kepala ANRI Nomor 322 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Kepala ANRI Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tim Pengawas Kearsipan
Defenisi	:	Skor numerik atau kategori (misalnya, "Baik", "Sangat Baik") yang dihasilkan dari penilaian terhadap kesesuaian penyelenggaraan kearsipan di instansi pemerintah daerah dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan yang ditetapkan. Indeks ini mengukur seberapa efektif dan efisien pengelolaan arsip, baik arsip dinamis (aktif dan inaktif) maupun arsip statis, dan digunakan untuk menilai kinerja kearsipan secara menyeluruh.
Rumus Perhitungan	:	Indeks Nilai Pengawasan Kearsipan = (Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Eksternal x 60%) + (Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal x 40%) Dimana :

		a. Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Eksternal = $(15\% \times \text{Nilai aspek kebijakan}) + (25\% \times \text{Nilai aspek pembinaan}) + (10\% \times \text{Aspek pengelolaan arsip inaktif dengan retensi sekurang – kurangnya 10 ATahun}) + (30\% \times \text{Aspek pengelolaan arsip statis}) + (20\% \times \text{Aspek sumber daya kearsipan})$. b. Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal = $(60\% \times \text{Nilai Aspek Pengelolaan arsip dinamis}) + (40\% \text{Nilai Aspek Sumber Daya Manusia})$
Interpretasi	:	Nilai tinggi (Kategori memuaskan / Baik) Menandakan instansi tersebut berhasil membangun transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi anggaran melalui pengelolaan arsip elektronik yang sah secara hukum. Nilai Rendah: Menunjukkan perlunya perbaikan mendasar pada infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), kompetensi arsiparis, serta kepatuhan prosedur alih media arsip.
Sumber Data	:	Lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
Frekwensi	:	Tahunan

II. TABEL DEFENISI OPERASIONAL INDIKATOR PROGRAM

II.	Tabel definisi operasional program	
8.		Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Sasaran Program	:	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan pada Perangkat Daerah.
Nama Indikator	:	<i>Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah</i>
Dasar Hukum	:	➤ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PANRB) Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi. ➤ Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Permen PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Defenisi	:	Indeks Reformasi Birokrasi memberikan gambaran sejauh mana suatu instansi pemerintah telah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dari KKN, dan memberikan pelayanan publik berkualitas dengan mengukur : a. Komponen Pengungkit. b. Komponen Hasil.
Rumus Perhitungan	:	Indeks Reformasi Birokrasi = $\text{Nilai RB General} + \text{Nilai RB Tematik}$
Interpretasi	:	Semakin Tinggi Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah, maka semakin berdampak positif pada Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan
Sumber Data	:	Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Frekwensi	:	Tahunan

II.	Tabel definisi operasional program	
9.		Program pembinaan perpustakaan
Sasaran Program	:	Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan
Nama Indikator	:	Nilai Tingkat kegemaran membaca
Dasar Hukum	:	➤ <u>Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan:</u> ➤ <u>Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 43 Tahun 2007:</u> ➤ <u>Peraturan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) No. 9 Tahun 2025</u> ➤ <u>Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengukuran Tingkat Kegemaran Membaca</u>
Defenisi	:	Nilai tingkat Kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat. Nilai Tingkat Kegemaran Membaca adalah ukuran nilai yang menggambarkan kondisi perilaku atau kebiasaan masyarakat di tingkat nasional, provinsi, atau kabupaten/kota dalam memperoleh pengetahuan dan informasi dari berbagai sumber bacaan yang diukur dengan 3 (Tiga) Fase : 1. Fase Pra Membaca (Teori motivasi membaca, Model akses dan kebiasaan membaca) 2. Fase Saat Membaca (Teori perilaku membaca, teorai literasi sosial) 3. Fase Pasca Membaca
Rumus Perhitungan	:	$\text{Nilai Tingkat Kegemaran Membaca} = (15\% \times \text{Nilai pengukuran Pra-Membaca}) + (50\% \times \text{Nilai pengukuran Saat-Membaca}) + (35\% \times \text{Nilai Pasca-Membaca})$
Interpretasi	:	Nilai yang lebih tinggi menunjukkan budaya membaca yang lebih kuat dan fondasi literasi yang lebih kokoh, yang mencakup kegiatan pra-membaca, saat membaca, dan pasca-membaca
Sumber Data	:	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
Frekwensi	:	Tahunan

II		Tabel definisi operasional program
10.		Program pembinaan perpustakaan
Sasaran Program	:	Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan
Nama Indikator	:	<i>Persentase perpustakaan SMA dan SMK yang terstandarisasi dan terakreditasi</i>
Dasar Hukum	:	➤ Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan: ➤ Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 43 Tahun 2007: ➤ Peraturan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) No. 9 Tahun 2025
Defenisi	:	Persentase perpustakaan SMA dan SMK yang terstandarisasi dan terakreditasi adalah proporsi atau perbandingan jumlah satuan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang perpustakaanannya telah memenuhi Standar Nasional Perpustakaan (SNP) dan memiliki sertifikat akreditasi resmi, terhadap total keseluruhan jumlah SMA dan SMK yang ada, dinyatakan dalam bentuk persentase
Rumus Perhitungan	:	$\% \text{ Perpustakaan SMA dan SMK yang terstandarisasi dan terakreditasi} = \frac{\text{Jumlah Perpustakaan SMA dan SMK di Provinsi Sulawesi Tengah yang terstandarisasi}}{\text{Total perpustakaan SMA, SMK di Provinsi Sulawesi Tengah}}$
Interpretasi	:	Interpretasi definisi operasional Persentase perpustakaan SMA dan SMK yang terstandarisasi dan terakreditasi adalah ukuran proporsi atau perbandingan jumlah sekolah menengah (SMA dan SMK) yang perpustakaanannya telah memenuhi Standar Nasional Perpustakaan (SNP) dan memiliki sertifikat akreditasi resmi terhadap total keseluruhan perpustakaan SMA dan SMK yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah
Sumber Data	:	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah, Perpustakaan SMA, SMK.
Frekwensi	:	Tahunan

II		Tabel definisi operasional program
11.		Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno
Sasaran Program	:	Meningkatnya Pelestarian Naskah Nasional dan Naskah Kuno
Nama Indikator	:	<i>Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dimiliki</i>
Dasar Hukum	:	➤ <u>Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan:</u> ➤ <u>Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 43 Tahun 2007:</u> ➤ <u>Peraturan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) No. 9 Tahun 2025</u>
Defenisi	:	Persentase jumlah Naskah Nasional dan Naskah Kuno yang dilestarikan dan dimiliki merujuk pada rasio atau proporsi naskah yang telah menjalani proses pelestarian (preservasi dan/atau konservasi) dibandingkan dengan total jumlah naskah yang Menjadi target untuk dimiliki.
Rumus Perhitungan	:	$\% \text{ Jumlah naskah kuno yang dimiliki} = \frac{\text{Jumlah naskah nasional dan naskah kuno yang dimiliki}}{\text{Total jumlah naskah nasional dan naskah kuno yang menjadi target untuk dimiliki (90.000)}}$
Interpretasi	:	Persentase yang tinggi (misalnya, di atas 80%) menunjukkan bahwa lembaga terkait telah berhasil menjalankan mandatnya dalam mengidentifikasi, mengamankan, dan memelihara sebagian besar warisan dokumenter yang diketahui
Sumber Data	:	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah
Frekwensi	:	Tahunan

II		Tabel definisi operasional program
12.		Program perlindungan dan penyelamatan arsip
Sasaran Program	:	Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK
Nama Indikator	:	Persentase cakupan perlindungan dan penyelamatan arsip
Dasar Hukum	:	- Undang-Undang (UU) Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

		- <u>Peraturan ANRI No. 6 Tahun 2022</u> tentang Pengawasan Kearsipan
Defenisi	:	indikator yang mengukur persentase jumlah arsip vital, arsip statis, dan arsip bernilai guna tinggi yang telah diamankan (fisik dan digital), dibandingkan dengan total arsip yang wajib dilindungi.
Rumus Perhitungan	:	$\% \text{ cakupan perlindungan dan penyelamatan arsip} = \frac{\text{Jumlah arsip yang dilindungi}}{\text{Total arsip}}$
Interpretasi	:	
Sumber Data	:	Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
Frekwensi	:	Bulanan, Tahunan

II		Tabel definisi operasional program
13.		Program pengelolaan arsip
Sasaran Program	:	Meningkatnya kualitas pengelolaan Arsip Perangkat Daerah
Nama Indikator	:	Persentase Perangkat daerah yang memiliki tata kelola kearsipan sesuai standar
Dasar Hukum	:	- Undang-Undang (UU) Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - <u>Peraturan ANRI No. 6 Tahun 2022</u> tentang Pengawasan Kearsipan
Defenisi	:	Persentase Perangkat daerah yang memiliki tata kelola kearsipan sesuai standar mengukur proporsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah menyelenggarakan pengelolaan kearsipan secara baku sesuai NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria).
Rumus Perhitungan	:	$\% \text{ PD yang memiliki tata kelola kearsipan sesuai standar} = \frac{\text{Jumlah PD yang memiliki tata kelola kearsipan sesuai standar}}{\text{Total OPD di Sulawesi Tengah}} \times 100$
Interpretasi	:	Capaian persentase OPD yang memiliki tata kelola kearsipan sesuai standar mengindikasikan tingkat kepatuhan dan kesiapan birokrasi. Semakin tinggi persentasenya, semakin baik pula kualitas pelayanan publik, efisiensi administrasi, serta akuntabilitas kinerja instansi.
Sumber Data	:	Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
Frekwensi	:	Tahunan

II		Tabel definisi operasional program
14.		Program pengelolaan arsip
Sasaran Program	:	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan kearsipan
Nama Indikator	:	Persentase perangkat daerah berkategori baik dalam pengelolaan arsip
Dasar Hukum	:	- Undang-Undang (UU) Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - <u>Peraturan ANRI No. 6 Tahun 2022</u> tentang Pengawasan Kearsipan
Defenisi	:	Persentase perangkat daerah minimal berkategori baik dalam pengelolaan arsip merujuk pada indikator kinerja yang mengukur tingkat kepatuhan dan efektivitas pengelolaan kearsipan di lingkungan pemerintah daerah berdasarkan standar dan regulasi yang ditetapkan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).
Rumus Perhitungan	:	$\% = \frac{\text{Jumlah PD yang mencapai minimal kategori baik}}{\text{Jumlah PD}} \times 100$
Interpretasi	:	Semakin Tinggi persentase menunjukkan semakin baik Perangkat Daerah daerah dalam mengelola arsip
Sumber Data	:	OPD di Provinsi Sulawesi Tengah
Frekwensi	:	Tahunan

II		Tabel definisi operasional program
15.		Perizinan Penggunaan Arsip
Sasaran Program	:	Meningkatnya akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup dan terbuka
Nama Indikator	:	Persentase pemenuhan layanan akses masyarakat terhadap arsip tertutup
Dasar Hukum	:	- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - Peraturan ANRI Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pedoman akses dan layanan arsip statis. - Peraturan ANRI Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemanfaatan Arsip Statis
Defenisi	:	Persentase pemenuhan layanan akses masyarakat terhadap arsip tertutup adalah tingkat keberhasilan lembaga kearsipan dalam memberikan izin dan menyediakan akses bagi masyarakat (seperti peneliti atau mahasiswa) terhadap arsip yang diklasifikasikan tertutup, sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan peraturan perundang-undangan
Rumus Perhitungan	:	$\% = \frac{\text{Jumlah arsip yang bersifat tertutup yang diakses masyarakat}}{\text{Jumlah PD jumlah arsip tertutup}} \times 100$
Interpretasi	:	Persentase tinggi menunjukan bahwa lembaga responsif dan akomodatif terhadap permohonan izin penggunaan arsip tertutup yang biasanya untuk kepentingan penelitian, investigasi dan ilmu pengetahuan
Sumber Data	:	Dinas perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah
Frekwensi	:	Tahunan

II		Tabel definisi operasional program
1.		Perizinan Penggunaan Arsip
Sasaran Program	:	Meningkatnya akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup dan terbuka
Nama Indikator	:	Persentase pemenuhan layanan akses masyarakat terhadap arsip terbuka
Dasar Hukum	:	- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - Peraturan ANRI Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pedoman akses dan layanan arsip statis. - Peraturan ANRI Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemanfaatan Arsip Statis
Defenisi	:	Persentase pemenuhan layanan akses masyarakat terhadap arsip terbuka adalah ukuran tingkat keberhasilan lembaga kearsipan dalam memenuhi permohonan akses masyarakat terhadap arsip yang berstatus terbuka atau publik
Rumus Perhitungan	:	$\% = \frac{\text{Jumlah Arsip yg bersifat terbuka yg diakses oleh masyarakat}}{\text{Jumlah arsip terbuka}} \times 100$
Interpretasi	:	Persentase yang merepresentasikan proporsi permintaan akses yang berhasil dipenuhi oleh lembaga kearsipan
Sumber Data	:	Dinas perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah
Frekwensi	:	Tahunan

Ditetapkan di : Palu

Pada Tanggal : 25 Oktober 2025

Plt. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi Sulawesi Tengah,

MUH. IDHAM KHALID, S.Sos., M.A.P.
Pembina Tingkat I
NIP. 19731231 199403 1 010



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jalan Banteng No. 6 Palu Kode Pos 94114
Telp. (0451) 481490 Fax (0451) 482978
Website : <http://dispusarda.sultengprov.go.id> – email : sultengperpus@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 000.4 / 1951 / DISPUSAKA

TENTANG :

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penerapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;

b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huru a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambah Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6777);

2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021;

6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi ;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 ;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025) Nomor : 190 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah: (9-321/2025);
9. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 73 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah;
10. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah nomor 44 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 Nomor 982).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi

pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P a l u

Pada Tanggal : 30 Oktober 2025

**Plt. Kepala Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan
Provinsi Sulawesi Tengah**



MUH. IDHAM KHALID, S.Sos., M.A.P
NIP. 19731231 199403 1 001

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu ;
2. Sekertaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu ;
3. Inspektur Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah di Palu ;
4. Kepala Badan Perencanaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
5. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah.

Nomor :
Tanggal :

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Defenisi Operasional	Formulasi	Penanggung Jawab	Sumber Data	Keterangan
1	Meningkatnya tingkat literasi masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Ukuran statistik yang mengukur efektivitas upaya pemerintah daerah dalam membina dan mengembangkan perpustakaan untuk menciptakan budaya literasi melalui dua dimensi utama: Kepatuhan dan Kinerja . Dimensi kepatuhan mencakup koleksi dan sumber daya manusia (pustakawan) perpustakaan, sementara dimensi kinerja mencakup layanan perpustakaan dan pengelolaan perpustakaan	$\text{Indeks}_{0-100} = 100 \times (W_{\text{Kepatuhan}} \times \text{Dim}_{\text{Kepatuhan}} + W_{\text{Kinerja}} \times \text{Di}_{\text{Kinerja}})$ Dengan bobot : $W_{\text{Kepatuhan}} = 0,30$, $W_{\text{Kinerja}} = 0,70$	Kepala Dinas	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah, SMA/SMK, SLB. Khusus	Pengukuran indikator oleh Perpustakaan Nasional
2	Meningkatnya Indeks Hasil Pengawasan pada lingkup Pemerintah Daerah	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintah Daerah	Skor numerik atau kategori (misalnya, "Baik", "Sangat Baik") yang dihasilkan dari penilaian terhadap kesesuaian penyelenggaraan kearsipan di instansi pemerintah daerah dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan yang ditetapkan. Indeks ini mengukur seberapa efektif dan efisien pengelolaan arsip, baik arsip dinamis (aktif dan inaktif) maupun arsip statis, dan digunakan untuk menilai kinerja kearsipan secara menyeluruh.	$\text{Indeks Nilai Pengawasan Kearsipan} = (\text{Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Eksternal} \times 60\%) + (\text{Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal} \times 40\%)$ Dimana : a. Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Eksternal = $(15\% \times \text{Nilai aspek kebijakan}) + (25\% \times \text{Nilai aspek pembinaan}) + (10\% \times \text{Aspek pengelolaan arsip inaktif dengan retensi sekurang – kurangnya } 10$	Kepala Dinas	Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.	Pengukuran indikator oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah.

Nomor :
Tanggal :

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Defenisi Operasional	Formulasi	Penanggung Jawab	Sumber Data	Keterangan
1	Meningkatnya tingkat literasi masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Ukuran statistik yang mengukur efektivitas upaya pemerintah daerah dalam membina dan mengembangkan perpustakaan untuk menciptakan budaya literasi melalui dua dimensi utama: Kepatuhan dan Kinerja . Dimensi kepatuhan mencakup koleksi dan sumber daya manusia (pustakawan) perpustakaan, sementara dimensi kinerja mencakup layanan perpustakaan dan pengelolaan perpustakaan	Indeks $0-100 = 100 \times (W_{Kepatuhan} \times Dim_{Kepatuhan} + W_{Kinerja} \times Di_{Kinerja})$. Dengan bobot : $W_{Kepatuhan} = 0,30$, $W_{Kinerja} = 0,70$	Kepala Dinas	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah, SMA/SMK, SLB. Khusus	Pengukuran indikator oleh Perpustakaan Nasional
2	Meningkatnya Indeks Hasil Pengawasan pada lingkup Pemerintah Daerah	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintah Daerah	Skor numerik atau kategori (misalnya, "Baik", "Sangat Baik") yang dihasilkan dari penilaian terhadap kesesuaian penyelenggaraan kearsipan di instansi pemerintah daerah dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan yang ditetapkan. Indeks ini mengukur seberapa efektif dan efisien pengelolaan arsip, baik arsip dinamis (aktif dan inaktif) maupun arsip statis, dan digunakan untuk menilai kinerja kearsipan secara menyeluruh.	Indeks Nilai Pengawasan Kearsipan = (Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Eksternal x 60%) + (Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal x 40%) Dimana : a. Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Eksternal = (15% x Nilai aspek kebijakan)+(25% x Nilai aspek pembinaan) + (10% x Aspek pengelolaan arsip inaktif dengn retensi sekurang – kurangnya 10	Kepala Dinas	Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.	Pengukuran indikator oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Defenisi Operasional	Formulasi	Penanggung Jawab	Sumber Data	Keterangan
				ATahun) + (30% x Aspek pengelolaan arsip statis) + (20% x Aspek sumber daya kearsipan). b. Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal = (60% x Nilai Aspek Pengelolaan arsip dinamis) + (40% Nilai Aspek Sumber Daya Manusia)			

Ditetapkan di : Palu
 Pada Tanggal : 20 Oktober 2025

Plt. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Provinsi Sulawesi Tengah.




MUH. IDHAM KHALID, S.Sos., M.A.P
 NIP. 19731231 1994031 001